



BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan secara ringkas kondisi umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP), landasan penyusunan serta sistematika penyusunan.

A. LATAR BELAKANG

Tuntutan terselenggaranya “good governance” pada Pemerintah Daerah di era otonomi ini semakin dirasa. Dasar penyelenggaraan good governance sendiri sebenarnya sudah ada sebelum adanya keputusan pemberlakuan Otonomi Daerah yang dimulai sejak tanggal 1 Januari 2002 seperti Tap MPR RI Nomor XI/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Pasca diberlakukannya Otonomi Daerah, penyelenggaraan good governance dipertegas dengan adanya Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme sangat diperlukan dalam percepatan terselenggaranya “good governance”. Untuk mewujudkan hal tersebut, setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan, dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi



pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Disamping itu dalam penyelenggaraan pemerintahan perlu dipenuhi tata pemerintahan yang baik, antara lain perlu adanya partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, pengawasan, efisiensi dan efektifitas, profesionalisme serta akuntabilitas. Sebagaimana diarahkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayasaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana setiap penyelenggara pemerintahan wajib melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi.

Akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan perwujudan kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pencapaian visi dan misi pemerintah kabupaten yang diwujudkan melalui pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Akuntabilitas kinerja dilaksanakan melalui pengukuran kinerja yang dapat digunakan untuk melakukan penilaian atas keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan, sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pengukuran kinerja tersebut disamping sebagai upaya pengembangan strategi organisasi ke depan, secara teknis dapat dilihat sebagai suatu sistem lacak performansi masing-masing unit organisasi di Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang merupakan langkah awal untuk pengendalian fungsi-fungsi manajerial secara menyeluruh.

Esensi penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tersebut, adalah penilaian kinerja berdasarkan tolak ukur rencana strategis (Renstra) yang didasarkan pada indikator, antara lain :



1. Masukan (Input), adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan meliputi SDM, dana, material, waktu, teknologi dan sebagainya;
2. Keluaran (Output), adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik), sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan;
3. Hasil (Outcome), adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah

Sistematika penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini telah disesuaikan pula dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penilaian atas keberhasilan/kegagalan lebih difokuskan pada pencapaian sasaran, hal ini berkaitan dengan kinerja yang sebenarnya, dimana sasaran merupakan hasil yang ingin dicapai/diwujudkan dalam kurun waktu 1 tahun atau kurang dari 1 tahun.

Pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pembangunan pada hakekatnya mengemban tiga fungsi utama yakni:

1. Fungsi alokasi : meliputi potensi daerah, sumber-sumber ekonomi dalam bentuk barang dan jasa, pelayanan masyarakat;
2. Fungsi distribusi : meliputi pendapatan dan kekayaan masyarakat, pemerataan pembangunan;
3. Fungsi stabilisasi : meliputi antara lain membantu bidang pertahanan, keamanan, ekonomi dan moneter.

Dengan demikian pemberdayaan potensi daerah merupakan prioritas utama untuk dapat melaksanakan dan mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah. Beberapa potensi daerah tersebut antara lain :



1. Kondisi Geografis Daerah

Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan ibukota Muara Sabak sejak akhir tahun 1999 telah menjadi Kabupaten baru yang terpisah dari Kabupaten Tanjung Jabung (*Berdasarkan UU RI No.54 tahun 1999 tanggal 4 Oktober 1999*). Setelah pemekaran, luas wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur menjadi 5.445,0 Km² dan menempati urutan kelima diantara Kabupaten / Kota yang ada di Provinsi Jambi atau seluas \pm 10,2 persen dari luas wilayah Provinsi Jambi.

Dari keseluruhan luas wilayah tersebut sekitar 41,33% (225.047,6 Ha) luas daratan Kabupaten ini merupakan kawasan Hutan Produksi, Hutan Lindung, Tahura, dan Kawasan TNB yang luasnya mencapai 138.242 Ha, sedangkan luas Kawasan Budidaya Pertanian dan Non Pertanian seluas 319.452,40 Ha (58,67%). Namun sejalan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2031, luas Kabupaten Tanjung Jabung Timur termasuk perairan dan 30 pulau kecil (11 diantaranya belum bernama) menjadi 9.005 Km² yang terdiri dari daratan seluas 5.445 Km² dan lautan/perairan seluas 3.560 Km². Disamping itu Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga memiliki panjang pantai sekitar 191 Km atau 90,5% dari panjang pantai Provinsi Jambi.

Secara geografis, Kabupaten Tanjung Jabung Timur terletak antara 0°53' Lintang Selatan sampai 1°41' Lintang Utara atau antara 103°23'-104°31' Bujur Timur. Disebelah Utara berbatasan dengan Laut China Selatan. Sementara di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Muaro Jambi dan Provinsi Sumatera Selatan, disebelah Timur berbatasan dengan Laut Cina Selatan, sedangkan disebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Muaro Jambi.

Wilayah administratif Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki luas daratan sekitar 5.445 km² dan luas perairan (laut) \pm 3.560,09 km² yang



terbagi dalam 11 kecamatan, 20 kelurahan, dan 73 desa, sebagaimana tabel 1.1 berikut :

Tabel 1.1
Jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Luas Kecamatan	
				Km ²	(%)
1.	Mendahara	1	8	911,15	16,73
2.	Mendahara Ulu	1	6	381,30	7,00
3.	Geragai	1	8	285,35	5,24
4.	Dendang	1	6	478,17	8,78
5.	Muara Sabak Barat	7	0	251,75	4,62
6.	Muara Sabak Timur	2	10	410,28	7,53
7.	Kuala Jambi	2	4	120,52	2,21
8.	Rantau Rasau	1	10	356,12	6,54
9.	Berbak	1	5	194,46	3,57
10.	Nipah Panjang	2	8	234,70	4,31
11.	Sadu	1	8	1.821,20	33,45
JUMLAH		20	73	5.445,00	100,00

Sumber : Tanjung Jabung Timur Dalam Angka 2014

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa rata-rata kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki 8-9 desa/ kelurahan. Kecamatan Muara Sabak Timur merupakan kecamatan yang memiliki desa/kelurahan terbanyak yaitu 10 desa dan 2 kelurahan. Sedangkan Kecamatan Kuala Jambi dan Berbak merupakan kecamatan yang paling sedikit memiliki desa/kelurahan yaitu masing-masing 4 desa 2 kelurahan dan 5 desa 1 kelurahan. Perlu kita pahami bahwa sebaran desa dan kelurahan bisa sangat mempengaruhi berkaitan tingkat sebaran pelayanan administrasi pada masyarakat. Secara ideal, jangkauan pelayanan administrasi pada masyarakat harus sedekat mungkin berada disekitar masyarakat. Namun tentu saja hal ini harus dikaitkan dengan tingkat sebaran dan tingkat kepadatan masyarakat pada suatu wilayah.

Kondisi topografi wilayah daratan Kabupaten Tanjung Jabung Timur secara umum berada di dataran yang sangat bervariasi mulai dari dataran rendah terdiri dari rawa / gambut dengan ketinggian antara 0 - 20 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah / gambut ini biasanya



ditandai dengan permukaan tanah yang banyak dialiri pasang surut air laut.

Kabupaten Tanjung Jabung Timur beriklim tropis basah dengan rata-rata curah hujan tahunan berkisar antara 2.000-3.000 milimeter per tahun, dimana 8 - 10 bulan basah dan 2 - 4 bulan kering. Rata-rata curah hujan bulan basah 179 – 279 mm dan curah bulan kering 68-106 mm. Suhu udara rata-rata 22,90 C – 31,40 C. Kelembaban udara 78% - 81% pada bulan Desember - Januari dan 73% pada bulan September.

2. Kondisi Demografis

Jumlah penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2015 bertambah sebanyak 1.586 jiwa dari 212.084 jiwa pada tahun 2014 menjadi 213.670 jiwa pada tahun 2015 atau dengan pertumbuhan 0,74 %. Tingkat kepadatan penduduk rata-rata tahun 2015 sebesar 39,24 jiwa/km² dan sex ratio 105,55.

Dari data pada tabel 1.2 dapat diketahui bahwa kepadatan tertinggi di kecamatan Kuala Jambi, hal ini karena memang jumlah penduduknya yang relatif besar dan mempunyai luas wilayah paling kecil bila dibanding kecamatan lain. Kecamatan Muara Sabak Timur merupakan kecamatan yang mempunyai jumlah penduduk laki-laki dan perempuan hampir sama. Sedangkan jumlah rumah tangga tertinggi juga berada di kecamatan Muara Sabak Timur dan terendah pada kecamatan Berbak.

Tabel 1.2

Jumlah Penduduk dan Kepadatan Dirinci per Kecamatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014 dan 2015

No	Kecamatan	2014					2015*				
		Laki-laki	Perempuan	Σ Penduduk	Sex Ratio	Kepadatan (jiwa/km ²)	Laki-laki	Perempuan	Σ Penduduk	Sex Ratio	Kepadatan (jiwa/km ²)
1	Mendahara	13.252	12.700	25.952	104	35,12	13.306	12.747	26.053	104	28,59
2	Mendahara Ulu	8.747	7.708	16.455	113	42,40	9.001	7.932	16.933	113	44,41
3	Geragai	11.840	10.371	22.211	114	50,83	11.965	10.483	22.448	114	78,67
4	Dendang	7.627	7.344	14.971	104	55,10	7.641	7.354	14.995	104	31,32



5	Muara Sabak Barat	8.535	8.064	16.599	106	60,25	8.682	8.204	16.886	106	67,07
6	Muara Sabak Timur	15.672	15.476	31.148	101	53,39	15.710	15.507	31.217	101	76,09
7	Kuala Jambi	7.268	7.063	14.331	103	127,95	7.314	7.103	14.417	103	119,62
8	Rantau Rasau	11.741	11.182	22.923	105	73,71	11.857	11.287	23.144	105	64,99
9	Berbak	5.051	4.810	9.861	106	119,00	5.061	4.817	9.878	105	50,80
10	Nipah Panjang	12.881	12.585	25.466	102	43,26	12.906	12.603	25.509	102	108,69
11	Sadu	6.262	5.905	12.167	106	6,88	6.275	5.915	12.190	106	6,69
Jumlah		108.924	103.208	212.084	105	39,23	109.718	103.952	213.670	106	39,24

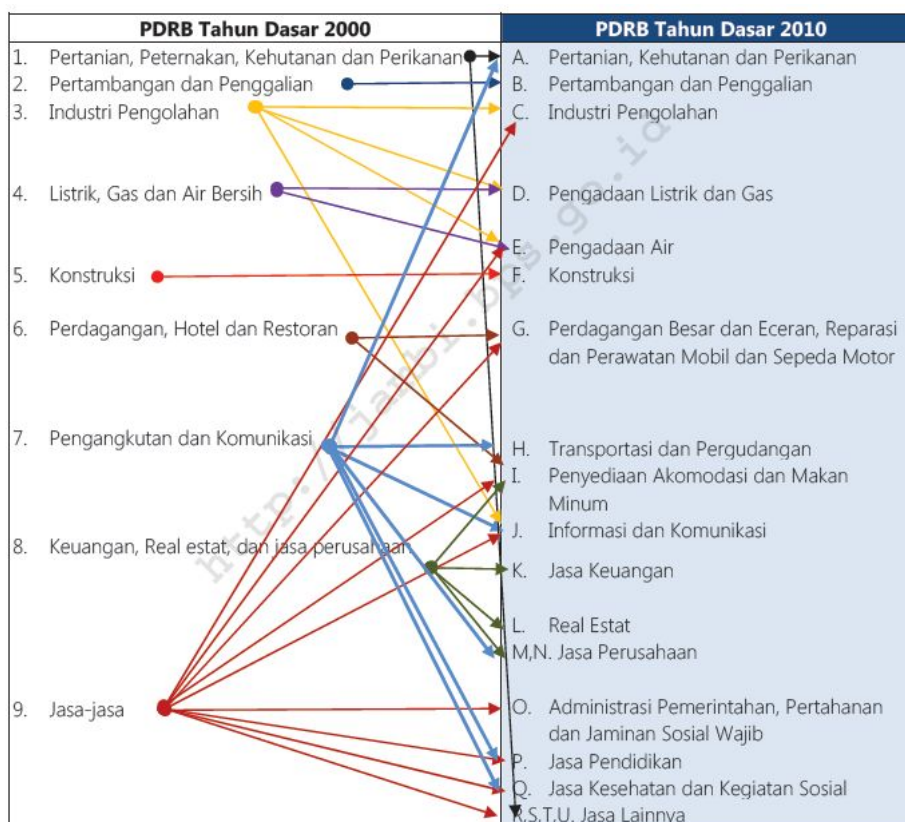
*) Angka sementara

Sumber : BPS Tanjung Jabung Timur, data diolah.

3. Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi pada Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah tahun 2015 ini akan menggunakan indikator ekonomi makro seperti: pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar tahun 2010. Hal ini dikarena Badan Pusat Statistik (BPS) juga telah melakukan perubahan tahun dasar secara berkala sebanyak 5 (lima) kali yaitu pada tahun 1960, 1973, 1983, 1993 dan 2000. Tahun 2010 dipilih sebagai tahun dasar baru menggantikan tahun dasar 2000. Adapun perubahan klasifikasi PDRB menurut lapangan usaha tahun dasar 2000 menggunakan Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia 1990 (KLUI 1990) sedangkan pada PDRB tahun dasar 2010 menggunakan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2009) Perbandingan keduanya pada tingkat paling agregat dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.3
Perbandingan Perubahan Klasifikasi PDRB
Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2000 dan 2010



Dengan menggunakan PDRB tahun dasar 2010 ini unit usaha yang menentukan nilai PDRB dikelompokkan ke dalam 17 (tujuh belas) sektor : (1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; (2) Pertambangan dan Penggalian; (3) Industri Pengolahan; (4) Pengadaan Listrik dan Gas; (5) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan dan Daur Ulang; (6) Konstruksi; (7) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; (8) Transportasi dan Pergudangan; (9) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; (10) Informasi dan Komunikasi; (11) Jasa Keuangan dan Asuransi; (12) Real Estate; (13) Jasa Perusahaan; (14) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; (15) Jasa Pendidikan; (16) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (17) Jasa lainnya. Nilai PDRB dapat dihitung berdasarkan harga berlaku (*current price*) maupun berdasarkan harga konstan (*constant price*).



Kondisi ekonomi daerah selain dapat dijadikan bahan dalam mengevaluasi kinerja makro pembangunan, dapat juga digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan penentuan kebijakan publik, serta prakiraan kondisi ekonomi dimasa yang akan datang.

PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang dihitung menurut harga berlaku (*current price*) menunjukkan kontribusi atau pangsa masing-masing sektor dalam struktur perekonomian daerah berdasarkan harga yang berlaku dalam tahun yang bersangkutan. Mengingat PDRB atas dasar harga berlaku mengandung unsur inflasi makro, maka tinggi rendahnya pertumbuhan PDRB dipengaruhi oleh tingkat inflasi dalam periode yang bersangkutan. Dengan demikian, PDRB atas dasar harga berlaku belum dapat menggambarkan pertumbuhan ekonomi riil Tanjung Jabung Timur. Untuk memperlihatkan pertumbuhan PDRB secara riil, dapat digunakan PDRB atas dasar harga konstan karena nilai tambah barang dan jasa akhir yang dihasilkan menggunakan harga tahun dasar yang tetap, yakni harga dasar tahun tertentu yang dipilih.

Nilai Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2014 atas harga konstan (dengan migas) meningkat dari tahun 2013 yaitu dari Rp.14.677.871,34 menjadi Rp. 15.547.223,06 atau tumbuh sebesar 5,92 %. Sedangkan untuk PDRB tanpa migas pertumbuhan pada tahun yang sama sebesar 8,86 % atau secara absolute meningkat dari Rp. 4.467.554,59 menjadi Rp.4.863.588,91.

Tabel 1.4

PDRB (dalam jutaan) dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Timur (%) Tahun 2013 – 2014 (Harga Konstan)

No	Lapangan Usaha	2013		2014	
		PDRB	LAJU PERTUMBUHAN	PDRB	LAJU PERTUMBUHAN
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.933.468,90	5,91	2.114.385,33	9,36
2	Pertambangan dan Penggalian	9.282.559,69	2,42	9.779.150,15	5,35
3	Industri Pengolahan	1.113.996,65	11,30	1.101.678,97	-1,11
4	Pengadaan Listrik dan Gas	1.567,59	10,24	1.668,45	6,43



5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	7.804,96	0,25	8.027,43	2,85
6	Konstruksi	504.502,48	14,97	558.441,66	10,69
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reperasi Mobil dan Sepeda Motor	580.981,80	10,18	648.148,59	11,56
8	Transportasi dan Pergudangan	130.748,35	7,78	144.812,30	10,76
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	34.188,79	7,50	41.049,04	20,07
10	Informasi dan Komunikasi	146.464,55	5,57	161.790,86	10,46
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	93.144,21	8,70	98.638,64	5,90
12	Real Estate	66.941,06	5,57	68.081,12	10,46
13	Jasa Perusahaan	135.184,23	8,70	140.343,16	5,90
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	205.371,45	5,78	225.000,50	9,56
15	Jasa Pendidikan	356.582,87	4,67	360.236,73	5,45
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	49.552,14	12,34	59.061,30	19,19
17	Jasa Lainnya	34.811,62	4,67	36.708,85	5,45
PDRB dengan Migas		14.677.871,34	4,44	15.547.223,06	5,92
PDRB tanpa Migas		4.467.554,59	7,33	4.863.588,91	8,86

Sumber : BPS Tanjung Jabung Timur, data diolah

Peranan/kontribusi sektor lapangan usaha menunjukkan struktur ekonomi yang terbentuk di suatu daerah. Struktur ekonomi yang dinyatakan dalam persentase, menunjukkan besarnya peran masing-masing sektor ekonomi dalam kemampuan menciptakan nilai tambah. Hal tersebut menggambarkan ketergantungan daerah terhadap kemampuan produksi dari masing-masing sektor lapangan usaha.

Pada tahun 2014 sektor Pertambangan dan Penggalan memberikan kontribusi sebesar 62,90 % kemudian diikuti oleh sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 13,60 %. Urutan kontribusi tersebut menunjukan bahwa sektor Pertambangan dan Penggalan memegang peranan paling tinggi dalam perekonomian Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Adapun sektor Industri Pengolahan, sektor



Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, dan sektor Konstruksi memiliki peranan dalam pembentukan PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur masing-masing sebesar 7,09 %, 4,17 % dan 3,59 %.

Untuk lebih jelasnya dapat diikuti pada tabel 1.5. berikut:

Tabel 1.5

Struktur Ekonomi Tanjung Jabung Timur (%) Atas Harga Konstan Tahun 2013-2014

No	Lapangan Usaha	2013	2014
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	13,17	13,60
2	Pertambangan dan Penggalian	63,24	62,90
3	Industri Pengolahan	7,59	7,09
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,01	0,01
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,05	0,05
6	Konstruksi	3,44	3,59
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reperasi Mobil dan Sepeda Motor	3,96	4,17
8	Transportasi dan Pergudangan	0,89	0,93
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,23	0,26
10	Informasi dan Komunikasi	1,00	1,04
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,63	0,63
12	Real Estate	0,46	0,44
13	Jasa Perusahaan	0,92	0,90
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,40	1,45
15	Jasa Pendidikan	2,43	2,32
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,34	0,38
17	Jasa Lainnya	0,24	0,24
PDRB dengan Migas		100	100

Sumber : BPS Tanjung Jabung Timur, data diolah

Tingkat kemakmuran suatu daerah juga dapat dihitung dengan menggunakan angka PDRB Perkapita yaitu dengan cara nilai total PDRB dibagi jumlah penduduk pertengahan tahun. Dengan cara ini dapat diketahui pendapatan perkapita penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun tertentu baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Walaupun secara teoritis angka yang diperoleh merupakan indikator untuk melihat tingkat kesejahteraan suatu daerah, namun dari angka ini belum dapat melihat tingkat pemerataan pendapatan penduduk daerah tersebut.

PDRB perkapita Kabupaten Tanjung Jabung Timur dari tahun 2010

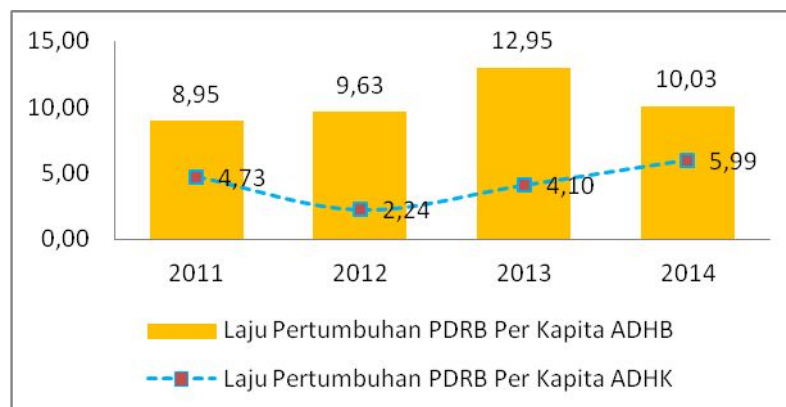


sampai tahun 2014 terus mengalami kenaikan, jika pada tahun 2010 sebesar Rp. 62.046.422,- perkapita pertahun atau sebesar Rp. 5.170.535,- perkapita perbulan maka pada tahun 2014 telah menjadi Rp 92.091.755,- perkapita pertahun atau sebesar Rp 7.674.313,- perkapita perbulan.

Namun, secara riil PDRB perkapita atas dasar harga konstan tahun 2014 sebesar Rp.73.306.912,- perkapita pertahun atau sebesar Rp. 6.108.909,- perkapita perbulan.

Gambar 1.2

Grafik Laju Pertumbuhan PDRB Perkapita Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2011-2014 (persen)



Sumber: BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Tabel. 1.6

PDRB Perkapita di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2010-2014 (Juta Rupiah)

Tahun	Atas Dasar Harga Berlaku	Atas Dasar Harga Konstan
[1]	[2]	[3]
2010	62 046 422,42	62 046 422,42
2011	67 597 675,36	64 982 355,35
2012	74 104 051,48	66 440 684,13
2013	83 699 050,73	69 164 120,59
2014	92 091 755,19	73 306 911,70

Sumber: BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur



Subsektor minyak dan gas bumi yang telah berproduksi tahun 1997 dan produksinya meningkat pesat sejak tahun 1998 sampai dengan saat ini, mempengaruhi nilai PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur secara keseluruhan sehingga PDRB perkapita mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Jika subsektor ini tidak dimasukkan dalam penghitungan PDRB perkapita, maka akan diperoleh data bahwa PDRB perkapita penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2014 sebesar Rp. 31.322.505,00. PDRB perkapita tanpa minyak dan gas bumi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.7
Perkembangan PDRB Perkapita Tanpa Minyak dan Gas Bumi
Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2010-2014 (Juta Rupiah)

Tahun	Atas Dasar Harga Berlaku	Atas Dasar Harga Konstan
[1]	[2]	[3]
2010	18 224 179,28	18 224 179,28
2011	19 997 950,04	18 707 996,87
2012	22 099 280,94	19 678 622,26
2013	25 322 053,04	21 051 723,18
2014	31 322 504,89	22 932 370,73

Sumber: BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur

B. KELEMBAGAAN

1. Kewenangan Daerah membentuk Organisasi Perangkat Daerah

Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan kewenangan pemerintahan antara Pemerintah dengan pemerintahan daerah. Urusan pemerintahan terdiri dari urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah dan urusan pemerintahan yang dikelola secara bersama antar tingkatan dan susunan pemerintahan atau konkuren. Urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah adalah urusan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter dan fiskal nasional, yustisi, dan agama. Urusan pemerintahan yang dapat dikelola secara bersama antar tingkatan dan susunan pemerintahan atau konkuren adalah urusan-urusan pemerintahan selain urusan pemerintahan yang sepenuhnya



menjadi urusan Pemerintah. Dengan demikian dalam setiap bidang urusan pemerintahan yang bersifat konkuren senantiasa terdapat bagian urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

Untuk mewujudkan pembagian urusan pemerintahan yang bersifat konkuren tersebut secara proporsional antara Pemerintah, pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota maka ditetapkan kriteria pembagian urusan pemerintahan yang meliputi eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi. Penggunaan ketiga kriteria tersebut diterapkan secara kumulatif sebagai satu kesatuan dengan mempertimbangkan keserasian dan keadilan hubungan antar tingkatan dan susunan pemerintahan.

Kriteria eksternalitas didasarkan atas pemikiran bahwa tingkat pemerintahan yang berwenang atas suatu urusan pemerintahan ditentukan oleh jangkauan dampak yang diakibatkan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut. Untuk mencegah terjadinya tumpang tindih pengakuan atau klaim atas dampak tersebut, maka ditentukan kriteria akuntabilitas yaitu tingkat pemerintahan yang paling dekat dengan dampak yang timbul adalah yang paling berwenang untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan tersebut. Hal ini adalah sesuai dengan prinsip demokrasi yaitu mendorong akuntabilitas Pemerintah kepada rakyat. Kriteria efisiensi didasarkan pada pemikiran bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan sedapat mungkin mencapai skala ekonomis. Hal ini dimaksudkan agar seluruh tingkat pemerintahan wajib mengedepankan pencapaian efisiensi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya yang sangat diperlukan dalam menghadapi persaingan di era global. Dengan penerapan ketiga kriteria tersebut, semangat demokrasi yang diterapkan melalui kriteria eksternalitas dan akuntabilitas, serta semangat ekonomis yang diwujudkan melalui kriteria efisiensi dapat disinergikan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan demokratisasi sebagai esensi dasar dari kebijakan desentralisasi.



Urusan yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang terkait dengan pelayanan dasar (*basic services*) bagi masyarakat, seperti pendidikan dasar, kesehatan, lingkungan hidup, perhubungan, kependudukan dan sebagainya. Urusan pemerintahan yang bersifat pilihan adalah urusan pemerintahan yang diprioritaskan oleh pemerintahan daerah untuk diselenggarakan yang terkait dengan upaya mengembangkan potensi unggulan (*core competence*) yang menjadi kekhasan daerah. Urusan pemerintahan di luar urusan wajib dan urusan pilihan yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah, sepanjang menjadi kewenangan daerah yang bersangkutan tetap harus diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan. Pemerintah daerah yang melalaikan penyelenggaraan urusan yang bersifat wajib akan dilakukan langkah-langkah pembinaan oleh Pemerintah Pusat berupa teguran, instruksi, pemeriksaan, sampai dengan penugasan pejabat pemerintah pusat ke daerah yang bersangkutan untuk memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib tersebut dengan pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang bersangkutan.

PP No. 38 Tahun 2007 mesnyaratkan adanya 26 urusan wajib dan 6 urusan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota, berdasarkan kondisi saat ini di Kabupaten Tanjung Jabung Timur seluruh kewenangan tersebut telah diwujudkan ke dalam bentuk organisasi perangkat daerah yang tersebar dalam Bagian, Dinas ataupun lembaga teknis, terkecuali mengenai. Selain itu berdasarkan Permendagri No. 57/2007 dalam pelaksanaan urusan wajib pemerintah yang diwadahi dalam bentuk dinas tidak boleh dijadikan badan begitupun sebaliknya.

2. Organisasi dan Tata Kerja

Pemerintahan pada hakikatnya merupakan proses untuk melaksanakan fungsifungsi pengaturan (*regulasi*), pelayanan, dan pemberdayaan dengan optimal. Dalam praktiknya, pelaksanaan fungsi-



fungsi ini menjadi tanggung jawab birokrasi pemerintahan. Dalam konsep birokrasi ideal seperti dikemukakan Max Weber, birokrasi merupakan organisasi yang melaksanakan sejumlah fungsi, yang ditandai dengan karakteristik hirarkhis, memiliki rantai komando, terdapat pembagian dan diferensiasi pekerjaan, dll. Sebagai suatu organisasi, birokrasi memiliki sejumlah struktur yang menjalankan fungsi dan pembagian kerja tersebut. Hal ini sejalan dengan pemahaman organisasi dalam perspektif statis maupun dinamis. Dalam perspektif statis, organisasi mewujudkan sebagai suatu lembaga atau wadah. Sementara dalam perspektif dinamis, organisasi mengandung aspek ketatalaksanaan dalam proses dinamika organisasi.

Pada prinsipnya, struktur organisasi dan tata hubungan kerja yang lahir sebagai konsekuensi dari bentuk organisasi birokrasi diterapkan dengan berlandaskan pada filosofi "siapa mengerjakan apa serta bagaimana caranya". Implikasinya, dalam organisasi pemerintahan dikenal adanya struktur organisasi yang melaksanakan fungsi staf, fungsi lini, dan fungsi teknis. Fungsi staf umumnya dilaksanakan di lingkungan Sekretariat Daerah, sementara fungsi-fungsi lainnya dilaksanakan oleh dinas-dinas otonom di lingkungan Pemerintah Daerah.

Melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 01 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 02 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan dan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga lain, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur membentuk organisasi perangkat daerah sebagai berikut:



a. Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati. Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah dan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
2. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
4. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari Sekretaris Daerah yang membawahi:

- a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
- b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan; dan
- c. Asisten Administrasi Umum.

Masing-masing Asisten membawahi 3 (tiga) Bagian terdiri dari :

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat membawahi 3 (tiga) Bagian terdiri dari :
 - a. Bagian Pemerintahan Umum terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Pemerintahan Umum;
 - 2) Sub Bagian Otonomi Daerah;
 - 3) Sub Bagian Pembinaan Pertanahan.
 - b. Bagian Kesejahteraan Rakyat terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Pemuda dan Olah Raga;
 - 2) Sub Bagian Bina Mental dan Agama;
 - 3) Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat.
 - c. Bagian Humas terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Pemberitaan;



- 2) Sub Bagian Dokumen;
 - 3) Sub Bagian Protokol.
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan membawahi 3 (tiga) Bagian terdiri dari :
- a. Bagian Pembangunan terdiri dari :
 - 1) Sub bagian Penyusunan Program;
 - 2) Sub Bagian Pengendalian;
 - 3) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
 - b. Bagian Sumber Daya Alam terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Kehutanan, Perkebunan, Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - 2) Sub Bagian Lingkungan Hidup;
 - 3) Sub Bagian Pertambangan dan Energi.
 - c. Bagian Perekonomian terdiri dari :
 - 1) Sub bagian Produksi Daerah;
 - 2) Sub bagian Sarana Perekonomian;
 - 3) Sub bagian Pengembangan BUMD dan BUMDES.
 - 4)
3. Asisten Administrasi Umum membawahi 3 (tiga) Bagian terdiri dari :
- a. Bagian Organisasi terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Kelembagaan dan Tatalaksana;
 - 2) Sub Bagian Pembinaan Aparatur dan Kepegawaian;
 - 3) Sub Bagian Analisis Formasi Jabatan dan Perpustakaan.
 - b. Bagian Hukum dan Perundang-undangan terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Peraturan PerUndang - undangan;
 - 2) Sub Bagian Bantuan Hukum;
 - 3) Sub Bagian Dokumentasi Hukum.
 - c. Bagian Umum terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Pengadaan dan Pendistribusian;
 - 3) Sub Bagian Rumah Tangga.



b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan DPRD dalam menyelenggarakan tugas, wewenang, hak dan kewajiban DPRD. Secara organisasional, Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang diangkat oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas persetujuan Pimpinan DPRD. Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Daerah. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan mengoordinir serta menyediakan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan memiliki fungsi :

1. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
2. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
3. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan
4. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Susunan organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri dari :

1. Sekretaris Dewan;
2. Bagian Umum terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Ketatausahaan;
 - b. Sub Rumah Tangga;
 - c. Sub Bagian Perlengkapan.
3. Bagian Persidangan terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Rapat dan Risalah;
 - b. Sub Bagian Dokumentasi dan Publikasi;
 - c. Sub Bagian Protokol dan Humas.
4. Bagian Hukum dan Perundang-undangan terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Pengkajian dan Pengembangan;
 - b. Sub Bagian Produk Hukum dan Perundang-undangan;
 - c. Sub Bagian Data, Jaringan Informasi Hukum dan Perpustakaan.



5. Bagian Keuangan terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran;
 - b. Sub Bagian Verifikasi dan Pelaporan;
 - c. Sub Bagian Pembukuan

c. Dinas Daerah

Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Daerah mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan operasional urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan kepada Bupati. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Daerah mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Pemberian penilaian dan pelaksanaan pelayanan umum; dan
3. Pemberian pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.

Dinas Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, terdiri dari :

- a. Dinas Pendidikan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- d. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- e. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- f. Dinas Pekerjaan Umum;
- g. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- h. Dinas Kebudayaan, Parawisata, Pemuda dan Olahraga;
- i. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- j. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
- k. Dinas Pertanian Tanaman Pangan;
- l. Dinas Peternakan;
- m. Dinas Kelautan dan Perikanan
- n. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- o. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral; dan



p. Dinas Tatakota, Kebersihan dan Pertamanan.

Dalam rangka pengembangan fungsi teknis tertentu dan pelaksanaan kewenangan Kabupaten yang masih ada di Kecamatan dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah (UPTD) yang wilayah kerjanya dapat terdiri dari satu atau beberapa Kecamatan.

d. Lembaga Teknis Daerah (LTD)

Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah. Dalam Lembaga Teknis Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan dan/atau Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dan melaksanakan kewenangan tertentu Pemerintah Kabupaten sesuai kebutuhan daerah dan kewenangan yang dilimpahkan kepada Bupati.

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Lembaga Teknis Daerah mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten.

Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, terdiri dari :

- a. Bappeda;
- b. Badan Kepegawaian Daerah;
- c. Badan Kesbang, Pol dan Linmas;
- d. Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB;
- e. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan;
- f. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
- g. Inspektorat;
- h. Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah
- i. Kantor Perpustakaan, Dokumentasi, Arsip dan Pengolahan Data;
- j. Kantor Ketahanan Pangan;
- k. Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan;
- l. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu;



- m. Kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah; dan
- n. Satuan Polisi Pamong Praja;

e. Lembaga Lain

Ketentuan pada PP No. 41 Tahun 2007 mengatur tentang pembentukan sekretariat pada lembaga-lembaga lain yang fungsinya sebagai unsur staf bagi lembaga-lembaga tersebut. Lembaga-lembaga lain tersebut bukan merupakan perangkat daerah, tetapi sekretariatnya merupakan bagian dari perangkat daerah hal ini sebagaimana dimaksud pada penjelasan Pasal 45 ayat (1) dan (2) PP 41 Tahun 2007 yang menyatakan:

Penjelasan Pasal 45 ayat (1)

Yang dimaksud dengan "tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan" adalah tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan selain tugas dan fungsi perangkat daerah tetapi harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan, misalnya sekretariat komisi penyiaran, sekretariat badan narkoba.

Yang dimaksud dengan "tugas pemerintahan umum lainnya" adalah penyelenggaraan tugas pemerintahan yang perlu ditangani oleh pemerintah daerah sesuai dengan karakteristik daerah, misalnya penanganan perbatasan, kerja sama antar daerah.

Sekretariat pada lembaga-lembaga lain tersebut mencakup:

a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Badan ini dibentuk sesuai dengan amanat UU No. 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi:



1. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; serta
2. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas:

1. menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
2. menetapkan standardisasi serta kebutuhan
3. penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
4. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
5. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
6. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya;
7. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
9. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
10. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
11. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

b. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten/Kota merupakan bagian dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dipimpin oleh seorang Sekretaris, secara teknis operasional bertanggungjawab



kepada Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten dan secara teknis administratif bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi pada Pengurus KORPRI Kabupaten dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat Pengurus KORPRI Kabupaten.

Sekretariat Pengurus KORPRI Kabupaten dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan kerjasama;
- b. penyelenggaraan kegiatan pembinaan olah raga, seni, budaya, mental dan rohani;
- c. penyelenggaraan kegiatan usaha dan bantuan sosial; dan
- d. pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan Sekretariat Pengurus KORPRI Kabupaten.

f. Kecamatan

Sebelas kecamatan yang terdiri dari kecamatan Muara Sabak Barat, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kecamatan Dendang, Kecamatan Geragai, Kecamatan Kuala Jambi, Kecamatan Mendahara Ulu, Kecamatan Mendahara Ilir, Kecamatan Rantau Rasau, Kecamatan Nipah Panjang, Kecamatan Berbak, dan Kecamatan Sadu.

Pelaksanaan tata hubungan kerja dalam lingkup satuan kerja perangkat daerah pada prinsipnya sama, yakni mengacu pada mekanisme hubungan hirarkhis, di mana pimpinan tiap-tiap unit kerja bertanggung jawab pada pimpinan yang lebih tinggi. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, para pejabat struktural dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip kordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan;



Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. Setiap laporan yang diterima oleh pemimpin satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan. Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang fungsional mempunyai hubungan kerja.

C. ISUE STRATEGIS DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

A. ISU STRATEGIS

Berdasarkan evaluasi pembangunan tahun sebelumnya dan melihat fakta permasalahan dan tantangan pada tahun 2015, maka ditetapkan 12 poin isu strategis:

1. *Mengeliminir Bottlenecking dan unconnectivity* dalam pembangunan dan perkembangan ekonomi dan sosial.
2. Pemenuhan kecukupan air minum dan energi.
3. Angka kemiskinan yang relatif masih tinggi (Tahun 2010:12,40%).
4. Pencapaian pembangunan *Millenium Development Goals (MDG's)* 2015.
5. Ketahanan dan kerentanan pangan (*Food Security and Vulnerability*).
6. Penataan zonasi dan perlindungan lahan pangan berkelanjutan.
7. Penataan kelembagaan (*restrukturisasi perangkat daerah*), peningkatan layanan publik dan tata kelola pemerintah yang baik (*Good Governance*)
8. Optimalisasi potensi pesisir, pantai dan lautan.
9. Pengembangan komoditi unggulan kepala dalam.
10. Peningkatan Sumber Daya Manusia.
11. Pengembangan pariwisata.
12. Pengembangan kawasan Ujung Jabung.



Berikut disajikan sandingan isu strategis nasional 2015 dengan isu strategis daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015 pada tabel berikut :

Tabel 1.6

Sandingan Isu Strategis antara RKP Tahun 2015
dengan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2015

NO .	ISU STRATEGIS NASIONAL 2015		ISU STRATEGIS DAERAH (Kabupaten Tanjung Jabung Timur) 2015
	ISU STRATEGIS BERDASARKAN RKP 2015	ISU STRATEGIS BERDASARKAN DIREKTIF PRESIDEN	
1	3	4	5
I	<ul style="list-style-type: none">1 Peningkatan Kualitas RB Nasional dan Perluasan RB Daerah2 Peningkatan Profesionalisme SDM Aparatur3 Penguatan Manajemen dan Partisipasi Masyarakat dalam Pelayanan Publik4 Pemantapan Pelaksanaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah	-	Penataan kelembagaan (restrukturisasi perangkat daerah), peningkatan layanan public dan tata kelola pemerintah yang baik (Good Governance)
II	<ul style="list-style-type: none">1 Peningkatan Akses PAUD yang Berkualitas	-	<ul style="list-style-type: none">- Pengembangan Sumber Daya Manusia.- Pencapaian pembangunan Millenium Development Goals (MDG's) 2015.
	<ul style="list-style-type: none">2 Peningkatan Kualitas Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, termasuk Kurikulum 2013		



NO .	ISU STRATEGIS NASIONAL 2015		ISU STRATEGIS DAERAH (Kabupaten Tanjung Jabung Timur) 2015
	ISU STRATEGIS BERDASARKAN RKP 2015	ISU STRATEGIS BERDASARKAN DIREKTIF PRESIDEN	
1	3	4	5
	3 Peningkatan Akses Pendidikan Menengah Berkualitas dan Selaras dengan Kebutuhan Pembangunan, termasuk rintisan PMU 4 Peningkatan Akses Pendidikan Tinggi Berkualitas dan Selaras dengan Kebutuhan Pembangunan 5 Peningkatan Profesionalisme Pendidik dan Tenaga Kependidikan		
III	1 Penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi 2 Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan KB yang merata 3 Peningkatan Perbaikan Gizi 4 Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan 5 Penyiapan Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan	-	- Pencapaian pembangunan Millenium Development Goals (MDG's) 2015. - Pemenuhan kecukupan air minum



NO	ISU STRATEGIS NASIONAL 2015		ISU STRATEGIS DAERAH (Kabupaten Tanjung Jabung Timur) 2015
	ISU STRATEGIS BERDASARKAN RKP 2015	ISU STRATEGIS BERDASARKAN DIREKTIF PRESIDEN	
1	3	4	5
	6 Peningkatan Efektifitas Pengawasan Obat dan Makanan dalam rangka Peningkatan Keamanan, Mutu dan Manfaat/Khasiat Obat dan Makanan 7 Penambahan akses air minum dan sanitasi yang berkelanjutan bagi masyarakat		
IV	1 Perluasan Program Keluarga Harapan 2 Pengembangan Penghidupan Penduduk Miskin dan Rentan (Transformasi Program Pemberdayaan Masyarakat) (lanjutan direktif Presiden) 3 Peningkatan produktivitas usaha mikro 4 Pelaksanaan BPJS Bidang Kesehatan (demand side)	Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan 1 Master Plan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI); 2 Peningkatan Pelayanan Sanitasi dan Air Bersih dalam rangka pencapaian MDGs; 3 Pembangunan Shelter Bencana.	- Angka kemiskinan yang relatif masih tinggi (Tahun 2011:12,60%). - Pencapaian pembangunan Millenium Development Goals (MDG's) 2015.



NO .	ISU STRATEGIS NASIONAL 2015		ISU STRATEGIS DAERAH (Kabupaten Tanjung Jabung Timur) 2015
	ISU STRATEGIS BERDASARKAN RKP 2015	ISU STRATEGIS BERDASARKAN DIREKTIF PRESIDEN	
1	3	4	5
V	1 Pencapaian surplus beras 10 juta ton dan peningkatan produksi jagung, kedelai dan gula (lanjutan direktif Presiden)	-	<ul style="list-style-type: none"> - Ketahanan dan kerentanan pangan (Food Security and Vulnerability). - Optimalisasi potensi pesisir, pantai dan lautan
	2 Peningkatan produksi perikanan		
	3 Peningkatan Kesejahteraan petani/nelayan		
	4 Rehabilitasi Jaringan Irigasi		
VI	1 Penyediaan infrastruktur dasar untuk menunjang peningkatan kesejahteraan (lanjutan direktif Presiden)	-	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan kawasan Ujung Jabung. - Mengeleminir bottlenecking dan unconnectivity dalam pembangunan dan perkembangan ekonomi dan sosial.
	2 Konektivitas yang menjamin tumbuhnya pusat-pusat perdagangan dan industri (lanjutan direktif Presiden)		
	3 Penyediaan infrastruktur yang mengurangi kesenjangan antarwilayah		
	4 Penyediaan infrastruktur untuk mendukung ketahanan pangan dan energi		
VII	1 Peningkatan kemudahan berusaha	-	Pengembangan komoditi unggulan kelapa dalam.
	2 Penurunan biaya logistik nasional		



NO	ISU STRATEGIS NASIONAL 2015		ISU STRATEGIS DAERAH (Kabupaten Tanjung Jabung Timur) 2015
	ISU STRATEGIS BERDASARKAN RKP 2015	ISU STRATEGIS BERDASARKAN DIREKTIF PRESIDEN	
1	3	4	5
	3 Pengembangan Fasilitas Pendukung KEK yang telah ditetapkan dan Penetapan KEK Baru 4 Memperkuat Kelembagaan Hubungan Industrial		
VIII	1 Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi 2 Peningkatan Rasio Elektrifikasi 3 Diversifikasi Pemanfaatan Energi (Konversi Energi/Gas) (lanjutan direktif Presiden)	-	Pemenuhan Kebutuhan energi
IX	1 Pengukuhan Kawasan Hutan dan Pembangunan KPH	-	
	2 Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis, dan Pengembangan Perhutanan Sosial		Penataan zonasi dan perlindungan lahan pangan berkelanjutan.
	3 Kapasitas Mitigasi Bencana (lanjutan direktif Presiden)		
	4 Pengendalian Kualitas Lingkungan		
X	1 Pembangunan Daerah Tertinggal	-	Mengeleminir



NO	ISU STRATEGIS NASIONAL 2015		ISU STRATEGIS DAERAH (Kabupaten Tanjung Jabung Timur) 2015
	ISU STRATEGIS BERDASARKAN RKP 2015	ISU STRATEGIS BERDASARKAN DIREKTIF PRESIDEN	
1	3	4	5
	2 . Penguatan Diplomasi dan Pembangunan Infrastruktur, hankam, serta fasilitas CIQS (Custom, Immigration, Quarantine, Security) kawasan perbatasan 3 . Percepatan Pembangunan Infrastruktur Di Papua Dan Papua Barat (lanjutan direktif Presiden)		bottlenecking dan unconnectivity dalam pembangunan.
XI	1 . Penguatan Jatidiri Bangsa Dan Pelestarian Budaya 2 . Peningkatan Kemampuan IPTEK dalam Rangka Mendukung Percepatan dan Perluasan Ekonomi Nasional(lanjutan direktif Presiden – teknologi unggulan)	-	Pengembangan pariwisata.
XII	1 . Percepatan pembangunan <i>minimum essential force</i> didukung dengan pemberdayaan industri pertahanan(lanjutan direktif Presiden) Pemantapan keamanan dalam negeri dan pemberantasan 2 .	Pemeliharaan Stabilitas Sosial dan Politik 1 . Percepatan Pemenuhan <i>Minimum Essential Force</i> tahap I; 2 . Peningkatan Personel dan Kapasitas Polri; 3 . Penanganan Ancaman	-



NO	ISU STRATEGIS NASIONAL 2015			ISU STRATEGIS DAERAH (Kabupaten Tanjung Jabung Timur) 2015
	ISU STRATEGIS BERDASARKAN RKP 2015		ISU STRATEGIS BERDASARKAN DIREKTIF PRESIDEN	
1	3		4	5
		terorisme(lanjutan direktif Presiden)	Gangguan Keamanan Dalam Negeri.	
	3	Penyelenggaraan pemilu 2014		
	4	Penegakan hukum dalam rangka membangun <i>integrated criminal justice system (ICJS)</i>		
	5	Penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan ham, serta peningkatan akses terhadap keadilan		
XIII	1	Akselerasi	Pemantapan Perekonomian Nasional	Bottlenecking dan unconnectivity dalam pembangunan dan perkembangan ekonomi dan sosial.
	2	Dengan Sasaran		
		Pertumbuhan	1	
		Industri Non-Migas	2	
		Mendekati 8 Persen	3	
		Peningkatan	4	
		Pemahaman dan	5	
		Kesiapan Indonesia		
		Dalam		
		Menghadapi		
		Masyarakat		
		Ekonomi ASEAN		
		(MEA) 2015		
	3	Peningkatan daya		
		saing koperasi dan		
		UKM		
XIV	1	Peningkatan	-	-
		Kerukunan		
		Beragama		
	2	Peningkatan		
		Kualitas Layanan		
		Haji		



NO .	ISU STRATEGIS NASIONAL 2015		ISU STRATEGIS DAERAH (Kabupaten Tanjung Jabung Timur) 2015
	ISU STRATEGIS BERDASARKAN RKP 2015	ISU STRATEGIS BERDASARKAN DIREKTIF PRESIDEN	
1	3	4	5
	3 Peningkatan Pengelolaan Destinasi, Pemasaran, dan SDM Pariwisata		
	4 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PUG dan Pemberdayaan Perempuan		
	5 Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Berbagai Tindak Kekerasan		
	6 Peningkatan Partisipasi dan Peran Aktif Pemuda dalam Berbagai Bidang Pembangunan		
	7 Peningkatan Budaya dan Prestasi Olahraga di Tingkat Regional dan Internasional		

D. Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

1. Kondisi jalan dan jembatan yang sebagian besar buruk akan mempunyai akibat terhadap perkembangan ekonomi yang pada waktunya akan terjadi kemandekan. Hal ini ditandai tingginya biaya produksi atau logistik, pelayanan publik yang tidak maksimal dan investasi yang stagnan.



2. Angka kemiskinan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan angka tertinggi di Provinsi Jambi (Tahun 2011 : 11,60%).
3. Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih mempunyai kendala dalam pencapaian MDG'S 2015 seperti air minum layak baru mencapai 12,94% pada tahun 2012 dari target MDG's 68,87% pada tahun 2015 dan sanitasi layak baru mencapai 33,60% pada tahun 2011 dari target MDG's 75,29% pada tahun 2015.
4. Ketahanan pangan dan kerentanan pangan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki aspek rawan dan rentan, seperti jumlah penduduk miskin 11,60% ; desa tanpa akses jalan 37,6%%; rumah tangga tanpa listrik 62% dan rumah tangga tanpa air bersih 87,06%.
5. Adanya trend berkurangnya luas lahan tanaman pangan sebesar 4% per tahun perlu menjadi perhatian khusus sehubungan dengan UU Nomor 41 Tahun 2009 dan PP Nomor 1 Tahun 2011.
6. Optimalisasi potensi pesisir, pantai dan lautan perlu dilakukan mengingat sebagian besar penduduk kabupaten ini berprofesi sebagai nelayan, panjang garis pantai yang mencapai 191 Km dan potensi perikanan tangkap (laut) dengan luas areal tangkap seluas 77.752 Ha belum optimal dimanfaatkan.
7. Luas lahan kelapa dalam di kabupaten ini 59.370 Ha (49,94% luas lahan di Provinsi Jambi dan menyumbang 45,58% total produksi provinsi) tetapi produktivitasnya masih rendah 0,88 ton/Ha sedangkan provinsi mempunyai produktivitas 0,95 ton/Ha.
8. Sumber Daya Manusia yang sesuai dengan potensi daerah masih kurang, seperti sektor agri industri dan maritim.
9. Banyak potensi wisata alam, kuliner dan religius masih belum maksimal dikembangkan.

Ujung Jabung yang mempunyai lokasi strategis tidak hanya untuk Kabupaten Tanjung Jabung Timur tetapi Provinsi Jambi bahkan nasional, perlu bersama-sama dikembangkan menjadi kawasan strategis sesuai dengan Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).



E. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015 adalah untuk memberikan gambaran, tentang pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, sedangkan tujuannya mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Aspek akuntabilitas kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, sebagai sarana pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur atas capaian kinerja yang diperoleh selama tahun 2015.
2. Aspek manajemen kinerja bagi keperluan internal organisasi, sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk upaya-upaya perbaikan kinerja dimasa datang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, manajemen Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat merumuskan strategi pemecahan masalah, sehingga capaian kerjanya dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

F. LANDASAN PENYUSUNAN

1. Idiil : Pancasila;
2. Konstitusional : UUD 1945
3. Operasional :
 - a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembar Negara Republik



- Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- g. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - h. Peraturan Menteri Negara Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - i. Peraturan Daerah Nomor 01,02,03,04 Tahun 2008 dan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
 - j. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2011-2016.
 - k. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015.

G. SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA INSTANSI TAHUN 2015

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pemerintah (LKJIP) Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama tahun 2015. Capaian kinerja (*performance results*) tahun 2015 tersebut, diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (*performance plan*) tahun 2015 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini, akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2015 dapat diilustrasikan dalam bagan berikut ini :

Ikhtisar eksekutif, menjelaskan secara ringkas tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana tujuan dan sasaran tercapai, kendala-kendala yang dihadapi dan langkah-langkah untuk mengatasi kendala tersebut.



Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas kondisi umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, kelambagaan, issue strategis dan permasalahan pembangunan, maksud dan tujuan penyusunan LKJIP, landasan penyusunan serta sistematika penyusunan.

Bab II – Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, menjelaskan gambaran singkat mengenai Rencana Strategis atau RPJMD Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk periode 2011-2016, Rencana Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2015, dan Penetapan Kinerja Tahun 2015. Pada awal Bab ini disajikan gambaran secara singkat tentang rencana strategis, visi-misi dan kebijakan umum serta rencana kinerja tahun 2015.

Bab III – Akuntabilitas Kinerja, disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja tahun 2015 termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Selain itu dilaporkan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan alokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas-tugas lainnya, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja secara efisiensi.

Bab IV – Penutup, menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2015 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

Bab ini menjelaskan gambaran singkat mengenai Rencana Strategis atau RPJMD Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk periode 2011-2016 dan Rencana Kinerja 2015. Pada awal Bab ini disajikan gambaran secara singkat tentang rencana strategis, visi-misi dan kebijakan umum serta rencana kinerja tahun 2015.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008



tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2006-2011 yang selanjutnya disingkat RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2011 tanggal 5 Desember 2011 merupakan dokumen perencanaan untuk periode lima tahun, terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 yang menjabarkan visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati hasil pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara langsung pada tahun 2011. Disamping itu RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), serta berfungsi sebagai alat kendali dan tolak ukur bagi manajemen Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam penyelenggaraan pembangunan selama 5 tahun dan tahunan.

RPJMD merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dan memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu memenuhi keinginan *stakeholders* dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik nasional maupun global. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (*strenghts*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan tantangan/kendala (*threats*) yang ada. Analisis terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting karena merupakan sarana bagi perwujudan visi dan misi serta strategi instansi pemerintah.

Dengan perkataan lain, RPJMD yang disusun setidaknya mengandung visi, misi, program, dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi dan



mengarahkan anggota organisasi dalam mengambil keputusan tentang masa depannya, membangun operasi dan prosedur untuk mencapainya, dan menentukan ukuran keberhasilan/kegagalannya. Dengan visi, misi, dan strategi yang jelas dan tepat, maka diharapkan instansi pemerintah akan dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi. RPJMD merupakan tolok ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam melakukan pengukuran, penilaian, evaluasi kinerja, dan pelaporan akuntabilitas kinerja.

RPJM setidaknya digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan : (1) dimana kita berada sekarang, (2) ke mana kita akan menuju, dan (3) bagaimana kita menuju ke sana. Dengan melakukan analisis internal dan eksternal, para perencana strategis mendefinisikan misi organisasi untuk menggambarkan posisi organisasi saat ini. Kemudian, visi dirumuskan untuk menjabarkan kemana organisasi akan dibawa. Penjabaran dari visi dan misi dituangkan dalam bentuk program-program pembangunan, yang merupakan kondisi spesifik yang ingin dicapai oleh organisasi di dalam memenuhi visi misinya. Pertanyaan 'bagaimana kita menuju ke sana' dijawab dengan merumuskan kebijakan umum dan strategi pembangunan, serta menetapkan program dan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh organisasi.

RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, serta cara pencapaian tujuan dan sasaran tersebut akan diuraikan di bawah ini.

A. VISI DAN MISI

Visi merupakan hasil refleksi dan proyeksi tentang arah yang hendak dituju atas keadaan yang diinginkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam menjalankan amanat publik. Rumusan visi mencerminkan kebutuhan yang fundamental dan sekaligus merefleksikan dinamika pembangunan dari berbagai aspek.

Dalam konteks tersebut, Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah menetapkan visi sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016 dengan rumusan :



MENUJU TANJUNG JABUNG TIMUR SEJAHTERA, ADIL, MANDIRI, UNGGUL, DEMOKRATIS DAN AGAMIS (SAMUDRA)

- Sejahtera** : mengandung makna bahwa kondisi semua lapisan masyarakat secara menyeluruh dapat terpenuhi hak-hak dasarnya, baik dibidang sosial, ekonomi dan budaya, terutama pangan sandang dan pangan secara merata.
- Adil** : mengartikan perwujudan pembangunan yang adil dan merata, tanpa diskriminasi, baik antar individu maupun antar wilayah, sehingga hasil dari pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat
- Mandiri** : bahwa penyelenggaraan pembangunan dan kehidupan bermasyarakat diarahkan untuk mengedepankan profesionalisme, pelayanan publik oleh aparatur pemerintah daerah dilakukan secara efektif dan efisien serta menjunjung tinggi asas keahlian, keterampilan dan tata pemerintahan yang baik.
- Unggul** : bahwa tatanan masyarakat yang profesional, kreatif dan inovatif dalam berbagai sektor kehidupan. Produktivitas baik pemerintah dalam layanannya kepada masyarakat, hasil usaha masyarakat tani, nelayan, dan industri kecil dan menengah yang mampu dikelola dengan standar global, adanya kepastian hukum dan iklim usaha yang kondusif bagi investasi yang memiliki nilai kompetitif atau berdaya saing secara lokal, nasional, regional dan internasional.
- Demokratis** : bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta kehidupan bermasyarakat dilandasi dengan kebebasan berserikat, berkumpul, berpendapat sesuai dengan tatanan dalam negara hukum.
- Agamis** : bahwa kehidupan bermasyarakat berlangsung dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama yang taat, didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.



Guna mengoperasionalkan visi sebagaimana dirumuskan di atas, maka ditetapkan 9 (sembilan) misi Pembangunan Kabupaten Tanjung jabung Timur Tahun 2011 – 2016, sebagai berikut :

1. Mempercepat ketersediaan infrastruktur umum secara merata dan berkeadilan.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dengan mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul terampil dan siap pakai (pendidikan gratis berkualitas).
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dengan penempatan sumber daya manusia yang profesional.
4. Meningkatkan pengembangan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan produktivitas pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan, perdagangan, pariwisata dan sektor jasa lainnya.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat (berobat gratis dan berkualitas).
6. Memfasilitasi percepatan penyelesaian sengketa lahan masyarakat
7. Menata zonasi dan perlindungan terhadap kawasan konservasi, peninggalan budaya situs dan pengembangan budaya tradisional.
8. Mewujudkan kehidupan beragama, sosial dan budaya yang dinamis serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berdemokrasi.
9. Meningkatkan sarana dan prasarana olah raga dan pembinaan atlit untuk berprestasi.

B. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

1. Tujuan Pembangunan Daerah

Berdasarkan rumusan visi misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2011-2016, maka ditetapkan 9 (sembilan) tujuan pembangunan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun :



- 1) Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang merata dan menyentuh terhadap akses dan sentra perekonomian masyarakat hingga wilayah terpencil.
- 2) Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berbasis kompetensi.
- 3) Mewujudkan kualitas pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan partisipatif.
- 4) Mewujudkan roda perekonomian masyarakat dan struktur ekonomi yang kokoh yang berbasis pada ekonomi kerakyatan dan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi
- 5) Mewujudkan masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang sehat, produktif dan berdaya saing.
- 6) Menyelesaikan permasalahan sengketa lahan dengan prinsip saling menguntungkan antar pihak yang bersengketa dilandasi semangat kekeluargaan dan persaudaraan.
- 7) Mewujudkan penataan zona dan melestarikan kawasan perlindungan situs budaya tradisional sebagai pusat penelitian budaya, wisata budaya dan warisan budaya.
- 8) Terciptanya keselarasan, kedamaian, ketentraman dan jalinan persaudaraan antar umat beragama, antar suku, antar golongan masyarakat.
- 9) Tersedianya sarana dan prasarana olah raga dan pembinaan atlit untuk berprestasi sebagai media menjalin persaudaraan, persatuan dan kesatuan.

2. Sasaran Pembangunan Daerah

Dalam mewujudkan tujuan pembangunan, Kabupaten Tanjung Jabung Timur menetapkan sasaran-sasaran pokok pembangunan berdasarkan pada kebutuhan untuk dilaksanakan yakni:

- 1) Penuntasan perbaikan dan pembangunan jalan mulai dari jalan desa, desa ke kecamatan, dari kecamatan ke kabupaten dan ke Propinsi.



- 2) Terwujudnya perluasan jangkauan jaringan aliran listrik dan air bersih dengan mengoptimalkan anggaran daerah secara merata dan berkeadilan di setiap desa.
- 3) Penyelesaian pembangunan tanggul terutama di kawasan pertanian masyarakat.
- 4) Percepatan penyelesaian pembangunan jembatan untuk kepentingan mobilitas perekonomian masyarakat dan sebagai pintu gerbang perekonomian Provinsi Jambi yang menghubungkan Delta Berbak (Muara Sabak Barat – Muara Sabak Timur - Rantau Rasau - Berbak - Nipah Panjang - Sadu).
- 5) Adanya dukungan pembangunan jaringan telekomunikasi dan listrik
- 6) Menunjang pengembangan Kawasan Ujung Jabung sebagai Kawasan Ekonomi Strategis Provinsi Jambi.
- 7) Penyediaan dan peningkatan kualitas perumahan bagi seluruh masyarakat terutama masyarakat tidak mampu.
- 8) Peningkatan kualitas pendidikan (Perda Pendidikan Gratis Berkualitas, fasilitas pendidikan, kesejahteraan tenaga pendidik).
- 9) Tenaga Kerja yang terampil dan siap bekerja.
- 10) Penataan organisasi pemerintahan daerah yang efektif dan efisien untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan.
- 11) Penataan dan implementasi sistem pengelolaan keuangan dan anggaran yang transparan berbasis e-budget dan e-audit.
- 12) Penataan wilayah Kecamatan dan desa/kelurahan.
- 13) Penyiapan sistem perekrutan CPNS yang bebas KKN dan memberikan perhatian khusus untuk putra-putri Tanjung Jabung Timur.
- 14) Peningkatan kesejahteraan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- 15) Peningkatan insentif untuk pegawai SARA (Imam, Balai, Khatib dan Guru Ngaji).
- 16) Sistem pelayanan publik terpadu yang bebas KKN.
- 17) Iklim investasi yang sehat dengan reformasi kelembagaan ekonomi di berbagai tingkatan pemerintahan yang mampu mengurangi praktik ekonomi tinggi.



- 18) Stabilitas makro ekonomi dengan tetap mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas serta peningkatan kemampuan pendanaan pembangunan.
- 19) Membentuk BUMD yang dapat memberikan sumbangan kepada Pendapatan Asli Daerah.
- 20) Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pedesaan yang ditandai dengan berkurangnya jumlah penduduk miskin serta meningkatnya tingkat kesejahteraan dan akses kebutuhan dasar masyarakat.
- 21) Perbaikan iklim ketenagakerjaan dengan upaya menurunkan tingkat pengangguran.
- 22) Pengembangan potensi wisata dan kawasan desa wisata melalui promosi.
- 23) Peningkatan produksi pertanian (pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan dan kehutanan) dan terwujudnya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani dan keluarga.
- 24) Pengelolaan sumber daya alam migas dan bahan tambang yang memberi manfaat ekonomi untuk pendapatan daerah dan masyarakat sekitar dengan dampak lingkungan yang minimal.
- 25) Peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah dan berkurangnya kesenjangan pembangunan antar wilayah.
- 26) Pelayanan berobat gratis masyarakat yang lebih sederhana dan mudah dijangkau.
- 27) Ketersediaan peralatan medis, obat-obatan, tenaga medis, dokter umum dan dokter spesialis dengan jumlah yang memadai untuk Rumah Sakit Umum dan Puskesmas rawat inap.
- 28) Ketersediaan peralatan, obat-obatan dengan jumlah yang memadai untuk Puskesmas dan satelitnya.
- 29) Pelayanan dan Perlindungan kesehatan keluarga, ibu dan anak.
- 30) Kepemilikan lahan-lahan yang mengalami sengketa terutama sengketa lahan antara masyarakat dengan perusahaan.
- 31) Melindungi fasilitas umum dan asset negara yang diakibatkan adanya sengketa lahan yang terjadi.



- 32) Kesadaran para stakeholder tentang pentingnya pelestarian alam dan lingkungan hidup khususnya kawasan konservasi dan kawasan perlindungan.
- 33) Adanya peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan pemerintah daerah yang berkenaan dengan lingkungan hidup.
- 34) Adanya penghargaan kepada inisiator yang menjaga lingkungan hidup dan menerapkan sanksi secara konsisten terhadap perusak lingkungan hidup.
- 35) Perlindungan dan kepedulian kepada masyarakat yang mengalami musibah atau bencana alam.
- 36) Dukungan terhadap kehidupan beragama sampai ditingkat terbawah.
- 37) Pelestarian kesenian daerah yang berasal dari setiap suku.
- 38) Fasilitasi organisasi kemasyarakatan, kepemudaan, kemahasiswaan dan kelompok masyarakat lainnya dalam melaksanakan kegiatan sosial.
- 39) Peningkatan kesadaran masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara tertib dan demokratis.
- 40) Kualitas pelayanan, rehabilitasi, bantuan sosial, dan jaminan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).
- 41) Ketersediaan fasilitas olah raga di setiap kecamatan.
- 42) Penyiapan atlet berprestasi sejak dini, berkala dan berkelanjutan.
- 43) Penghargaan bagi atlet daerah yang berprestasi dan mengharumkan nama daerah.
- 44) Pengembangan dan pendidikan pemuda/pemudi Tanjabtim untuk menjadi Qori dan Qori'ah tingkat provinsi dan tingkat nasional.

C. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAERAH

1. Strategi

Dalam mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Tanjung Jabung Timur maka perlu dirumuskan strategi pembangunan. Dalam merumuskan strategi pembangunan harus memenuhi kriteria yang mencakup hubungan rasional antara Visi dan Misi dengan prioritas program kepala daerah terpilih.



Kemudian memperlihatkan hubungan yang kuat dengan analisis daerah dan isu-isu strategis, pernyataan yang umum guna memandu pengembangan program pembangunan tahunan selama lima tahun dan kemudian dikembangkan dalam suatu pemetaan strategi daerah. Strategi diperlukan untuk memperjelas arah pengembangan program prioritas kepala daerah.

Untuk itu ditetapkan strategi pembangunan Tanjung Jabung Timur lima tahun ke depan adalah sebagai berikut :

Misi I : Mempercepat ketersediaan infrastruktur umum secara merata dan Berkeadilan.

- 1) Pengembangan sarana-prasarana diorientasikan sesuai strategi pengembangan ekonomi wilayah serta menjamin kesejahteraan masyarakat umum.
- 2) Aksesibilitas ke dan dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur harus terus dijamin dan ditingkatkan, tidak saja ke pusat ibukota Provinsi, tapi ke beberapa pusat perekonomian dan administrasi di wilayah yang lain.
- 3) Menekankan konsep agri bahari dalam pembangunan pedesaan.
- 4) Penyediaan dan peningkatan kualitas infrastruktur pertanian dan perikanan.
- 5) Menyediakan dan meningkatkan cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi dan listrik.
- 6) Pemenuhan kebutuhan air bersih yang merata.
- 7) Menyediakan jaringan irigasi untuk meningkatkan produktivitas lahan pertanian terutama tanaman pangan.
- 8) Percepatan pembangunan jembatan yang menghubungkan Delta Berbak hingga Kawasan Ujung Jabung melalui *conccurent strategy* antara pemerintah pusat - provinsi – kabupaten.
- 9) Menyediakan dan meningkatkan cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi bagi seluruh lapisan masyarakat.
- 10) Memfasilitasi penyiapan lokasi sebagai kawasan ekonomi strategis.
- 11) Penyiapan infrastruktur pendukung kawasan ekonomi strategis.



- 12) Menciptakan kualitas dan kuantitas kebutuhan umum perumahan dan pemukiman.

Misi II : Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dengan mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul terampil dan siap pakai (pendidikan gratis berkualitas).

- 1) Peningkatan penataan sistem pelayanan pendidikan untuk mencapai kualitas lulusan yang mampu bersaing di tingkat regional dan nasional.
- 2) Menyiapkan SDM yang terampil yang siap bekerja, untuk itu Balai Latihan Kerja (BLK) akan dilengkapi dengan sarana fasilitas pelatihan yang modern dan memadai.

Misi III : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dengan penempatan sumberdaya manusia yang profesional.

- 1) Restrukturisasi organisasi yang berorientasi pada pencapaian visi - misi daerah.
- 2) Implementasi sistem pengelolaan keuangan dan anggaran yang transparan berbasis *e-budget* dan *e-audit*.
- 3) Penataan kecamatan dan desa/kelurahan berdasarkan potensi dan kemampuan
- 4) Peningkatan pelayanan terpadu kecamatan.
- 5) Penerimaan CPNS berdasarkan kompetensi dan kebutuhan daerah.
- 6) Melakukan evaluasi kebutuhan berdasarkan beban kerja untuk mengetahui formasi CPNS setiap tahun.
- 7) Pelaksanaan rekrutmen CPNS yang didasarkan pada kebutuhan beban kerja dan bebas KKN.
- 8) Peningkatan Tunjangan Kesejahteraan Daerah (TKD) untuk meningkatkan kinerja pegawai daerah, insentif guru PNS dan Non PNS, Honorer Daerah dan pejabat pemerintahan sampai ke tingkat RT.
- 9) Peningkatan insentif untuk guru PNS dan Non PNS daerah terpencil.
- 10) Pemberian insentif untuk pegawai SARA sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- 11) Pemberian penghargaan kepada pegawai SARA teladan.



- 12) Pembentukan Perda tentang pelayanan publik.
- 13) Penguatan lembaga pelayanan terpadu satu pintu/Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT).
- 14) Membangun sistem komputerisasi e-KTP.
- 15) Pengembangan pelayanan publik berbasis teknologi informasi.
- 16) Peningkatan pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Misi IV : Meningkatkan pengembangan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan produktivitas pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan, perdagangan, pariwisata dan sektor jasa lainnya.

- 1) Menciptakan kondusifitas iklim investasi dan pendapatan daerah serta ekonomi daerah yang lebih baik.
- 2) Tercapainya kondisi makro ekonomi yang stabil dengan peningkatan sektor ekonomi secara merata.
- 3) Operasionalisasi dan permodalan BUMD dengan mitra strategis.
- 4) Menciptakan Pemenuhan Kecukupan pangan daerah.
- 5) Meningkatnya produktivitas usaha kecil dan menengah dengan laju pertumbuhan lebih tinggi dari laju pertumbuhan produktivitas.
- 6) Terselenggaranya upaya-upaya untuk penurunan tingkat pengangguran.
- 7) Menjadikan kepariwisataan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah.
- 8) Menjadikan sektor pertanian tanaman pangan, perkebunan dan perikanan sebagai motor penggerak aktivitas ekonomi masyarakat.
- 9) Peningkatan produktivitas usaha pertanian tanaman pangan, perkebunan dan perikanan, penerapan teknologi tepat guna.
- 10) Peningkatan efisiensi, daya saing modernisasi serta nilai tambah komoditi tanaman pangan terutama padi, perkebunan dan kelautan.
- 11) Peningkatan dan perluasan produksi, pengembangan dan penerapan teknologi budidaya ikan di daerah pantai, tambak dan air tawar serta usaha penangkapan ikan di daerah lepas pantai.
- 12) Pembangunan sektor Migas dan Bahan Tambang dilakukan dengan memperhatikan kemampuan daya dukung lingkungan dan meminimalkan dampak buruk terhadap lingkungan.



- 13) Pengelolaan migas dan bahan tambang dilakukan dengan melibatkan masyarakat
- 14) Pengelolaan migas dan bahan tambang dilakukan dengan memperhatikan dan memperhitungkan kerusakan lingkungan dan fasilitas umum seperti infrastruktur sebagai bagian dari biaya produksi pengelolaan.
- 15) Pengelolaan lingkungan dilakukan secara bijaksana untuk meminimalkan dampak lingkungan dan bencana alam.
- 16) Menciptakan pusat pertumbuhan wilayah yang berdaya saing.

Misi V : Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat (berobat gratis dan berkualitas).

- 1) Menyediakan dan meningkatkan jumlah dan kualitas infrastruktur kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan.
- 2) Menyediakan dan meningkatkan jumlah dan kualitas tenaga kesehatan untuk memenuhi kebutuhan pelayan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat.
- 3) Meningkatkan distribusi tenaga kesehatan terutama untuk perdesaan dan wilayah terpencil.
- 4) Pendayagunaan sumberdaya yang ada baik berupa fasilitas infrastruktur kesehatan, perbekalan kesehatan dan tenaga kesehatan yang efektif.
- 5) Pemberian pelayanan yang maksimal bagi keluarga untuk menjadi Keluarga andalan.
- 6) Pendampingan dan Perlindungan Bagi Perempuan dan Anak.

Misi VI : Memfasilitasi percepatan penyelesaian sengketa lahan masyarakat.

- 1) Pemetaan sengketa lahan yang melibatkan pengusaha dan masyarakat.
- 2) Fasilitasi penyelesaian sengketa lahan secara musyawarah dan damai.

Misi VII : Menata zonasi dan perlindungan terhadap kawasan konservasi, peninggalan budaya situs dan pengembangan budaya tradisional.



- 1) Penyampaian informasi dan pemberian pemahaman para pihak tentang pentingnya perlindungan dan pelestarian kawasan konservasi, peninggalan situs budaya dan pengembangan budaya tradisional.
- 2) Fasilitasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kebijakan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup.
- 3) Memotivasi masyarakat untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- 4) Menindak setiap pelaku yang merusak daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Misi VIII : Mewujudkan kehidupan beragama, sosial dan budaya yang dinamis serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berdemokrasi.

- 1) Penyiapan bantuan sosial bagi masyarakat yang mengalami musibah atau bencana alam pada kondisi tanggap darurat dan pasca bencana.
- 2) Adanya sosialisasi dan pembinaan kerukunan beragama secara berkelanjutan sampai ke tingkat RT.
- 3) Peningkatan dan pembinaan generasi muda bidang keagamaan.
- 4) Pelestarian kesenian daerah yang berasal dari setiap suku budaya yang ada di daerah.
- 5) Adanya fasilitasi organisasi kemasyarakatan, kepemudaan, kemahasiswaan dan kelompok masyarakat lainnya dalam melaksanakan kegiatan sosial.
- 6) Peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang penyampaian aspirasi secara demokratis.
- 7) Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan sosial dasar melalui institusi dan lembaga sosial secara transparan.

Misi IX : Meningkatkan sarana dan prasarana olah raga dan pembinaan atlet untuk berprestasi.

- 1) Meningkatnya ketersediaan fasilitas olah raga di setiap kecamatan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- 2) Adanya pembinaan atlet sejak dini, berkala dan berkelanjutan.
- 3) Pemberian penghargaan bagi atlet daerah yang berprestasi.



- 4) Memfasilitasi pengembangan dan pendidikan pemuda/l Tanjabtim untuk menjadi Qori dan Qori'ah berprestasi di tingkat provinsi dan tingkat nasional.

2. Arah Kebijakan Daerah

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sesuai dengan visi dan misi Bupati terpilih adalah menitik beratkan pada upaya meningkatkan pengembangan usaha ekonomi kerakyatan melalui peningkatan produktivitas pertanian, perkebunan, perikanan, dan kelautan perdagangan, pariwisata dan sektor jasa lainnya. Dalam rangka percepatan pencapaiannya maka diperlukan adanya strategi daerah seperti yang disampaikan di atas, yang kemudian akan menjadi arah kebijakan pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan. Arah Kebijakan pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan derivasi dari arah kebijakan pembangunan Provinsi Jambi dengan mempertimbangkan potensi sumberdaya dan kearifan lokal masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Misi I : Mempercepat ketersediaan infrastruktur umum secara merata dan Berkeadilan.

- 1) Meningkatkan akses antara pusat-pusat permukiman dengan pusat perekonomian dan produksi serta meningkatkan akses ke desa/wilayah potensial dan sentra produksi.
- 2) Pengembangan sistem prasarana transportasi terpadu, prasarana transportasi yang akan dikembangkan untuk mendukung peningkatan pertumbuhan kecamatan dan desa-desa.
- 3) Meningkatkan akses ke desa/wilayah potensial dan sentra produksi yang masih terisolir dan meningkatkan akses ke pasar.
- 4) Tersedianya infrastruktur pedesaan melalui pendekatan kewilayahan dalam rangka percepatan pembangunan desa tertinggal.
- 5) Pengembangan prasarana transportasi yang akan mendukung pemerataan pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang ditunjang dengan sistem prasarana transportasi darat dan sungai.



- 6) Meningkatkan kelancaran pelayanan angkutan jalan secara terpadu: penataan sistem jaringan dan terminal, manajemen lalu lintas, fasilitas dan rambu jalan, penegakan hukum dan disiplin di jalan.
- 7) Pengembangan transportasi air (laut dan sungai) dengan memfokuskan pada pengembangan kapasitas pelabuhan serta pemeliharaan alur sungai.
- 8) Pengembangan infrastruktur pertanian seperti jaringan irigasi, pergudangan dan pengolahan hasil pertanian.
- 9) Pengembangan infrastruktur perikanan seperti fasilitas pelelangan ikan, pengolahan hasil perikanan dan pergudangan.
- 10) Pengembangan energi menciptakan alternatif dari potensi setempat dan mengoptimalkan penggunaan energi terbarukan.
- 11) Pemenuhan kebutuhan tenaga listrik untuk menjamin ketersediaan pasokan tenaga listrik serta kehandalannya terutama di daerah krisis listrik serta daerah terpencil dan perdesaan.
- 12) Pengelolaan sumberdaya air dilaksanakan dengan memperhatikan keserasian antara konservasi dan pendayagunaan.
- 13) Pendayagunaan sumberdaya air sebagai pemenuhan kebutuhan pokok rumah tangga.
- 14) Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur irigasi dengan menggunakan alat berat.
- 15) Membangun komunikasi dua arah antara pemerintah pusat dan provinsi dengan *inter-governmental networking policy*.
- 16) Menyempurnakan dan menyederhanakan pemberian izin usaha melalui sistem satu pintu.
- 17) Memfasilitasi investor dalam kemudahan berusaha dan pembebasan lahan.
- 18) Menyusun master plan pendukung pengembangan Kawasan Ujung Jabung yang terintegrasi meliputi infrastruktur jalan dan jembatan menuju kawasan.
- 19) Pengembangan wilayah pertumbuhan.
- 20) Pemenuhan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman melalui bedah rumah.



- 21) Meningkatkan kualitas pelayanan prasarana dan sarana lingkungan pada kawasan kumuh perkotaan, desa dan pesisir.
- 22) Meningkatkan penyediaan prasarana dan sarana dasar bagi kawasan rumah sederhana dan rumah sederhana sehat.
- 23) Meningkatkan pola kemitraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam investasi dan pengelolaan bersama terhadap penyediaan air bersih dan sanitasi bagi masyarakat.

Misi II : Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dengan mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul terampil dan siap pakai (pendidikan gratis berkualitas).

- 1) Meningkatkan kualitas pendidikan gratis untuk tingkat SD/Sederajat, SMP/Sederajat dan SMU/ sederajat.
- 2) Meningkatkan pengaturan dalam bentuk perda tentang Sistem Pelayanan Pendidikan gratis bagi SD/Sederajat, SMP/Sederajat dan SMU/ sederajat.
- 3) Meningkatkan kualitas lulusan dengan cara pemberian beasiswa untuk siswa SMU/ sederajat yang berprestasi namun tidak mampu secara ekonomi.
- 4) Pendirian perguruan tinggi bidang ilmu yang relevan dengan potensi di Tanjung Jabung Timur.
- 5) Menyiapkan tenaga profesional yang berasal dari Tanjabtim untuk pendidikan Diploma III Perikanan dan Diploma lainnya.
- 6) Pemberian beasiswa berkelanjutan untuk keluarga tidak mampu namun berprestasi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang Strata 1, Strata 2 dan Strata 3.
- 7) Memberikan akses yang lebih besar kepada kelompok masyarakat miskin, daerah terpencil/ konflik, penyandang cacat untuk mengikuti pendidikan.
- 8) Peningkatan kualitas fasilitas pelatihan modern dan instruktur yang berkualitas di BLK.
- 9) Memberikan akses yang lebih besar kepada kelompok masyarakat penyandang cacat untuk mengikuti kursus di BLK.



Misi III : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dengan penempatan sumberdaya manusia yang profesional.

- 1) Melakukan evaluasi struktur organisasi sesuai dengan kebutuhan dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku.
- 2) Penyempurnaan secara terus menerus implementasi *e-budget* dan *e-audit*.
- 3) Peningkatan kompetensi pengelola keuangan dan anggaran berbasis *e-budget* dan *e-audit*.
- 4) Penataan kecamatan dan desa/kelurahan berdasarkan wilayah sangat terpencil, terpencil dan tidak terpencil.
- 5) Menetapkan kecamatan berbasis pelayanan terpadu melalui peraturan kepala daerah.
- 6) Penerimaan CPNS dengan memprioritaskan calon yang berasal dan berdomisili di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- 7) Formasi CPNS sesuai dengan beban kerja setiap SKPD.
- 8) Sistem recruitment CPNS yang bebas KKN.
- 9) TKD diberikan sesuai dengan beban kerja dan prestasi kerja serta lokasi tempat tugas (sangat terpencil - terpencil - tidak terpencil).
- 10) Insentif Guru ditingkatkan sesuai dengan kemampuan daerah.
- 11) Pemberian insentif bagi pegawai SARA di setiap desa/kelurahan.
- 12) Pemberian penghargaan bagi pegawai SARA teladan di setiap desa/kelurahan.
- 13) Perda pelayanan publik mampu meningkatkan kepastian hukum dan pendapatan asli daerah.
- 14) KPPT berfungsi sebagai lembaga terpadu pelayanan publik.
- 15) Peningkatan pendapatan asli daerah melalui pelayanan terpadu.
- 16) Sistem komputerisasi KTP terbangun di Kabupaten.
- 17) Pengembangan *e-Government*.
- 18) Pelayanan publik bebas dari KKN.



Misi IV : Meningkatkan pengembangan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan produktivitas pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan, perdagangan, pariwisata dan sektor jasa lainnya.

- 1) Penyederhanaan prosedur, perijinan yang menghambat kelancaran arus barang dan pengembangan kegiatan jasa perdagangan dan pasar domestik.
- 2) Mengintegrasikan pengembangan usaha sesuai dengan karakteristik daerah dan pengusaha serta potensi usaha di setiap daerah lingkup Kabupaten Tanjab Timur.
- 3) Menjaga pelaksanaan kebijakan fiskal yang mengarah pada kesinambungan fiskal (*fiscal sustainability*) dengan tetap memberi ruang gerak bagi peningkatan kegiatan ekonomi.
- 4) Menjaga stabilitas perekonomian daerah yang didasari oleh capaian indikator ekonomi.
- 5) Menciptakan inovasi baru dalam rangka memperkuat struktur perekonomian daerah dengan berbasis pada agro industri dan agribisnis dengan mengedepankan IPTEK.
- 6) Memantapkan penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), (transparansi, akuntabilitas, keadilan dan responsibilitas) dalam pengelolaan BUMD.
- 7) Penguatan LKMP melalui bantuan kredit modal kerja.
- 8) Penyempurnaan sistem penyediaan dan distribusi pangan secara merata dengan harga terjangkau.
- 9) Peningkatan kemampuan petani dan penguatan lembaga pendukungnya, pengamanan ketahanan pangan, peningkatan produktivitas, produksi dan daya saing produk pertanian dan perikanan serta pemanfaatan hutan untuk diversifikasi usaha dan mendukung produksi pangan.
- 10) Peningkatan kapasitas kelembagaan pendukung ketahanan pangan berbasis masyarakat.
- 11) Peningkatan sistem kewaspadaan dini gizi dan pangan.
- 12) Meningkatkan perpaduan antara tenaga kerja terdidik dan terampil dengan adopsi penerapan teknologi.



- 13) Mengembangkan UKM dengan pendekatan klaster pada sektor agribisnis dan agroindustri yang didukung adanya pemberian kemudahan dalam pengelolaan usaha, sebagai wadah organisasi kepentingan usaha bersama untuk memperoleh efisiensi kolektif.
- 14) Mengembangkan UKM untuk makin berperan dalam proses industrialisasi, perkuatan keterkaitan industri, percepatan pengalihan teknologi, dan peningkatan kualitas SDM.
- 15) Meningkatkan sistem dan strategi dalam menumbuhkan wirausaha baru berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 16) Mendorong perkuatan struktur industri pada sub-sektor yang memiliki potensi keuntungan kompetitif.
- 17) Memperluas akses masyarakat, terhadap sumberdaya produktif untuk pengembangan usaha.
- 18) Pengembangan Koperasi yang handal.
- 19) Meningkatkan promosi dan pemasaran produk-produk pertanian di perdesaan melalui peningkatan kualitas dan kontinuitas suplai berbasis sumber daya lokal.
- 20) Menciptakan kesempatan kerja melalui investasi.
- 21) Menciptakan fleksibilitas pasar kerja dengan memperbaiki aturan main ketenagakerjaan yang berkaitan dengan rekrutmen, out-sourcing, pengupahan, PHK serta jaminan keselamatan kerja.
- 22) Meningkatkan kualitas SDM ketenagakerjaan melalui pembekalan teknis dan peningkatan wawasan kerja.
- 23) Meningkatkan efektivitas kelembagaan promosi pariwisata, baik di dalam maupun di luar negeri.
- 24) Optimalisasi dan sinkronisasi dalam pengelolaan jasa pelayanan pariwisata, terutama yang melibatkan lebih dari satu moda transportasi.
- 25) Peningkatan, pengembangan dan pelestarian objek wisata daerah dengan peran serta pelaku usaha dan masyarakat.
- 26) Pembangunan pertanian diarah pada pemanfaatan lahan berdasarkan potensi agronomis sehingga menjamin produktivitas lahan dan kepentingan strategis.



- 27) Pengendalian alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan terutama pada ke fungsi penggunaan lain terutama pada kawasan yang secara agronomis sesuai untuk pengembangan komoditi pertanian tanaman pangan.
- 28) Memberikan bantuan fasilitas dan peralatan produksi pertanian, permodalan, subsidi, kompensasi dan regulasi yang memihak petani tanaman pangan.
- 29) Penyempurnaan sistem penyediaan dan distribusi pangan secara merata dengan harga terjangkau.
- 30) Penguatan kemampuan teknis budidaya pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, peningkatan kemampuan manajerial dan penguatan daya saing serta posisi tawar petani.
- 31) Penguatan kelembagaan ekonomi dan sosial petani, peternak dan nelayan dilakukan melalui peningkatan kemampuan berorganisasi secara partisipatif. Penguatan kelembagaan ekonomi.
- 32) Peningkatan nilai tambah produk pertanian, perkebunan peternakan dan perikanan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.
- 33) Peningkatan produksi perikanan dilakukan dengan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam penangkapan ikan laut.
- 34) Peningkatan produksi perikanan melalui penerapan teknologi tepat guna dalam budidaya perikanan darat.
- 35) Peningkatan sarana dan prasarana nelayan melalui pemberian bantuan pompong dan perlengkapan alat tangkap.
- 36) Pengelolaan migas dan bahan tambang harus diarahkan untuk memanfaatkan sumber daya alam secara lestari secara ekonomi, sosial dan ekologi.
- 37) Pembangunan dan pengelolaan migas dan bahan tambang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama yang berada disekitar kawasan pengelolaan.
- 38) Membuat kebijakan yang mengatur pengelolaan sumber daya alam dengan memperhitungkan dampak-dampak terhadap lingkungan baik secara langsung maupun tidak langsung.



- 39) Membangun kesadaran semua pengelola sumberdaya alam migas dan bahan tambang akan dampak yang bisa timbul dari kegiatan eksploitasi dan transportasi hasil pengelolaan.
- 40) Meningkatkan kapasitas lembaga pengelola lingkungan hidup, terutama dalam menangani permasalahan yang bersifat akumulasi, fenomena alam yang bersifat musiman dan bencana.
- 41) Membangun kesadaran masyarakat agar peduli pada isu lingkungan hidup dan berperan aktif sebagai kontrol sosial dalam memantau kualitas lingkungan hidup.
- 42) Mengembangkan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya dalam mendukung peningkatan daya saing kawasan dan produk unggulan daerah sehingga dapat berfungsi sebagai pusat-pusat pertumbuhan yang dapat menggerakkan pertumbuhan wilayah-wilayah yang tertinggal.
- 43) Meningkatkan pembangunan di wilayah-wilayah tertinggal dan terpencil agar dapat tumbuh dan berkembang secara lebih cepat dan dapat mengejar ketertinggalan pembangunannya.

Misi V : Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat (berobat gratis dan berkualitas).

- 1) Memenuhi kebutuhan infrastruktur kesehatan terutama untuk perdesaan dan wilayah terpencil.
- 2) Memenuhi kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat.
- 3) Memenuhi rasio tenaga kesehatan yang memadai sehingga mampu memberikan layanan kesehatan yang berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat dan wilayah.
- 4) Pemerataan distribusi tenaga kesehatan dilakukan secara simultan terutama memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan di perdesaan dan wilayah terpencil.
- 5) Pendayagunaan kemampuan layanan puskesmas dan puskesmas pembantu pada masing-masing kecamatan dan desa.
- 6) Pembinaan masyarakat pada program Keluarga Berencana.



- 7) Pelayanan Kontrasepsi.
- 8) Pemberian jaminan kesehatan kepada keluarga miskin.
- 9) Pendampingan pelayanan kesehatan keluarga dan anak.
- 10) Perlindungan bagi Perempuan dan Anak

Misi VI : Memfasilitasi percepatan penyelesaian sengketa lahan masyarakat.

- 1) Kejelasan posisi para pihak dalam sengketa lahan.
- 2) Peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam penyelesaian sengketa lahan.
- 3) Terbentuknya lembaga penyelesaian sengketa lahan.
- 4) Terbentuknya kesepakatan bersama tentang mekanisme dan tata cara.

Misi VII : Menata zonasi dan perlindungan terhadap kawasan konservasi, peninggalan budaya situs dan pengembangan budaya tradisional.

- 1) Terciptanya penataan sistem informasi kawasan konservasi, peninggalan situs budaya dan pengembangan budaya tradisional.
- 2) Pemetaan zonasi kawasan konservasi.
- 3) Tindakan tegas terhadap para pihak yang melakukan pelanggaran terhadap kawasan konservasi dan kawasan perlindungan.
- 4) Meningkatkan sikap dan tindakan positif para pihak untuk perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup setiap tahun.
- 5) Meningkatnya motivasi para pihak untuk menjaga lingkungan.
- 6) Meningkatnya sikap tegas pemerintah daerah untuk penerapan sanksi kepada pelaku kerusakan lingkungan hidup.

Misi VIII : Mewujudkan kehidupan beragama, sosial dan budaya yang dinamis serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berdemokrasi.

- 1) Pemberian santunan bagi masyarakat yang mengalami musibah atau bencana alam pada kondisi tanggap darurat dan pasca bencana.
- 2) Sosialisasi dan pembinaan kerukunan beragama secara berkelanjutan sampai ke tingkat RT oleh aparat yang berwenang dengan melibatkan tokoh masyarakat.
- 3) Pembinaan generasi muda melalui lembaga keagamaan.



- 4) Pelestarian kesenian tradisional.
- 5) Terwujudnya pengembangan wisata bahari dan wisata religi.
- 6) Peningkatan peran organisasi kemasyarakatan untuk kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan.
- 7) Memperkuat kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak, peningkatan partisipasi masyarakat.
- 8) Penyiapan media penyaluran aspirasi masyarakat melalui teknologi informasi dan komunikasi.
- 9) Meningkatkan kualitas pelayanan dan bantuan dasar kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.
- 10) Meningkatkan kualitas manajemen dan sumberdaya manusia pelayanan kesejahteraan sosial.
- 11) Mengembangkan dan menyerasikan kebijakan untuk penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut masalah kesejahteraan sosial.
- 12) Meningkatkan mutu manajemen dan profesionalisme pelayanan kesejahteraan sosial.

Misi IX : Meningkatkan sarana dan prasarana olah raga dan pembinaan atlet untuk berprestasi.

- 1) Pengembangan fasilitas olah raga berkualitas di setiap kecamatan.
- 2) Pembinaan generasi muda sejak dini untuk menjadi atlet sesuai dengan minat dan bakat.
- 3) Penyiapan anggaran bagi atlet daerah yang berprestasi sesuai dengan keuangan daerah.
- 4) Pembinaan pemuda/pemudi Tanjabtim untuk menjadi Qori dan Qori'ah berprestasi di tingkat provinsi dan tingkat nasional

D. PRIORITAS DAERAH

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, tentunya akan tetap memperhatikan visi, misi, strategi dan arah kebijakan pembangunan. Oleh karena itu, dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan,



Kabupaten Tanjung Jabung Timur mendefinisikan fokus utama pembangunan pada program prioritas pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi 2011-2016, sebagai berikut :

1. Peningkatan ketersediaan infrastruktur umum secara merata dan berkeadilan, dengan fokus :
 - a. Percepatan Pembangunan Infrastruktur jalan dan jembatan, pemanfaatan transportasi sungai, pelabuhan serta infrastruktur Listrik.
 - b. Meningkatkan Kualitas dan Ketersediaan Jaringan Irigasi dan mewujudkan tersedianya Air Bersih layak minum.
 - c. Percepatan Pembangunan Infrastruktur ekonomi seperti pasar, tempat pelelangan dan infrastruktur Pendidikan, Kesehatan dan Perumahan.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dengan mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul terampil dan siap pakai serta pendidikan gratis berkualitas, dengan fokus :
 - a. Peningkatan pelayanan pendidikan yang berkualitas
 - b. Pemerataan jangkauan akses terhadap pendidikan berkualitas
 - c. Peningkatan pendidikan gratis yang berkualitas terutama bagi masyarakat yang kurang mampu dari tingkat SD sampai SLTA.
 - d. Peningkatan kualitas dan kompetensi pendidikan kejuruan, terutama pendidikan kelautan dan perikanan serta pengembangan ternak.
 - e. Peningkatan Kualitas Layanan dan akses perpustakaan di semua wilayah dan lapisan masyarakat.
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dengan penempatan sumberdaya manusia yang profesional, dengan fokus :
 - a. Peningkatan Tata Pemerintahan yang Baik.
 - b. Peningkatan Jaminan Kepastian dan Perlindungan Hukum.
 - c. Mendorong pelaksanaan anggaran yang transparan, akuntabel dan berbasis kinerja pada semua SKPD dan level Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.



- d. Peningkatan kompetensi birokrasi sehingga dapat bekerja lebih profesional.
- e. Peningkatan Kesetaraan Gender.
- 4. Peningkatan pengembangan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan produktivitas pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan, perdagangan, pariwisata dan sektor jasa, dengan fokus :
 - a. Peningkatan produktivitas sektor pertanian perkebunan, perikanan, dan kelautan perdagangan, pariwisata dan sektor jasa lainnya yang berbasis ekonomi kerakyatan.
 - b. Pengembangan komoditas unggulan pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan.
 - c. Menciptakan kawasan sentra produksi yang berdaya saing.
 - d. Pengembangan usaha agroindustri.
- 5. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat (berobat gratis dan berkualitas) dengan fokus:
 - a. Peningkatan jangkauan pelayanan kesehatan kesemua wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
 - b. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang prima bagi semua penduduk.
 - c. Meningkatkan pelayanan berobat gratis yang berkualitas sesuai standar pelayanan kesehatan.
- 6. Memfasilitasi percepatan penyelesaian sengketa lahan masyarakat, program ini fokus pada:
 - a. Identifikasi permasalahan sengketa lahan yang terjadi di semua Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
 - b. Membantu dan memfasilitasi permasalahan sengketa lahan yang terjadi ditengah masyarakat terutama permasalahan sengketa lahan dengan perusahaan.
 - c. Menyelesaikan dengan cepat penyelesaian sengketa lahan dengan mengacu pada hukum dan peraturan yang berlaku.
- 7. Menata zonasi dan perlindungan terhadap kawasan konservasi, peninggalan budaya situs dan pengembangan budaya tradisional, dengan fokus :



- a. Penataan kembali zonasi dan perlindungan kawasan konservasi dengan tegas dan konsisten berdasarkan hukum untuk menjaga lingkungan hidup yang baik.
 - b. Penataan dan perlindungan terhadap peninggalan budaya dan situs baik yang sudah ada maupun yang sedang dalam proses.
 - c. Peningkatan dan pengembangan budaya tradisional melalui berbagai kegiatan, kajian dan event yang mendorong pengembangan budaya.
8. Mewujudkan kehidupan beragama, sosial dan budaya yang dinamis serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berdemokrasi, dengan fokus:
- a. Peningkatan peran agama dalam mendorong kehidupan sosial dan budaya masyarakat yang lebih dinamis.
 - b. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berdemokrasi dengan mendorong peran aktif masyarakat dalam pembangunan.
 - c. Meningkatkan toleransi beragama yang lebih harmonis ditengah masyarakat.
9. Meningkatkan sarana dan prasarana olah raga dan pembinaan atlit untuk berprestasi, dengan fokus:
- a. Membangun fasilitas olahraga yang representatif untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap olah raga.
 - b. Meningkatkan pencarian atlit olah raga yang berbakat terutama di tingkat SD, SMP dan SLTA.
 - c. Meningkatkan pembinaan atlit untuk berprestasi dan bagi yang berprestasi diberikan bea siswa sesuai dengan kemampuan pemerintah daerah.
 - d. Peningkatan Peran Pemuda untuk mendorong Prestasi Olahraga

E. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH 2015

Prioritas Pembangunan Daerah yaitu tema atau agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi benang merah/ tonggak capaian antara (*milestones*) menuju sasaran 5 (lima) tahunan dalam RPJMD melalui rencana program pembangunan daerah tahunan.



Suatu prioritas pembangunan merupakan jawaban atas sasaran pembangunan daerah dalam suatu pernyataan yang mengandung komponen program prioritas atau gabungan program prioritas.

Suatu prioritas pembangunan daerah pada dasarnya (berisi) program-program unggulan SKPD (terpilih) yang paling tinggi relasinya (*leading indicators*) bagi tercapainya target sasaran pembangunan daerah tahun rencana. Dalam menentukan prioritas pembangunan, terlebih dahulu dilakukan identifikasi permasalahan pembangunan daerah yang bersifat internal maupun eksternal. Setelah diketahui faktor penyebab atau pemicu secara internal maupun eksternal kemudian dapat disusun prioritas dan sasaran pembangunan beserta program prioritas.

Dengan demikian, suatu program pembangunan daerah merupakan program atau sekumpulan program unggulan Kepala Daerah yang berhubungan dengan janji politik Kepala Daerah pada saat pilkada dan hasil perumusan teknokratis terkait.

Tidak semua program prioritas dapat menjadi prioritas pembangunan daerah, karena terkait dengan keterbatasan anggaran, identifikasi dan *magnitude* masalah. Suatu prioritas pembangunan dimasa lalu telah berhasil dicapai, tidak lagi diprioritaskan dimasa berikutnya walau tetap harus dijaga kesinambungannya (*performance maintenance*).

Suatu prioritas pembangunan daerah juga dapat dikategorikan sebagai operasionalisasi dari tujuan strategik daerah mengingat urgensi daya ungkit pada kesejahteraan dan cakupan pembangunannya. Sebagai suatu *strategic*, pengelolaan kinerja menjadi faktor utama bagi kepemimpinan Kepala Daerah.

Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta indikasi prioritas kegiatannya, juga memperhatikan apa yang diusulkan oleh SKPD berdasarkan prakiraan maju pada RKPD tahun sebelumnya.

Metodologi penyusunan prioritas, dengan memperhatikan beberapa kriteria, antara lain:

- a) Korelasinya terhadap pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional, seperti terhadap MDGs, Standar Pelayanan Minimal, pengentasan kemiskinan, dan penciptaan lapangan kerja.



- b) Korelasinya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang dituangkan dalam RPJMD.
- c) Korelasinya terhadap pengembangan sektor/bidang yang terkait keunggulan kompetitif daerah.
- d) Korelasinya terhadap berbagai isu-isustrategis daerah.

Dari prioritas dan arah kebijakan yang tertuang dalam RPJM Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 - 2016. Maka untuk prioritas pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang dituangkan dalam RKPD Tahun 2015 sebagai berikut :

1. Tata Kelola Pemerintahan
2. Pencapaian *Millenium Development Goals* (MDG's)
3. Infrastruktur
4. Pendidikan
5. Kesehatan
6. Ekonomi Kerakyatan dan Ketahanan Pangan
7. Penanggulangan Kemiskinan
8. Penataan Zonasi dan Lingkungan Hidup
9. Hukum, sosial, budaya dan Seni olah raga

Tabel 2.1
Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas Tahun Rencana (RPJMD)	Prioritas Pembangunan daerah (RKPD) 2015
I.	<ol style="list-style-type: none">1. Peningkatan ketersediaan infrastruktur umum secara merata dan berkeadilan.2. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dengan mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul terampil dan siap pakai (Pendidikan gratis berkualitas)3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisiensi,	<ol style="list-style-type: none">1. Tata Kelola Pemerintahan2. Pencapaian MDG'S3. Infrastruktur4. Pendidikan5. Kesehatan6. Ekonomi Kerakayatan7. Penanggulangan Kemiskinan



akuntabel dengan penempatan sumber daya manusia yang profesional.	8. Penataan Zonasi dan Lingkungan Hidup
4. Peningkatan pengembangan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan produktivitas pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan, perdagangan, pariwisata dan sektor jasa.	9. Hukum, sosial, budaya dan Seni olah raga
5. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat (berobat gratis dan berkualitas).	
6. Memfasilitasi percepatan penyelesaian sengketa lahan masyarakat.	
7. Menata zonasi dan perlindungan terhadap kawasan konservasi, peninggalan budaya situs dan pengembangan budaya tradisional.	
8. Mewujudkan kehidupan beragama, sosial dan budaya yang dinamis serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berdemokratis.	
9. Meningkatkan sarana dan prasarana olah raga dan pembinaan alit berprestasi.	

1. Tata Kelola Pemerintahan

- 1) Meningkatnya implementasi tata kelola pemerintah pada seluruh instansi pemerintah melalui terobosan kinerja secara terpadu, penuh integritas, akuntabel, taat dan menjunjung tinggi hukum yang berlaku;
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang terukur dan akuntabel melalui penetapan SOP, Standar Pelayanan Minimal (SPM), ISO dan Evaluasi Kinerja Kepala Daerah, dan Renja SKPD berbasis kinerja yang terukur secara kuantitatif;
- 3) Penyempurnaan implementasi manajemen kepegawaian berbasis *System Merried* dalam rangka peningkatan kinerja dan profesionalisme pegawai;
- 4) Memperkuat dan mengoptimalkan pemerintahan dan unit pengelola teknis di tingkat kecamatan, kelurahan dan desa;
- 5) Perlakuan khusus untuk PNS yang dinas di daerah *remote area*.



2. Pencapaian *Millenium Development Goals* (MDG's)

- 1) Pemberdayaan masyarakat desa melalui penambahan Alokasi Dana Desa (ADD).
- 2) Pemberian Bantuan Permodalan terutama untuk masyarakat kurang mampu.
- 3) Pemenuhan sarana sanitasi dan air minum.
- 4) Pelaksanaan Bedah Rumah dan Sertifikasi SAMUDRA yang sesuai dengan ketentuan dan tepat sasaran.

3. Infrastruktur

- 1) Pembangunan jalan poros ekonomi seperti ruas jalan zone V dan ruas jalan Sabak Timur–Nipah Panjang dengan kekuatan jalan; MST > 8 ton;
- 2) Pembangunan tanggul dan jaringan irigrasi;
- 3) Memperluas dan meningkatkan jalan produksi desa dan jembatan;
- 4) Pemenuhan sarana fasilitas keselamatan jalan;
- 5) Pemenuhan air minum dan sarana sanitasi penduduk;
- 6) Perluasan jaringan listrik interkoneksi ke semua kecamatan dan 70 % desa;
- 7) Diversifikasi sumber energi pembangkit listrik seperti untuk daerah *remote area* dengan PLTS.

4. Pendidikan

- 1) Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan dasar, menengah maupun tinggi melalui peningkatan sarana dan prasarana pendidikan;
- 2) Peningkatan kualitas wajib belajar pendidikan dasar dan menengah dua belas tahun yang merata;
- 3) Regulasi peraturan wajib belajar 12 tahun melalui penyusunan PERDA;
- 4) Peningkatan keterampilan dan pengetahuan siswa SMA dan SMK/ sederajat melalui pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan (laboratorium, perpustakaan, sarana olahraga dan praktikum);
- 5) Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan non-formal;
- 6) Peningkatan akses dan kualitas pendidikan anak usia dini;
- 7) Pembangunan SMK Jurusan Pertambangan.
- 8) Peningkatan kualitas pendidikan agama dan keagamaan;



- 9) Peningkatan efisiensi dan efektivitas manajemen pelayanan pendidikan;
- 10) Peningkatan profesionalisme dan pemerataan distribusi guru dan tenaga kependidikan;
- 11) Pemenuhan kebutuhan guru di daerah sangat terpencil di Kecamatan Sadu, Mendahara Ilir dan berbak;
- 12) Perlakuan khusus untuk sekolah di remote area (khususnya di Kecamatan Sadu, Mendahara Ilir dan Berbak);
- 13) Pemantapan tata kelola BOS sehingga efisien dan efektif;
- 14) Pembangunan dan rehabilitasi rumah dinas guru;
- 15) Meningkatkan akses pelatihan dan keterampilan kerja melalui pembinaan dan pelatihan Teknologi Tepat Guna (TTG);
- 16) Meningkatkan APM SD/ sederajat menjadi sebesar 95,89 %;
- 17) Meningkatkan APM SMP/ sederajat menjadi sebesar 95,03 %;
- 18) Meningkatkan APM SMA/ sederajat menjadi sebesar 64,21 %;
- 19) Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat melalui pelaksanaan paket A, B dan C;
- 20) Memantapkan pengelolaan dan proses belajar Pendidikan Tinggi kerjasama Universitas Jambi dengan Pemerintah Daerah Tanjung Jabung Timur.

5. Kesehatan

- 1) Meningkatkan pelaksanaan upaya kesehatan masyarakat preventif yang terpadu, ditandai dengan:
 - a. Meningkatnya persentase ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih (cakupan PN) menjadi sebesar 85 persen;
 - b. Meningkatnya persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal (cakupan kunjungan kehamilan ke empat (K4)) menjadi sebesar 90 persen;



- c. Meningkatnya cakupan imunisasi dasar lengkap bayi usia 0-11 bulan menjadi sebesar 85 persen dan imunisasi campak menjadi sebesar 90 persen;
 - d. Meningkatnya cakupan kunjungan neonatal pertama (KN1) menjadi sebesar 90 persen;
 - e. Menurunnya persentase balita gizi buruk secara bermakna, dan semua balita gizi buruk mendapat perawatan sesuai standar;
 - f. Terlaksananya penempatan tenaga kesehatan strategis, terutama dokter, bidan dan perawat di daerah-daerah sesuai kebutuhan terutama di daerah;
 - g. Meningkatnya persentase puskesmas rawat inap yang mampu Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi Dasar (PONED) menjadi sebesar 70 persen;
 - h. meningkatnya persentase balita ditimbang berat badannya (D/S) menjadi sebesar 70 persen;
 - i. meningkatnya jumlah desa yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).
- 2) Meningkatnya persentase ketersediaan obat dan vaksin menjadi sebesar 85 persen;
 - 3) Semua penduduk miskin memiliki kartu Jaminan Kesehatan;
 - 4) Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit menular, yang ditandai dengan :
 - a. meningkatnya persentase kasus baru TB Paru (BTA positif) yang ditemukan menjadi sebesar 75% dan yang disembuhkan menjadi sebesar 86%; dan
 - b. meningkatnya angka penemuan kasus malaria menjadi sebesar 1,75 per 1.000 penduduk.
 - 5) Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan KB;
 - 6) Meningkatnya sarana kesehatan yang merata melalui penyediaan dan peningkatan kualitas layanan di Puskesmas dan satelitnya serta RSUD yang terakreditasi;

6. Ekonomi Kerakyatan dan Ketahanan Pangan



- 1) Mempercepat Pengembangan kawasan agropolitan, dengan membentuk satgas pengembangan;
- 2) Penguatan modal, saprodi dan komposter;
- 3) Penguatan dan optimalisasi lembaga penyuluhan Daerah dan BP3K di kecamatan/Desa, melalui peraturan tatalaksana dan tenaga penyuluh; pemenuhan peralatan kerja, serta menjadikan BP3K sebagai Demplot dan sekolah lapangan bagi siswa dan petani;
- 4) Optimalisasi BBI Dendang dan TPI Nipah Panjang, PPI Teluk Majelis, Pabrik Es, tambak dan keramba rakyat;
- 5) Pelaksanaan perluasan lahan pertanian, dan perikanan sesuai dengan kaidah pembangunan berkelanjutan dan Tata Ruang;
- 6) Meningkatkan produksi pertanian dan produktifitas petani;
- 7) Ketersediaan pupuk dan pengembangan pupuk organik melalui perbaikan mekanisme distribusi pupuk;
- 8) Perbaikan dan pembangunan infrastruktur pertanian dan perikanan khususnya jaringan irigasi serta jalan usaha tani dan produksi di daerah sentra produksi;
- 9) Bantuan modal kerja Rp. 50.000.000 – Rp. 100.000.000,- per desa;
- 10) Penyiapan sarana untuk mendidik tenaga profesional melalui lanjutan pembangunan BLK, peralatan dan instruktur, serta pelatihan keterampilan yang berkualitas;
- 11) Pemberdayaan UMKM melalui kemudahan memperoleh modal usaha, bimbingan dan peralatan;
- 12) Optimalisasi fungsi koperasi (KUD) pembentukan lembaga ekonomi mikro (Bumdes), serta kemudahan memperoleh modal usaha;
- 13) Memberikan kemudahan berusaha dan investasi melalui peningkatan pelayanan terpadu;
- 14) Pengembangan ekonomi pedesaan melalui pengembangan pasar kecamatan, dan bantuan modal kerja;
- 15) Peningkatan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan, perdagangan, pariwisata dan sektor jasa lainnya yang berbasis ekonomi kerakyatan;



- 16) Pengembangan komoditas unggulan pada sektor pertanian, perkebunan perikanan dan kelautan;
- 17) Menciptakan kawasan sentra produksi yang berdaya saing;
- 18) Pengembangan usaha agroindustri;
- 19) Pengembangan kelembagaan keuangan mikro;
- 20) Meningkatnya persentase penduduk diatas garis kemiskinan tahun 2015 sebesar 92,75 %;
- 21) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2015 sebesar 8,86%.
- 22) Mengembangkan kawasan destinasi, sesuai dengan potensi lokal yang dimiliki.

7. Penanggulangan Kemiskinan

- 1) Penanggulangan kemiskinan melalui bantuan pembentukan modal bentuk natura untuk peningkatan pendapatan (bibit sapi, tanaman, palawija, saprodi, kapal dan alat tangkap, dan sebagainya) bagi keluarga miskin dan hampir miskin.
- 2) Menggerakan perekonomian pedesaan, dengan meningkatkan ADD secara bertahap hingga mencapai 10% dari dana perimbangan, sekaligus memberdayakan masyarakat desa. Berbagai kegiatan pembangunan yang dikerjakan dengan teknologi sederhana, padat karya serta dengan nilai dibawah Rp. 200 juta harus dilaksanakan dengan pola Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dan dibiayai melalui ADD.
- 3) Mengurangi beban keluarga miskin dan hampir miskin untuk memperoleh pelayanan publik (seperti kesehatan, pendidikan, administrasi kependudukan) dan bantuan perbaikan lingkungan dan perumahan yang layak, santunan kematian.
- 4) Mendorong pertumbuhan yang pro-rakyat miskin dengan memberi perhatian khusus pada usaha-usaha yang melibatkan keluarga miskin dan keluarga dengan kondisi khusus.
- 5) Meningkatkan kualitas kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan melalui kebijakan afirmatif/keberpihakan



- 6) Meningkatkan efektivitas pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.

8. Penataan Zonasi dan Lingkungan Hidup

- 1) Penyiapan Rencana Detail Tata Ruang Kota/Wilayah
- 2) Mengurangi lahan dan DAS kritis melalui rehabilitasi dan reklamasi hutan, normalisasi saluran/sungai, pembangunan tanggul serta peningkatan pengelolaan kualitas ekosistem lahan gambut dengan pelibatan masyarakat secara aktif.
- 3) Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia pengelola lingkungan.
- 4) Tersedianya data dan informasi kualitas SDA dan LH.

9. Hukum, Sosial, Budaya dan Seni Olahraga

- 1) Meningkatkan kualitas legislasi melalui program legislasi daerah (penyusunan rencana PERDA) di pendidikan dan Perda-Perda lain;
- 2) Meningkatkan penegakan hukum, HAM dan pemberantasan korupsi melalui penyuluhan/sosialisasi terhadap Peraturan Perundang-undangan dan PERDA terkait HAM dan pemberantasan korupsi;
- 3) Pembinaan dan penggalian seni budaya daerah melalui pembangunan secara bertahap sanggar seni dan budaya di Kecamatan;
- 4) Apresiasi seni budaya agar kelestariannya tetap terjaga;
- 5) Pengelolaan cagar budaya dengan baik;
- 6) Mengkenalkan seni budaya dan pariwisata melalui web-site (www.tanjabtinkab.go.id);
- 7) Pembinaan cabang olah raga sejak dini dan cabang olah prestasi;
- 8) Pembangunan Sport Centre di tingkat Kabupaten secara bertahap
- 9) Menjalin kerjasama dengan Kota/Kabupaten dalam Provinsi dan luar Provinsi untuk menarik minat masyarakat, diantaranya melalui paket bersama dan pengembangan "Sister City";
- 10) Meningkatnya kapasitas dan kreativitas pemuda di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, iman dan taqwa, seni budaya dan industri kreatif;



- 11) Terselenggaranya paket riset-riset dasar, terapan dan paket riset insentif.

F. PERJANJIAN KINERJA

Rencana Capaian Kinerja Tahunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2015 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015. Perjanjian Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran yang diinginkan. Penetapan Kinerja juga harus sesuai dengan Indikator Kinerja Utama, dimana Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah menetapkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 15 Tahun 2012 tentang Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2016.

Berikut kami sampaikan Perjanjian Kinerja yang akan dicapai pada tahun 2015 dengan jumlah anggaran pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2015 sebesar Rp. 1.011.317.248.150,35 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 492.727.961.587,85 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 518.589.286.562,50

Tabel 2.2

Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2015

SASARAN STRATEGI KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2014
MISI I : MEMPERCEPAT KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR UMUM SECARA MERATA DAN BERKEADILAN			
1.	Perbaikan dan pembangunan jalan mulai dari jalan desa, desa ke kecamatan, dari kecamatan ke kabupaten dan ke Propinsi	Panjang Jalan Kabupaten	982,90 Km
		Jalan Kabupaten dalam kondisi baik	44,34%
		Terhubungnya seluruh sentra produksi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan dalam kondisi baik	58,08%
		Meningkatnya Perhubungan perintis untuk wilayah tertinggal, terpencil	12 mobil pickup; 9 truk PS; 1 Kapal ro-ro
		Jumlah arus penumpang angkutan umum	102.607 orang
		Jumlah pelabuhan udara, laut dan terminal bus	3 unit
		Jumlah angkutan darat	10.765 unit
		Pemasangan rambu-rambu	10
		Jalan desa dilalui roda empat	227,8 KM
		Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	101 m/kendaraan
		Jalan penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan permukiman penduduk	635,28 KM
		Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor	110 M



		Revitalisasi Sungai dan transportasi sungai dan laut	5% telah direvitalisasi dari jumlah ruas sungai
		Persentase peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana transportasi sungai dan laut	22%
		Meningkatnya pangsa pengguna modal transportasi sungai dan laut	31%
2.	Perluasan jangkauan jaringan aliran listrik dan air bersih dengan mengoptimalkan anggaran daerah secara merata dan berkeadilan di setiap desa.	Peningkatan pembangkit listrik tenaga surya di perdesaan	540
Peningkatan rasio elektrifikasi		78%	
Peningkatan jumlah rumah tangga yang mendapat pelayanan air bersih		21,00%	
3.	Penyelesaian pembangunan tanggul terutama di kawasan pertanian masyarakat	Peningkatan jumlah infrastruktur irigasi	85,00%
Luas irigasi dalam kondisi baik		75,00%	
Tersedianya infrastruktur pertanian dan perikanan yang dapat meningkatkan produktifitas pertanian		Pembangunan Tanggul : 60.600 M ¹ ; rehab Irigasi : 45.750 M ¹ ; Pintu air : 7 unit; OP 352.000 M	
4.	Percepatan penyelesaian pembangunan jembatan untuk kepentingan mobilitas perekonomian masyarakat dan sebagai pintu gerbang perekonomian Provinsi Jambi yang menghubungkan Delta Berbak (Muara Sabak - Rantau Rasau - Berbak - Nipah Panjang - Sadu)	Jumlah Jembatan penghubung	efektif
5.	Adanya dukungan pembangunan jaringan telekomunikasi dan listrik	Peningkatan pembangkit listrik tenaga surya di perdesaan	540
		Peningkatan jaringan telekomunikasi	Kabel 3,4%; Seluler 96%
6.	Menunjang pengembangan Kawasan Ujung Jabung sebagai Kawasan Ekonomi Strategis Provinsi Jambi.	Perizinan satu pintu	1 Unit
		adanya kemudahan berinvestasi	34 jenis izin
		Ketersediaan dokumen perencanaan pengembangan kawasan ekonomi strategis	2 dokumen
7.	Penyediaan dan peningkatan kualitas perumahan bagi seluruh masyarakat terutama masyarakat tidak mampu.	Rasio Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB	32,00%
		Persentase rumah layak huni	92,40%
		Persentase peningkatan rumah sehat	62,30%
		Rasio pemukiman layak huni	79,10%
		Akses sanitasi layak	62,30%
		Persentase penanganan sampah	54,30%
		Adanya pola kemitraan dengan Swasta	3 pengembangan perumahan
MISI II : MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PENDIDIKAN DENGAN MEMPERSIAPKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG UNGGUL TERAMPIL DAN SIAP PAKAI (PENDIDIKAN GRATIS BERKUALITAS)			
1.	Peningkatan kualitas pendidikan (Perda Pendidikan Gratis Berkualitas, fasilitas pendidikan,	Angka Rata-rata lama sekolah	6,73 Tahun
		Angka melek huruf	95,40%
		APK SD/Sederajat	115,82%
		APK SMP/Sederajat	106,10%
		APK SMA/Sederajat	82,30%



		Meningkatnya APM PAUD	56,62%
		Meningkatnya APM SD/SDLB/ MI/Sederajat	97,90%
		APM SMP/Sederajat	82,50%
		APM SMA/Sederajat	65,23%
		Angka Partisipasi sekolah tingkat pendidikan dasar (%)	98,00
		Rasio sekolah terhadap jumlah penduduk sekolah tingkat pendidikan dasar	1 : 153
		Rasio guru terhadap murid tingkat pendidikan dasar	1 : 15
		Sarana pendidikan tingkat pendidikan dasar (unit)	208+44
		Angka Partisipasi sekolah tingkat pendidikan menengah (%)	84,26
		Sarana pendidikan tingkat usia dini (PAUD)	229 unit
		Rasio sekolah terhadap jumlah penduduk sekolah tingkat pendidikan menengah	1 : 320
		Rasio guru terhadap murid tingkat pendidikan menengah	1 : 14
		Sarana pendidikan tingkat pendidikan menengah (unit)	33
		Meningkatnya kemampuan dan kesejahteraan guru daerah terpencil (90% sampai tahun 2016)	80,00%
		Terbentuknya perda tentang system pelayanan pendidikan	1 perda
		Meningkatnya kualitas lulusan SMU/SMK/ sederajat	100%
		Berdirinya perguruan tinggi	1 Perguruan Tinggi
		Jumlah perpustakaan (unit)	3
		Jumlah pengunjung perpustakaan pertahun	1468 Orang
		Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (buku)	42527 Eksemplar
		Persentase Penyandang cacat mendapat akses mengikuti pendidikan	55 siswa SDLB
2.	Tenaga Kerja yang terampil dan siap bekerja	Berfungsinya BLK	1 unit
MISI III : MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, EFISIEN, AKUNTABEL DENGAN PENEMPATAN SDM PROFESIONAL			
1.	Penataan organisasi pemerintahan daerah yang efektif dan efisien untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan	Jabatan diisi oleh aparatur sesuai dengan kemampuan, keahlian, jenjang kepangkatan dan karier	75,00%
		Jumlah PNS Daerah	5.000
		Meningkatnya persentase tindak lanjut hasil-hasil pengawasan (temuan dan tindak lanjut)	96,00%
		Meningkatnya kapasitas aparatur pengawas internal (Persentase aparatur pengawasan sesuai dengan pendidikan dan atau mengikuti pelatihan atau kursus)	85%
		Rasio jumlah polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	6,1/10.000 penduduk
2.	Penataan dan implementasi sistem pengelolaan keuangan dan anggaran yang transparan berbasis e-budget dan e-audit	Meningkatnya pencapaian sistem keuangan daerah yang transparan berbasis e-budget dan e-audit	1 aplikasi anggaran dan 1 aplikasi pelaporan anggaran
3.	Penataan wilayah Kecamatan dan desa/kelurahan	Wilayah daerah tertata sesuai dengan hasil musyawarah dengan pihak-pihak berkepentingan	93 desa/kelurahan (100%)
		Penyelenggaraan pelayanan public di Kecamatan meningkat	6 jenis pelayanan
4.	Penyiapan sistem perekrutan CPNS yang bebas KKN dan memberikan perhatian khusus untuk putra-putri Tanjung Jabung Timur.	Adanya prioritas penerimaan CPNS berdasarkan analisis kebutuhan	50%
		Penempatan CPNS sesuai dengan beban kerja setiap SKPD	1 ujian kali kompetensi
		CPNS yang bebas KKN	100%
5.	Peningkatan kesejahteraan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan	Adanya standar aturan TKD diberikan sesuai dengan beban kerja dan prestasi kerja serta lokasi tempat tugas (sangat-sangat terpencil – sangat terpencil - tidak terpencil)	38,8 Milyar
6.	Peningkatan insentif untuk pegawai SARA	Insentif Pegawai SARA meningkat	Rp. 700.000,00
		Penghargaan bagi Pegawai SARA	Rp. 700.000,00



7.	Sistem pelayanan publik terpadu yang bebas KKN	Perda pelayanan public mampu meningkatkan kepastian hukum dan pendapatan asli daerah	1 perda
		KPPT berfungsi sebagai lembaga terpadu pelayanan publik	1 SOP
		Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui pelayanan terpadu	Meningkat 14,41%
		Sistem komputerisasi KTP terbangun di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Terealisasi di 11 kecamatan
		Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	97%
		Rasio pasangan berakte nikah	63%
		Kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk	100%
		Laju pertumbuhan penduduk	0,69%
		Pengembangan sistem jaringan e-government	9 MBPS
		Pengembangan pelayanan publik dengan sistem aplikasi online	1 website
		Sistem informasi daerah berbasis online	1 website
		Pelayanan publik bebas dari KKN	100%
MISI IV : MENINGKATKAN PENGEMBANGAN EKONOMI KERAKYATAN MELALUI PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN, PERKEBUNAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN, PERDAGANGAN, PARIWISATA DAN SEKTOR JASA LAINNYA.			
1.	Iklim investasi yang sehat dengan reformasi kelembagaan ekonomi di berbagai tingkatan pemerintahan yang mampu mengurangi praktik ekonomi tinggi.	Jumlah izin Pelayanan satu pintu	36 jenis perizinan
		Nilai Investasi PMA dan PMDN (US\$)	US\$ 24.316
2.	Stabilitas makro ekonomi dengan tetap mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas serta peningkatan kemampuan pendanaan pembangunan.	Nilai Ekspor (US\$)	97,35 Juta
		Nilai Impor (US\$)	24,78 Juta
		Pertumbuhan Ekonomi	7,55%
		Laju inflasi	4,00%
		PDRB atas harga berlaku	IDR 16.663.486,41 Juta
		Jenis dan jumlah bank	8
		Jumlah Penduduk (jiwa)	218.995
3.	Membentuk BUMD yang dapat memberikan sumbangan kepada pendapatan asli daerah	Jumlah Sentra industri kecil	14 unit
		Peningkatan kontribusi BUMD terhadap PAD	Meningkat
4.	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pedesaan yang ditandai dengan berkurangnya jumlah penduduk miskin serta meningkatnya tingkat kesejahteraan dan akses kebutuhan dasar masyarakat.	Kantaya LKPM	Meningkat
		Tingkat kemiskinan	6,5
		Persentase penduduk di atas garis kemiskinan	93,5
		Lumbung pangan	4
		desa ketahanan pangan	18 desa mandiri pangan
		Lembaga distribusi pangan masyarakat	93 Gapoktan
		Jumlah Desa Rawan Pangan	23 Desa
		Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi (%)	80
		Konsumsi beras (kg/kap/thn)	113
		Jumlah UKM	380
		Jumlah/UKM yang berperan	380
		Jumlah Wirausaha baru berbasis teknologi	26 orang/unit
		UKM Unggulan	61 UKM
		Jumlah koperasi handal	69 koperasi
5.	Perbaikan iklim ketenagakerjaan dengan upaya menurunkan tingkat pengangguran.	Persentase koperasi aktif	41,18
		Produk Unggulan	14 produk
		Jumlah TK yang terserap	1.360
		UMR	Rp. 1.400.000
		Jumlah Pelatihan	9 kali
		Jumlah perusahaan yang dimonitor terkait peraturan Per UU Ketenagakerjaan	16 perusahaan



		Tingkat Partisipasi angkatan kerja	97,50%
		Angka kesempatan kerja	103,447 orang
		Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan	45,60%
		Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	11,40%
		Partisipasi angkatan kerja wanita	42,78%
6.	Pengembangan potensi wisata dan kawasan desa wisata melalui promosi	ketersediaan biro jasa perjalanan wisata untuk paket wisata di Tanjung Jabung Timur	2 biro
		Keterpaduan sistem jaringan modal transportasi untuk pelayanan kepariwisataan	60%
		keterpaduan untuk pengembangan dan pelestarian objek wisata daerah	10
		Meningkatnya kunjungan wisata 25%	Meningkatnya kunjungan wisata 75%
		Kunjungan wisata (orang)	14.000
		Sarana wisata (hotel & restoran)	7 + 274
		Objek Wisata	10
7.	Peningkatan produksi pertanian (pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan dan kehutanan) dan terwujudnya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani dan keluarga	Potensi Lahan	55.650 Ha
		Luas lahan pertanian tanaman pangan	29.425 Ha
		Pemberian bantuan, fasilitas, subsidi dll	17.000 Ha
		Penguatan Kelompok Tani	1.190 Kelompok
		Nilai Tukar Petani (%)	99,64%
		Produktivitas Padi	36,8 Kwt/ha
		Produksi kedelai	14,93 kwt/ha
		Produksi karet	0,32 ton/ha
		Produksifitas kelapa sawit	2,85 ton/ha
		Produktifitas kopi	0,55 ton/ha
		Produksi Padi	107.201 ton
		Produksi Jagung	6.140 ton
		Jumlah Sapi (ekor)	16.100 ekor
		Jumlah Kambing (ekor)	28.375 ekor
		Jumlah kerbau (ekor)	154 ekor
		Jumlah domba (ekor)	468 ekor
		Produksi daging ruminansia besar	125,7 ton
		Lembaga ekonomi mikro	10 unit
		Jumlah industri pengolahan hasil pertanian	315
		Terpenuhi sarana prasarana pertanian	53,00%
		Pencegahan penularan penyakit ternak	31.000 dosis
		fasilitas pemasaran hasil produksi peternakan	3 unit Pasar Hewan
		Ikan Laut (ton)	37.125 Ton
		Ikan Perairan Umum (ton)	900 Ton
		Ikan Kolam (ton)	500 Ton
8.	Pengelolaan sumberdaya alam migas dan bahan tambang yang memberi manfaat ekonomi untuk Pendapatan daerah dan masyarakat sekitar dengan dampak lingkungan yang minimal	Peraturan tentang pengelolaan SDA	3 perda
		Jumlah penyuluhan untuk kesadaran pengelolaan lingkungan	4 kali
		Tingkat pencemaran lingkungan	0 kasus
		Kerusakan lingkungan	0 kasus
		Bencana alam akibat pengelolaan SDA	0 kasus
		Sosialisasi pengelolaan SDA dan Lingkungan	4 kali
9.	Peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah dan berkurangnya kesenjangan pembangunan antar wilayah	Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan di kecamatan	2 Wilayah Pertumbuhan
		Penguatan lembaga ekonomi pedesaan yang mandiri dan unggul	Pendirian BUMDes sebanyak 5 desa
		Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	5 dokumen



		Partisipasi Masyarakat dalam proses pembangunan	93 desa/kelurahan (100%)
		Kapasitas Aparatur Desa	90%
		Kapasitas perempuan dalam pembangunan desa	40%
		Kawasan Kota Mandiri Terpadu	1 kawasan
MISI V : MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT			
1.	Pelayanan berobat gratis masyarakat yang lebih sederhana dan mudah dijangkau serta berkualitas	Jumlah Puskesmas	17
		Jumlah Puskesmas Pembantu	64
		Ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	100%
		Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	95%
		Angka Usia Harapan Hidup	71,55
2.	Ketersediaan peralatan medis, obat-obatan, tenaga medis, dokter umum dan dokter spesialis dengan jumlah yang memadai untuk Rumah Sakit Umum dan Puskesmas rawat inap	Jumlah Dokter	45
		Jumlah Bidan	209
		Jumlah Perawat	210
		Jumlah Dokter per Puskesmas	1-3/Puskesmas: 1-2dokter umum/spesialis/gigi
		Rasio penduduk dengan Bidan	1 : 922
		Rasio penduduk dengan Perawat	1 : 1.155
3.	Ketersediaan peralatan, obat-obatan dengan jumlah yang memadai untuk Puskesmas dan satelitnya.	Indeks pembangunan Manusia	73,8
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	95%
4.	Pelayanan dan perlindungan kesehatan keluarga, ibu dan anak	cakupan PUS yang istrinya dibawah 20 tahun sebesar 3,5%	70 % dari 3,5 % PUS dibawah 20 tahun
		Cakupan sasaran PUS menjadi peserta KB aktif sebesar 65%	82%
		Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) sebesar 5%	70 % dari sasaran 5 %
		Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB sebesar 70%	70 % dari sasaran 70 %
		Rata-rata jumlah anak per keluarga	2 anak
		Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	75%
		Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	90%
		Cakupan desa/kelurahan universal child immunization (UCI)	100%
		Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	100%
		Cakupan kunjungan bayi	93%
		Cakupan kunjungan ibu hamil K4	95%
		Cakupan pelayanan nifas	90%
		Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	80%
		Cakupan desa siaga aktif	40%
		cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat sebesar 30%	30%
		RTS-Miskin	3.881 RT miskin
		Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 1	12,90%
		Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup	118
		Angka kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup	23,4



		Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	32
		Angka kematian neonatal per 1.000 kelahiran hidup	15
		Persentase prevalensi kekurangan gizi (standar WHO, 2005)	16
		advokasi perlindungan perempuan dan anak	1
MISI VI : MEMFASILITASI PERCEPATAN PENYELESAIAN SENGKETA LAHAN MASYARAKAT			
1.	Kepemilikan lahan-lahan yang mengalami sengketa terutama sengketa lahan antara masyarakat dengan perusahaan.	Pemahaman para pihak terhadap objek sengketa menjadi jelas	100%
		Persentase konflik lahan masyarakat	5%
		Advokasi pengetahuan dan pemahaman dalam penyelesaian sengketa lahan	3 kali sosialisasi
2.	Melindungi fasilitas umum dan asset negara yang diakibatkan adanya sengketa lahan yang terjadi.	Tatacara penyelesaian sengketa lahan	1 aturan
MISI VII : MENINGKATKAN PENATAAN ZONASI DAN PERLINDUNGAN TERHADAP KAWASAN KONSERVASI, PENINGGALAN BUDAYA SITUS DAN PENGEMBANGAN BUDAYA			
1.	Terciptanya kesadaran para stakeholder tentang pentingnya pelestarian alam dan lingkungan hidup khususnya kawasan konservasi dan kawasan perlindungan.	Sistem informasi kawasan konservasi peninggalan situs, dan pengembangan budaya tertata dengan baik.	1 sistem informasi
		Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	4 lokasi
		Pengamanan Kawasan Konservasi	1 paket
		Jelasnya zonasi	1 Perda tentang RTRW
		Ketaatan terhadap RTRW	90%
		Luas wilayah produktif (Ribuan Ha)	33.700,04
		Luas wilayah industri (Ribuan Ha)	140
		Luas wilayah banjir (Ribuan Ha)	10.241,36
		Luas wilayah perkotaan (Ribuan Ha)	1.375
2.	Adanya peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan pemerintah daerah yang berkenaan dengan lingkungan hidup.	Partisipasi masyarakat untuk kepedulian atas perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup	2 kegiatan
3.	Adanya penghargaan kepada inisiator yang menjaga lingkungan hidup dan menerapkan sanksi secara konsisten terhadap perusak lingkungan hidup.	Pelestarian hutan dan lahan	1 paket reboisasi
		Masyarakat peduli lingkungan	80%
		Pelanggar hukum	0%
MISI VIII : MEWUJUDKAN KEHIDUPAN BERAGAMA, SOSIAL DAN BUDAYA YANG DINAMIS SERTA MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM KEHIDUPAN DEMOKRATIS			
1.	Perlindungan dan kepedulian kepada masyarakat yang mengalami musibah atau bencana alam.	Penanganan bencana yang cepat dan tepat	korban dapat diselamatkan mencapai 100%
		Masyarakat yang mengalami musibah mendapat santunan	100% dari jumlah masyarakat terkena musibah
2.	Dukungan terhadap kehidupan beragama sampai ditingkat terbawah	Dukungan pemerintah daerah mampu meningkatkan kegiatan-kegiatan keagamaan	100% tercipta ketenteraman dan kerukunan umat beragama / tidak ada konflik agama
3.	Pelestarian kesenian daerah yang berasal	Cakupan kajian seni 50%	Cakupan kajian seni 40%



		Jumlah Grup Kesenian dan budaya daerah (grup)	65
		Gedung Kesenian dan budaya (unit)	7
		Event seni dan budaya (event)	8
4.	Fasilitasi organisasi kemasyarakatan, kepemudaan, kemahasiswaan dan kelompok masyarakat lainnya dalam melaksanakan kegiatan sosial	Meningkatnya peran organisasi masyarakat secara konstruktif	29 Organisasi masyarakat
		Jumlah organisasi pemuda	15 unit
		Jumlah kegiatan kepemudaan	21 kegiatan
		Menguatnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak, peningkatan partisipasi masyarakat	Meningkat
5.	Peningkatan kesadaran masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara tertib dan demokratis.	Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam penyampaian aspirasi secara demokratis	2 kali sosialisasi
		Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	3 kegiatan
		Kegiatan pembinaan politik daerah	15 kegiatan
		Jumlah demo	1
		Jumlah LSM	10 LSM
6.	Kualitas pelayanan, rehabilitasi, bantuan sosial, dan jaminan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Jenis dan jumlah Kegiatan	4 jenis bantuan
		Jumlah keluarga miskin yang diberi bantuan dan difasilitasi	200 KK
		Jumlah lansia yang dilayani	80 orang
		Jumlah eks penyandang sosial yang dilatih	7 orang
		menurunnya angka anak terlantar pertahun	turun 10% dari tahun 2014
		para penyandang cacat di seluruh kecamatan	turun 10% dari total penyandang cacat 2014
		Jumlah eks penyandang sosial yang dilatih keterampilan berusaha	5 orang
		Jumlah penyandang cacat yang direhabilitasi panti	11 orang
		Persentase Penurunan eks penyandang penyakit sosial di tempat yang terindikasi penyebaran	turun 10% dari total penyandang 2014
		Persentase Perlindungan dan pembinaan Anak Terlantar (Jumlah anak terlantar yang berhasil dilayani, dilindungi dan dibina)	25 orang
MISI IX : MENINGKATKAN SARANA DAN PRASARANA OLAH RAGA DISETIAP KECAMATAN DAN PEMBINAAN ATLET UNTUK BERPRESTASI			
1.	Ketersediaan fasilitas olah raga di setiap kecamatan.	Persentase kualitas dan kuantitas fasilitas olah raga di setiap kecamatan secara merata 75%	55%
		Lapangan olahraga	9 unit
		Jumlah Sarana Olahraga	13
2.	Penyiapan atlet berprestasi sejak dini, berkala dan berkelanjutan	Atlit Berprestasi terbina sejak usia dini	20 atlit
		Jumlah kegiatan olahraga	18 kegiatan
		Jumlah organisasi olahraga	14 unit
		Jumlah Club Olahraga	103
3.	Penghargaan bagi atlet daerah yang berprestasi dan mengharumkan nama daerah.	Tersedianya anggaran untuk pembinaan atlet berprestasi	45 juta rupiah
4.	Pengembangan dan pendidikan pemuda/i Tanjabtim untuk menjadi Qori dan Qori'ah tingkat provinsi dan tingkat nasional	Persentase peningkatan prestasi qori dan qori'ah sebesar 50%	Meningkat 60% dari sasaran 50%



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menjelaskan disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja tahun 2015.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ) disusun oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai wujud dari keinginan yang kuat dari pemimpin daerah untuk meningkatkan performansi organisasi di lingkungan



Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Oleh karena itu pengukuran terhadap capaian kinerja yang dihasilkan oleh seluruh jajaran manajemen Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, menjadi suatu kebutuhan bagi Pimpinan Daerah untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam melakukan perbaikan di masa yang akan datang. Akuntabilitas kinerja digunakan untuk menilai kemampuan setiap unit organisasi dalam melaksanakan mandat yang diberikan kepadanya oleh Kepala Daerah. Pelaksanaan mandat tersebut diwujudkan dalam prestasi kerja yang diukur berdasarkan tolak ukur keluaran dan hasil yang diperoleh atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Untuk menilai Akuntabilitas Kinerja diperlukan tolak ukur atau indikator kinerja. Capaian Indikator kinerja ini akan dinilai, dianalisa dan dievaluasi tingkat keberhasilannya. Analisa dan evaluasi yang dilakukan disajikan menurut kelompok urusan pemerintahan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

A. INDIKATOR KINERJA

Indikator kinerja adalah alat ukur pencapaian hasil yang diharapkan oleh *stakeholder*. Indikator Kinerja haruslah dipandang sebagai *early warning system* yang secara antisipatif dapat dijadikan alat pengendalian Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk pengambilan keputusan stratejik agar berjalan pada koridor arah pembangunan yang menjadi kontrak sosial antara pengemban amanat dan pemberi amanat. Dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2016, indikator kinerja masih bersifat parsial dan komulatif sehingga pada pengukuran capaian kinerja per misi akan diberikan tanda (*) untuk indikator yang bersifat parsial dan tanda (**) untuk indikator yang bersifat komulatif

B. ANALISA DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA

Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, maka pada saat penyusunan Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja pada awal tahun telah kami tetapkan Standar Pencapaian dengan skala ordinal sebagai berikut :



No	JUMLAH NILAI	KATEGORI
1	Lebih dari 85 %	Sangat berhasil
2	70 % s.d kurang dari 85 %	Berhasil
3	55 % s.d kurang dari 70 %	Cukup
4	Kurang dari 55 %	Kurang

Capaian kinerja dihasilkan dari pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja tersebut tidak dimaksudkan untuk memberikan penghargaan maupun hukuman kepada pelaksana kegiatan, namun digunakan untuk menilai tingkat efektivitas hasil kerja yang dilaksanakan oleh satuan kerja guna meningkatkan kinerja organisasi.

Selanjutnya analisa dan evaluasi kinerja diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan kinerja yang pada akhirnya dapat disimpulkan adanya masalah kinerja sebagai bahan pengambilan keputusan manajemen untuk meningkatkan kinerja melalui alokasi, distribusi dan regulasi. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki ruang lingkup yang dibagi ke dalam urusan wajib dan urusan pilihan pemerintahan, maka segala pencapaian sasaran-sasaran RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 - 2016 tidak dapat dilepaskan dari urusan wajib dan urusan pilihan tersebut.

Beberapa hal yang hendak dianalisa dan dievaluasi dapat diuraikan pada masing-masing urusan sebagai berikut :

1. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PEMERINTAHAN

Capaian masing-masing sasaran tahun 2015 terhadap target yang direncanakan berdasarkan misi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah sebagai berikut :



MISI 1 : MEMPERCEPAT KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR UMUM SECARA MERATA DAN BERKEADILAN

Untuk mencapai Misi 1 **“Mempercepat Ketersediaan Infrastruktur Umum Secara Merata dan Berkeadilan”** pada tahun 2015 telah dilaksanakan program utama yaitu : perbaikan dan pembangunan jalan mulai dari jalan desa, desa ke kecamatan, dari kecamatan ke kabupaten dan ke provinsi, perluasan jangkauan jaringan aliran listrik dan air bersih dengan mengoptimalkan anggaran daerah secara merata dan berkeadilan di setiap desa, penyelesaian pembangunan tanggul terutama di kawasan pertanian masyarakat.

Seluruh program/sasaran tersebut telah dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai indikator kegiatan sebagai berikut :

SASARAN STRATEGI KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2016	TARGET 2015	REALISASI 2015	CAPAIAN (%) TERHADAP TARGET 2011	CAPAIAN (%) TERHADAP TARGET 2012	CAPAIAN (%) TERHADAP TARGET 2013	CAPAIAN (%) TERHADAP TARGET 2014	CAPAIAN (%) TERHADAP TARGET 2015	RATA-RATA CAPAIAN (%) 2011-2015
1. Perbaikan dan pembangunan jalan mulai dari jalan desa, desa ke kecamatan, dari kecamatan ke kabupaten dan ke Provinsi	Panjang Jalan Kabupaten	1.000 Km	982,90 Km	993,88 Km	103,45	100,67	101,03	101,89	101,12	101,63
	Jalan Kabupaten dalam kondisi baik	61,60%	44,34%	46,95%	108,83	141,26	70,38	86,43	105,89	102,56
	Terhubungnya seluruh sentra produksi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan dalam kondisi baik	100,00%	58,08%	73,60%	131,14	105,44	79,39	47,03	126,72	97,94
	Meningkatnya Perhubungan perintis untuk wilayah tertinggal, terpencil	12 mobil pickup; 9 truk PS; 1 Kapal roro	12 mobil pickup; 9 truk PS; 1 Kapal roro	9 mobil pickup; 3 truk PS; 1 Kapal roro	100,00	80,00	91,66	56,52	69,46	79,53
	Jumlah arus penumpang angkutan umum	111.739 orang	102.607 orang	199.021 orang	100,00	100,00	128,82	159,84	193,89	136,51
	Jumlah pelabuhan udara, laut dan terminal bus	4 unit	3 unit	2 unit	100,00	100,00	66,67	66,67	66,67	80,00
	Jumlah angkutan darat	11.265 unit	10.765 unit	23.050 unit	100,00	100,00	144,32	128,23	214,12	137,33
	Pemasangan rambu-rambu	1.190	10	12 unit	100,00	100,00	119,26	74,81	120,00	102,81



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

		Jalan desa dilalui roda empat	227,80 KM	227,8 KM	233,70 Km	100,00	100,00	101,27	102,91	102,92	101,42
		Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	94 m/kendaraan	101 m/kendaraan	106 m/kendaraan	100,00	100,00	100,00	100,97	101,92	100,58
		Jalan penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan permukiman penduduk	635,28 KM	635,28 KM	467,855 Km	100,00	100,00	98,38	122,50	73,65	98,91
		Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor	120 M	110 M	126 M	100,00	100,00	330,00	206,25	114,55	170,16
		Revitalisasi Sungai dan transportasi sungai dan laut	70,00%	5% telah direvitalisasi dari jumlah ruas sungai	6,83%	20,00	125,00	6,86	5,71	136,60	58,83
		Persentase peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana transportasi sungai dan laut	25%	22%	43,00%	100,00	100,00	48,47	100,00	195,45	108,79
		Meningkatnya pangsa pengguna modal transportasi sungai dan laut	37%	31%	31,62,00%	75,00	116,17	33,42	96,00	102	84,52
2	Perluasan jangkauan jaringan aliran listrik dan air bersih dengan mengoptimalkan anggaran daerah secara merata dan berkeadilan di setiap desa.	Peningkatan pembangkit listrik tenaga surya di perdesaan	540	540	415	100,00	100,00	181,47	76,85	76,85	107,03
		Peningkatan rasio elektrifikasi	85%	78%	83,87%	114,25	100,00	104,29	105,48	107,53	106,31
		Jumlah pelabuhan udara, laut dan terminal bus	57,38%	21,00%	12,71%	146,38	100,00	52,50	47,54	60,52	81,39
3	Penyelesaian pembangunan tanggul terutama di kawasan pertanian masyarakat	Peningkatan jumlah infrastruktur irigasi	90,00%	85,00%	80,00%	60,00	103,57	86,67	94,99	94,12	87,87
		Luas irigasi dalam kondisi baik	80,00%	75,00%	62,60%	100,00	100,00	86,67	72,17	83,47	88,46
		Tersedianya infrastruktur pertanian dan perikanan yang dapat meningkatkan produktifitas pertanian	Pembangunan Tanggul : 70.000 M ³ ; rehab Irigasi : 45.000M ³ ; Pintu air : 6 unit; OP : 352.000 M	Pembangunan Tanggul : 60.600 M ³ ; rehab Irigasi : 45.750 M ³ ; Pintu air : 7 unit; OP : 352.000 M	Pembangunan Tanggul : 72.050 M ³ ; rehab Irigasi : 75.660 M ³ ; Pintu air : 4 unit; OP : 244.900 M	100,00	100,00	Pembangunan Tanggul : 210%; rehab Irigasi : 100%; Pintu air : 80%; OP : 60%	100,00	100,08	100,02



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

4	Percepatan penyelesaian pembangunan jembatan untuk kepentingan mobilitas perekonomian masyarakat dan sebagai pintu gerbang perekonomian Provinsi Jambi yang menghubungkan Delta Berbak (Muara Sabak - Rantau Rasau - Berbak - Nipah Panjang - Sadu)	Jumlah Jembatan penghubung	efektif	efektif	65%	100,00	100,00	60,00	60,00	65,00	77,00
5	Adanya dukungan pembangunan jaringan telekomunikasi dan listrik	Peningkatan pembangkit listrik tenaga surya di perdesaan	540	540	540	100,00	100,00	181,47	76,85	76,85	107,03
		Peningkatan jaringan telekomunikasi	Kabel 3,6%; Seluler 99%	Kabel 3,4%; Seluler 96%	Kabel 12,92%; Seluler 100%	0,00	100,00	100	100,00	243,76	108,75
6	Menunjang pengembangan Kawasan Ujung Jabung sebagai Kawasan Ekonomi Strategis Provinsi Jambi.	Perizinan satu pintu	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100,00	100,00	100	100,00	100,00	100,00
		adanya kemudahan berinvestasi	35 jenis izin	34 jenis izin	31 jenis izin	100,00	100,00	96,88	93,94	91,18	96,40
		Ketersediaan dokumen perencanaan pengembangan kawasan ekonomi strategis	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	Penyediaan dan peningkatan kualitas perumahan bagi seluruh masyarakat terutama masyarakat tidak mampu.	Rasio Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB	32,00%	32,00%	76,13%	100,00	100,00	116,75	116,75	100,00	106,70
		Persentase rumah layak huni	94,00%	92,40%	62,60%	100,00	100,00	99,33	77,95	67,75	89,01
		Persentase peningkatan rumah sehat	65,50%	62,30%	46,02%	100,00	101,86	68,31	79,07	73,87	84,62
		Rasio pemukiman layak huni	80,00%	79,10%	75,50%	100,00	100,00	98,27	96,89	95,45	98,12
		Akses sanitasi layak	65,50%	62,30%	54,58%	117,00	106,59	66,15	93,78	87,61	94,23
		Persentase penanganan sampah	64,00%	54,30%	46,36%	100,00	100,00	111,11	80,80	85,38	95,46
		Adanya pola kemitraan dengan Swasta	4 pengembang perumahan	3 pengembang perumahan	3 pengembang perumahan	100,00	100,00	100	150,00	100,00	110,00
Rata - rata										113,57	101,33

Untuk mendukung pencapaian Misi 1 **“Mempercepat Ketersediaan Infrastruktur Umum Secara Merata dan Berkeadilan”** Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur menetapkan 7 sasaran yang didukung dengan 34 Indikator Kinerja Utama.



Dari 34 Indikator Kinerja yang telah ditetapkan, rata-rata capaian kinerja terhadap target tahun 2015 sebesar 113,57 % atau masuk dalam kategori sangat berhasil. Pencapaian paling rendah terdapat pada indikator Peningkatan jumlah rumah tangga yang mendapat pelayanan air bersih yang hanya mencapai 60,52 % dari target yang ditetapkan sebesar 21% atau terealisasi sebesar 12,71 %, sedangkan Peningkatan jaringan telekomunikasi menjadi indikator yang paling tinggi capaiannya, yaitu terealisasi sebesar 243,76 %. Sedangkan untuk rata-rata capaian kinerja setiap tahun (2011 s/d 2015) pada Misi 1 mencapai 101,33 % atau masuk dalam kategori sangat berhasil.

Berdasarkan standar pencapaian dengan skala ordinal yang telah ditetapkan maka Pemerintah Daerah Tanjung Jabung Timur harus lebih konsisten dalam upaya pencapaian misi pertama ini karena masih ada 5 indikator yang mendapatkan predikat kurang atau capaiannya kurang dari 70 %, yaitu : Meningkatnya Perhubungan perintis untuk wilayah tertinggal, terpencil, Jumlah pelabuhan udara, laut dan terminal bus, Jumlah pelabuhan udara, laut dan terminal bus, Jumlah Jembatan penghubung, dan Persentase rumah layak huni.



MISI 2 : MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PENDIDIKAN DENGAN MEMPERSIAPKAN SDM YANG UNGGUL TERAMPIL DAN SIAP PAKAI

Untuk mendukung Misi 2 telah dilakukan sasaran utama yaitu peningkatan kualitas pendidikan (Perda pendidikan gratis berkualitas, fasilitas pendidikan, kesejahteraan tenaga pendidik) serta tenaga kerja yang terampil dan siap bekerja.

Seluruh program tersebut telah dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai indikator kegiatan sebagai berikut :

SASARAN STRATEGI KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2016	TARGET 2015	REALISASI 2015	CAPAIAN (%) TERHADAP TARGET 2011	CAPAIAN (%) TERHADAP TARGET 2012	CAPAIAN (%) TERHADAP TARGET 2013	CAPAIAN (%) TERHADAP TARGET 2014	CAPAIAN (%) TERHADAP TARGET 2015	RATA-RATA CAPAIAN (%) 2011-2015
1. Peningkatan kualitas	Angka Rata-rata lama sekolah	8,25 Tahun	6,73 Tahun	6,34	102,31	97,43	87,99	93,15	94,21	95,02



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

pendidikan (Perda Pendidikan Gratis Berkualitas, fasilitas pendidikan, kesejahteraan tenaga pendidik)	Angka melek huruf	96,20%	95,40%	97,30%	100,22	102,81	103,38	101,69	101,99	102,02
	APK SD/Sederajat	116,70%	115,82%	112,87%	100,00	100,00	96,51	74,68	97,47	93,73
	APK SMP/Sederajat	106,60%	106,10%	90,69%	100,00	100,00	99,62	100,95	85,48	97,21
	APK SMA/Sederajat	85,75%	82,30%	62,41%	100,97	96,08	85,53	146,98	75,83	101,08
	Meningkatnya APK PAUD	62,29%	56,62%	62,29%	100,00	100,00	96,11	121,02	110,01	105,43
	Meningkatnya APM SD/SDLB/MI/Sederajat	100,00%	97,90%	98,25%	100,00	100,00	102,60	102,46	100,36	101,08
	APM SMP/Sederajat	83,75%	82,50%	90,69%	100,00	100,00	127,45	104,56	109,93	108,39
	APM SMA/Sederajat	66,50%	65,23%	64,21%	100,00	100,00	93,85	103,58	98,44	99,17
	Angka Partisipasi sekolah tingkat pendidikan dasar (%)	98,00	98,00	98,00	100,00	100,00	100,81	100,77	100,00	100,32
	Rasio sekolah terhadap jumlah penduduk sekolah tingkat pendidikan dasar	1 : 154	1 : 153	1 : 152	100,00	100,00	129,06	98,70	100,66	105,68
	Rasio guru terhadap murid tingkat pendidikan dasar	1 : 16	1 : 15	1 : 14	100,00	100,00	87,50	87,50	107,14	96,43
	Sarana pendidikan tingkat pendidikan dasar (unit)	208+44	208+44	208+44	100,00	100,00	120,67	100,00	100,00	104,13
	Angka Partisipasi sekolah tingkat pendidikan menengah (%)	85,75	84,26	85,75	100,00	100,00	78,54	102,71	102,01	96,65
	Sarana pendidikan tingkat usia dini (PAUD)	229 unit	229 unit	229 unit	100,00	100,00	134,06	100,00	100,00	106,81
	Rasio sekolah terhadap jumlah penduduk sekolah tingkat pendidikan menengah	1 : 322	1 : 320	1 : 326	100,00	100,00	84,90	101,86	98,16	96,98
	Rasio guru terhadap murid tingkat pendidikan menengah	1 : 15	1 : 14	1 : 15	100,00	100,00	109,00	86,67	86,67	96,47
	Sarana pendidikan tingkat pendidikan menengah (unit)	33	33	33	100,00	100,00	125,00	103,13	100,00	105,63
	Meningkatnya kemampuan dan kesejahteraan guru daerah terpencil (90% sampai tahun 2016)	90,00%	80,00%	100,00%	100,00	100,00	250,00	166,67	125,00	148,33
	Terbentuknya perda tentang system pelayanan pendidikan	1 perda	1 perda	1 perda	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Meningkatnya kualitas lulusan SMU/SMK/ sederajat	100%	100%	100%	100,00	100,00	100,00	99,90	100,00	99,98
	Berdirinya perguruan tinggi	1 Perguruan Tinggi	1 Perguruan Tinggi	1 Perguruan Tinggi	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	90,00



		Jumlah perpustakaan (unit)	3	3	2	50,00	50,00	50,00	50,00	66,67	53,33
		Jumlah pengunjung perpustakaan pertahun	1.616 orang	1468 Orang	2.518 Orang	100,00	100,00	652,39	133,03	171,53	231,39
		Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (buku)	47.527	42527 Eksemplar	25.833 Eksemplar	100,00	100,00	81,15	68,17	60,16	81,89
		Persentase Penyandang cacat mendapat akses mengikuti pendidikan	60 siswa SDLB	55 siswa SDLB	48 siswa SDLB	100,00	100,00	106,67	96,00	87,27	97,99
2	Tenaga Kerja yang terampil dan siap bekerja	Berfungsinya BLK	1 unit	1 unit	1 unit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Rata - rata										99,22	104,26

Misi kedua dari RPJMD ini terdiri dari 2 sasaran dan 27 indikator utama dengan rata-rata capaian kinerja terhadap target tahun 2015 sebesar 99,22 %. Jika melihat standar pencapaian dengan skala ordinal yang telah ditetapkan maka pelaksanaan dari misi kedua ini dapat dikategorikan sangat berhasil karena memiliki nilai rata-rata diatas 99,22%. Meskipun tetapi terdapat 1 indikator yang mendapat kategori cukup, yaitu jumlah perpustakaan yang hanya mencapai 50 % dari target yang ditetapkan. Sedangkan untuk rata-rata capaian kinerja setiap tahun (2011 s/d 2015) pada Misi 2 mencapai 101,33 % atau masuk dalam kategori sangat berhasil.



MISI 3 : MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, EFISIEN, AKUNTABEL DENGAN PENEMPATAN SDM PROFESIONAL.

Untuk mencapai Misi 3 **“Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Akuntabel Dengan Penempatan SDM Profesional”** didukung dengan 7 (tujuh) sasaran dan 26 indikator kinerja yaitu :

- 1) Penataan organisasi pemerintahan daerah yang efektif dan efisien untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan



- 2) Penataan dan implementasi sistem pengelolaan keuangan dan anggaran yang transparan berbasis *e-budget* dan *e-audit*
- 3) Penataan wilayah Kecamatan dan desa/kelurahan
- 4) Penyiapan sistem perekrutan CPNS yang bebas KKN dan memberikan perhatian khusus untuk putra-putri Tanjung Jabung Timur.
- 5) Peningkatan kesejahteraan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
- 6) Peningkatan insentif untuk pegawai SARA (Imam, Balai, Khatib dan Guru Ngaji)
- 7) Sistem pelayanan publik terpadu yang bebas KKN

Seluruh sasaran tersebut telah dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai indikator kegiatan sebagai berikut :

SASARAN STRATEGI KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2016	TARGET 2015	REALISASI 2015	CAPAIAN (%) TERHADAP TARGET 2011	CAPAIAN (%) TERHADAP TARGET 2012	CAPAIAN (%) TERHADAP TARGET 2013	CAPAIAN (%) TERHADAP TARGET 2014	CAPAIAN (%) TERHADAP TARGET 2015	RATA-RATA CAPAIAN (%) 2011-2015
1	Penataan organisasi pemerintahan daerah yang efektif dan efisien untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan	Jabatan diisi oleh aparaturnya sesuai dengan kemampuan, keahlian, jenjang kepangkatan dan karier	85,00%	75,00%	65,00%	104,76	100,00	86,96	82,86	86,67	92,25
		Jumlah PNS Daerah	5.000	5.000	4.514	100,00	100,00	94,65	92,15	90,28	95,42
		Meningkatnya persentase tindak lanjut hasil-hasil pengawasan (temuan dan tindak lanjut)	100,00%	96,00%	107,00%	100,00	100,00	106,45	107,00	111,46	104,98
		Meningkatnya kapasitas aparaturnya pengawasan internal (Persentase aparaturnya pengawasan sesuai dengan pendidikan dan atau mengikuti pelatihan atau kursus)	95%	85%	75,030%	100,00	85,00	76,92	100,04	88,27	90,05
		Rasio jumlah polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	7,1/10.000 penduduk	6,1/10.000 penduduk	3,5/10.000 penduduk	100,00	100,00	77,08	72,55	57,38	81,40
2	Penataan dan implementasi sistem pengelolaan keuangan dan anggaran yang transparan berbasis e-budget dan e-audit	Meningkatnya pencapaian sistem keuangan daerah yang transparan berbasis e-budget dan e-audit	1 aplikasi anggaran dan 1 aplikasi pelaporan anggaran	1 aplikasi anggaran dan 1 aplikasi pelaporan anggaran	1 aplikasi anggaran dan 1 aplikasi pelaporan anggaran	100,00	50,00	100,00	100,00	100,00	90,00



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

3	Penataan wilayah Kecamatan dan desa/kelurahan	Wilayah daerah tertata sesuai dengan hasil musyawarah dengan pihak-pihak berkepentingan	93 desa/kelurahan (100%)	93 desa/kelurahan (100%)	93 desa/kelurahan (100%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Penyelenggaraan pelayanan public di Kecamatan meningkat	7 jenis pelayanan	6 jenis pelayanan	6 jenis pelayanan	100,00	90,00	100,00	100,00	100,00	98,00
4	Penyiapan sistem perekrutan CPNS yang bebas KKN dan memberikan perhatian khusus untuk putra-putri Tanjung Jabung Timur.	Adanya prioritas penerimaan CPNS berdasarkan analisis kebutuhan	55%	50%	50%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Penempatan CPNS sesuai dengan beban kerja setiap SKPD	1 ujian kali kompetensi	1 ujian kali kompetensi	1 ujian kali kompetensi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		CPNS yang bebas KKN	100%	100%	100%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Peningkatan kesejahteraan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan	Adanya standar aturan TKD diberikan sesuai dengan beban kerja dan prestasi kerja serta lokasi tempat tugas (sangat-sangat terpencil – sangat terpencil - tidak terpencil)	40 Milyar	38,8 Milyar	38,8 Milyar	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	90,00
6	Peningkatan insentif untuk pegawai SARA (Imam, Balai, Khatib dan Guru Ngaji).	Insentif Pegawai SARA meningkat	Rp. 700.000,00	Rp. 700.000,00	Rp. 700.000,00	Rp. 700.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Penghargaan bagi Pegawai SARA	Rp. 700.000,00	Rp. 700.000,00	Rp. 700.000,00	Rp. 700.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	Sistem pelayanan publik terpadu yang bebas KKN	Perda pelayanan public mampu meningkatkan kepastian hukum dan pendapatan asli daerah	1 perda	1 perda	1 perda	1 perda	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		KPPT berfungsi sebagai lembaga terpadu pelayanan publik	1 SOP	1 SOP	1 SOP	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui pelayanan terpadu	Meningkat 12,33%	Meningkat 14,41%	Meningkatkan 14,43%	100,00	100,00	104,46	102,03	100,14	101,33
		Sistem komputerisasi KTP terbangun di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Terealisasi di 11 kecamatan	Terealisasi di 11 kecamatan	Terlaksananya e-KTP di 11 kecamatan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	99%	97%	137.364	100,00	100,00	87,43	89,02	94,53	94,20
		Rasio pasangan berakate nikah	65%	63%	193	100,00	100,00	14,09	40,00	7,05	52,23



	Kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk	100%	100%	134.678	100,00	100,00	49,81	57,40	61,39	73,72
	Laju pertumbuhan penduduk	0,70%	0,69%	0,74%	100,00	100,00	101,52	104,55	93,24%	81,40
	Pengembangan sistem jaringan e-government	10 MBPS	9 MBPS	18 MBPS	100,00	100,00	85,71	225,00	200,00	142,14
	Pengembangan pelayanan publik dengan sistem aplikasi online	1 website	1 website	1 website	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	80,00
	Sistem informasi daerah berbasis online	1 website	1 website	2 website	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00	120,00
	Pelayanan publik bebas dari KKN	100%	100%	100%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Rata -Rata									96,08	95,66

Berdasarkan standar pencapaian dengan skala ordinal maka 7 sasaran dengan 26 indikator yang mendukung misi ketiga dapat dinyatakan sangat berhasil karena rata-rata capaian kinerja terhadap target tahun 2015 sebesar 96,08 %. Hanya ada 2 indikator yang masuk dalam kategori cukup atau nilai capaiannya tidak melebihi 70% dari target yang ditetapkan, yaitu rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 dan kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk. Sedangkan untuk rata-rata capaian kinerja setiap tahun (2011 s/d 2015) pada Misi 3 mencapai 95,66 % atau masuk dalam kategori sangat berhasil.



**MISI 4 : MENINGKATKAN PENGEMBANGAN EKONOMI
KERAKYATAN MELALUI PENINGKATAN PRODUKTIVITAS
PERTANIAN, PERKEBUNAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN,
PERDAGANGAN, PARIWISATA DAN SEKTOR JASA
LAINNYA**

Untuk mencapai Misi 4 ***“Meningkatkan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Kelautan, Perdagangan, Pariwisata dan Sektor Jasa Lainnya”*** pada tahun 2015 telah dilaksanakan 9 (sembilan) sasaran yaitu :



- 1) Iklim investasi yang sehat dengan reformasi kelembagaan ekonomi di berbagai tingkatan pemerintahan yang mampu mengurangi praktik ekonomi tinggi.
- 2) Stabilitas makro ekonomi dengan tetap mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas serta peningkatan kemampuan pendanaan pembangunan.
- 3) Membentuk BUMD yang dapat memberikan sumbangan kepada pendapatan asli daerah.
- 4) Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pedesaan yang ditandai dengan berkurangnya jumlah penduduk miskin serta meningkatnya tingkat kesejahteraan dan akses kebutuhan dasar masyarakat.
- 5) Perbaikan iklim ketenagakerjaan dengan upaya menurunkan tingkat pengangguran.
- 6) Pengembangan potensi wisata dan kawasan desa wisata melalui promosi
- 7) Peningkatan produksi pertanian (pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan dan kehutanan) dan terwujudnya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani dan keluarga
- 8) Pengelolaan sumberdaya alam migas dan bahan tambang yang memberi manfaat ekonomi untuk Pendapatan daerah dan masyarakat sekitar dengan dampak lingkungan yang minimal
- 9) Peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah dan berkurangnya kesenjangan pembangunan antar wilayah

Seluruh sasaran tersebut telah dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai indikator kegiatan sebagai berikut :

SASARAN STRATEGI KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2016	TARGET 2015	REALISASI 2015	CAPAIAN (%) TERHADAP TARGET 2011	CAPAIAN (%) TERHADAP TARGET 2012	CAPAIAN (%) TERHADAP TARGET 2013	CAPAIAN (%) TERHADAP TARGET 2014	CAPAIAN (%) TERHADAP TARGET 2015	RATA-RATA CAPAIAN (%) 2011-2015
1. Iklim investasi yang sehat dengan reformasi kelembagaan ekonomi di berbagai tingkatan pemerintahan yang mampu mengurangi praktik ekonomi tinggi.	Jumlah izin Pelayanan satu pintu	38 jenis perizinan	36 jenis perizinan	31 jenis izin	100,00	100,00	96,88	93,94	83,78	94,92
	Nilai Investasi PMA dan PMDN (US\$)	US\$ 26.746	US\$ 24.316	US\$ 69.530	285,94	839,49	593,03	398,27	285,94	480,53



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

2	Stabilitas makro ekonomi dengan tetap mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas serta peningkatan kemampuan pendanaan pembangunan	Nilai Ekspor (US\$)	110,50 Juta	97,35 Juta	168,73 juta	100,00	96,76	93,37	98,41	173,32	112,37
		Nilai Impor (US\$)	27,68 Juta	24,78 Juta	6,78 Juta	100,00	93,82	93,60	49,01	27,36	72,76
		Pertumbuhan Ekonomi	7,11%	7,55%	8,86%	100,00	120,39	172,93	143,64	117,35	130,86
		Laju inflasi	3,95%	4,00%	0,91%	100,00	5,96	104,23	5,72	22,75	47,73
		PDRB atas harga berlaku	IDR 20.062.142,53 Juta	IDR 16.663.486,41 Juta	IDR 19.531.188 Juta	100,00	95,32	100,00	91,14	91,14	95,52
		Jenis dan jumlah bank	8	8	7	100,00	100,00	100,00	100,00	87,5	97,50
		Jumlah Penduduk (jiwa)	219.979	218.995	213.670	100,00	100,00	100,75	100,75	97,57	99,81
		Jumlah Sentra industri kecil	18 unit	14 unit	14 unit	150,00	100,00	100,00	83,33	100,00	106,67
3	Membentuk BUMD yang dapat memberikan sumbangan kepada pendapatan asli daerah	Peningkatan kontribusi BUMD terhadap PAD	Meningkat	Meningkat	Meningkat	50,00	100,00	0,00	100,00	100,00	70,00
		Kantaya LKPM	Meningkat	Meningkat	Meningkat	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	75,00
4	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pedesaan yang ditandai dengan berkurangnya jumlah penduduk miskin serta meningkatnya tingkat kesejahteraan dan akses kebutuhan dasar masyarakat.	Tingkat kemiskinan	6,2	6,5	7,25	100,00	100,00	42,86	100,00	89,66	86,50
		Persentase penduduk di atas garis kemiskinan	93,8	93,5	89,66	100,00	100,00	95,37	95,37	96,11	97,37
		Lumbung pangan	4	4	7	100,00	100,00	100,00	166,67	175,00	128,33
		desa ketahanan pangan	20 desa mandiri pangan	18 desa mandiri pangan	16 desa mandiri	12,90	100,00	100,00	93,75	93,75	80,08
		Lembaga distribusi pangan masyarakat	93 Gapoktan	93 Gapoktan	93 Gapoktan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Jumlah Desa Rawan Pangan	50% desa bebas rawan pangan	23 Desa	24 Desa	87,10	77,50	200,00	118,18	95,83	115,72
		Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi (%)	100	80	79,8	100,00	100,00	127,83	112,57	99,75	108,03
		Konsumsi beras (kg/kap/thn)	113	113	113,76	100,00	100,00	88,57	93,63	100,67	96,57
		Jumlah UKM	390 unit	380	375 unit	93,90	21,00	409,38	94,00	98,68	143,39
		Jumlah/UKM yang berperan	390 unit	380	375unit	32,88	21,00	409,38	94,00	98,68	131,19
		Jumlah Wirausaha baru berbasis teknologi	30 orang/unit	26 orang/unit	25 orang/unit	130,00	100,00	55,00	91,00	119,05	99,01
		UKM Unggulan	75 UKM	61 UKM	65 UMKM	70,00	146,67	34,29	104,00	106,56	92,30
		Jumlah koperasi handal	273 koperasi	69 koperasi	94 koperasi	255,26	41,18	105,51	109,00	136,23	129,44
		Persentase koperasi aktif	45%	41,18	43,10%	100,00	100,00	111,04	111,04	104,66	105,35
		Produk Unggulan	14 produk	14 produk	20 produk	100,00	350,00	71,43	143,00	142,86	161,46



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

5	Perbaikan iklim ketenagakerjaan dengan upaya menurunkan tingkat pengangguran	Jumlah TK yang tereserap	1.400	1.360	830,08	100,00	346,81	346,81	100,00	61,04	190,93
		UMR	Rp. 1.500.000	Rp. 1.400.000	Rp. 1.300.000	97,90	100,00	108,33	115,56	92,86	102,93
		Jumlah Pelatihan	10 Kali	9 kali	8 kali	100,00	100,00	50,00	100,00	50,00	80,00
		Jumlah perusahaan yang dimonitor terkait peraturan Per UU Ketenagakerjaan	17 perusahaan	16 perusahaan	15 perusahaan	100,00	100,00	233,33	93,75	93,75	124,17
		Tingkat Partisipasi angkatan kerja	97,50%	97,50%	62,00%	100,00	100,00	71,76	71,75	63,59	81,42
		Angka kesempatan kerja	104.130 orang	103.447 orang	87.312 orang	100,00	100,00	102,75	98,28	84,40	97,09
		Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan	46,60%	45,60%	45,60%	100,00	100,00	99,56	99,56	100,00	99,82
		Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	11,40%	11,40%	11,40%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Partisipasi angkatan kerja wanita	44,06%	42,78%	40,84%	100,00	100,00	85,49	85,49	95,47	93,29
6	Pengembangan potensi wisata dan kawasan desa wisata melalui promosi	ketersediaan biro jasa perjalanan wisata untuk paket wisata di Tanjung Jabung Timur	2 biro	2 biro	2 biro	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	90,00
		Keterpaduan sistem jaringan modal transportasi untuk pelayanan kepariwisataan	adanya sinergitas sarana modal transportasi untuk pelayanan kepariwisataan di Tanjung Jabung Timur	60%	Diprogramkan	100,00	50,00	0,00	0,00	0,00	30,00
		keterpaduan untuk pengembangan dan pelestarian objek wisata daerah	kawasan wisata bahari, wisata budaya dan wisata religi yang memenuhi standar	10	Diprogramkan	100,00	100,00	0,00	0,00	90,00	58,00
		Meningkatnya kunjungan wisata 25%	Meningkatnya kunjungan wisata 100%	Meningkatnya kunjungan wisata 75%	Meningkatnya kunjungan wisata 75%	5,00	100,00	60,00	180,00	300,00	129,00
		Kunjungan wisata (orang)	15.000	14.000	14.500	100,00	100,00	110,65	92,59	102,63	101,17
		Sarana wisata (hotel & restoran)	7 + 274	7 + 274	7 + 67	100,00	100,00	100,00	26,62	90,54	83,43
		Objek Wisata	10	10	10	100,00	100,00	60,00	90,00	100,00	90,00
7	Peningkatan produksi pertanian (pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan dan kehutanan) dan	Potensi Lahan	55.227 Ha	55.650 Ha	23.578 Ha	72,30	100,00	69,57	73,86	42,37	71,62
		Luas lahan pertanian tanaman pangan	33.120 Ha	29.425 Ha	17.766 Ha	97,94	90,88	86,84	80,91	60,38	83,39
		Pemberian bantuan, fasilitas, subsidi dll	17.000 Ha	17.000 Ha	9.093 Ha	93,75	100,00	5,41	52,94	53,49	61,12



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

	terwujudnya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani dan keluarga	Penguatan Kelompok Tani	2.012 Kelompok	1.190 Kelompok	889 kelompok	100,00	103,57	99,23	102,79	74,71	96,06
		Nilai Tukar Petani (%)	101,00%	99,64%	95,43%	100,00	100,00	99,37	99,37	95,77	98,90
		Produksifitas Padi	37,0 Kwt/ha	36,8 Kwt/ha	41,80 Kwt/ha	100,00	100,00	98,71	107,63	113,59	103,99
		Produksifitas kedelai	15 kwt/ha	14,93 kwt/ha	14,10 kwt/ha	100,00	100,00	94,16	92,29	100,00	97,29
		Produksifitas karet	0,33 ton/ha	0,32 ton/ha	0,7 ton/ha	100,00	100,00	253,33	258,06	218,75	186,03
		Produksifitas kelapa sawit	3,0 ton/ha	2,85 ton/ha	2,00 ton/ha	100,00	100,00	85,94	77,36	70,18	86,70
		Produktifitas kopi	0,56 ton/ha	0,55 ton/ha	0,47 ton/ha	100,00	100,00	87,04	87,04	85,45	91,91
		Produksi Padi	127.154 ton	107.201 ton	77.500 ton	90,84	0,90	92,56	88,51	72,29	69,02
		Produksi Jagung	6.386 ton	6.140 ton	7.317 ton	44,78	1,02	28,97	67,88	119,17	52,36
		Jumlah Sapi (ekor)	17.000 ekor	16.100 ekor	16.691 ekor	105,81	106,92	107,53	95,11	103,67	103,81
		Jumlah Kambing (ekor)	29.000 ekor	28.375 ekor	38.379 ekor	131,86	146,20	128,08	144,11	135,26	137,10
		Jumlah kerbau (ekor)	550 ekor	154 ekor	57 ekor	110,64	38,16	27,90	17,02	37,01	46,15
		Jumlah domba (ekor)	550 ekor	468 ekor	93 ekor	84,29	52,73	47,19	25,71	19,87	45,96
		Produksi daging ruminansia besar	128,8 ton	125,7 ton	318,19 ton	100,00	100,00	118,73	259,54	253,13	166,28
		Lembaga ekonomi mikro	11 unit	10 unit	10 unit	100,00	100,00	100,00	125,00	100,00	105,00
		Jumlah industri pengolahan hasil pertanian	320	315	315	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Terpenuhi sarana prasarana pertanian	100	53,00%	53,00%	100,00	100,00	179,07	113,33	100,00	118,48
		Pencegahan penularan penyakit ternak	33.000 dosis	31.000 dosis	24.470 dosis	100,00	100,00	103,10	92,43	78,94	94,89
		fasilitas pemasaran hasil produksi peternakan	2 unit Pasar Hewan	3 unit Pasar Hewan	2 unit Pasar Hewan	100,00	100,00	100,00	100,00	66,67	93,33
		Ikan Laut (ton)	40.500 Ton	37.125 Ton	25.792,20 Ton	87,59	81,58	78,49	71,12	69,47	77,65
		Ikan Perairan Umum (ton)	1.148 Ton	900 Ton	888,30 Ton	103,23	96,68	99,14	106,05	98,70	100,76
		Ikan Kolam (ton)	853 Ton	500 Ton	314,60 Ton	568,26	123,46	100,00	81,08	62,92	187,14
8	Pengelolaan sumberdaya alam migas dan bahan tambang yang memberi manfaat ekonomi untuk Pendapatan daerah dan masyarakat sekitar dengan dampak lingkungan yang minimal	Peraturan tentang pengelolaan SDA	Perda ttg minerba, ttg air bawahtanah, ttg limbah B3	3 perda	1perda	100,00	100,00	0,00	50,00	33,33	56,67
		Jumlah penyuluhan untuk kesadaran pengelolaan lingkungan	5 kali	4 kali	4 kali	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	90,00
		Tingkat pencemaran lingkungan	0 kasus	0 kasus	1 kasus	100,00	100,00	100,00	75,00	75,00	90,00
		Kerusakan lingkungan	0 kasus	0 kasus	0 kasus	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



		Bencana alam akibat pengelolaan SDA	0 kasus	0 kasus	0 kasus	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Sosialisasi pengelolaan SDA dan Lingkungan	5 kali	4 kali	4 kali	100,00	100,00	100,00	66,67	100,00	93,33
9	Peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah dan berkurangnya kesenjangan pembangunan antar wilayah	Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan di kecamatan	2 Wilayah Pertumbuhan	2 Wilayah Pertumbuhan	2 Wilayah Pertumbuhan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Penguatan lembaga ekonomi pedesaan yang mandiri dan unggul	BUMDes sebanyak 50 % dari jumlah desa	Pendirian BUMDes sebanyak 5 desa	Pendirian BUMDes sebanyak 5 desa	100,00	100,00	100,00	94,69	100,00	98,94
		Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	9 dokumen	5 dokumen	12 dokumen	100,00	100,00	360,00	180,00	240,00	196,00
		Partisipasi Masyarakat dalam proses pembangunan	93 desa/kelurahan (100%)	93 desa/kelurahan (100%)	93 desa/kelurahan (100%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Kapasitas Aparatur Desa	100%	90%	90%	100,00	100,00	35,23	100,00	100,00	87,05
		Kapasitas perempuan dalam pembangunan desa	50%	40%	37,88%	100,00	100,00	100,00	100,00	94,70	98,94
		Kawasan Kota Mandiri Terpadu	1 kawasan	1 kawasan	1 kawasan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Rata - rata										100,54	104,88

Berdasarkan standar pencapaian dengan skala ordinal maka 9 sasaran dengan 81 indikator yang mendukung misi keempat dapat dinyatakan sangat berhasil karena rata-rata capaian kinerja terhadap target tahun 2015 sebesar 100,54 %. Akan tetapi masih terdapat 9 indikator dari total indikator yang masih termasuk kategori kurang karena nilai capaiannya yang kurang dari 55 %. Sedangkan untuk rata-rata capaian kinerja setiap tahun (2011 s/d 2015) pada Misi 4 mencapai 104,88 % atau masuk dalam kategori sangat berhasil.



MISI 5 : MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT



Untuk mencapai Misi 5 **“Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat”** pada tahun 2015 telah dilaksanakan 4 (empat) sasaran utama yaitu:

- 1) Pelayanan berobat gratis masyarakat yang lebih sederhana dan mudah dijangkau serta berkualitas
- 2) Ketersediaan peralatan medis, obat-obatan, tenaga medis, dokter umum dan dokter spesialis dengan jumlah yang memadai untuk Rumah Sakit Umum dan Puskesmas rawat
- 3) Ketersediaan peralatan, obat-obatan dengan jumlah yang memadai untuk Puskesmas dan satelitnya. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
- 4) Pelayanan dan perlindungan kesehatan keluarga, ibu dan anak

Seluruh sasaran tersebut telah dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai indikator kinerja sebagai berikut :

SASARAN STRATEGI KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2016	TARGET 2015	REALISASI 2015	CAPAIAN (%) TERHADAP TARGET 2011	CAPAIAN (%) TERHADAP TARGET 2012	CAPAIAN (%) TERHADAP TARGET 2013	CAPAIAN (%) TERHADAP TARGET 2014	CAPAIAN (%) TERHADAP TARGET 2015	RATA-RATA CAPAIAN (%) 2011-2015
1 .	Pelayanan berobat gratis masyarakat yang lebih sederhana dan mudah dijangkau serta berkualitas	Jumlah Puskesmas	17	17	17	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Jumlah Puskesmas Pembantu	64	64	59	100,00	93,44	90,63	92,19	93,69
		Ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	100%	100%	93,28	100,00	101,05	97,18	95,24	97,35
		Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100%	95%	60,00	100,00	100,00	101,06	101,06	85,71
		Angka Usia Harapan Hidup	72,54	71,55	65,33	100,00	100,00	99,73	98,90	91,31
2 .	Ketersediaan peralatan medis, obat-obatan, tenaga medis, dokter umum dan dokter spesialis dengan jumlah yang memadai untuk Rumah Sakit Umum dan Puskesmas rawat inap	Jumlah Dokter	51	45	42	100,00	80,56	84,62	100,00	93,33
		Jumlah Bidan	220	209	293	100,00	137,42	143,26	147,98	140,19
		Jumlah Perawat	220	210	295	100,00	130,30	150,83	147,50	140,48
		Jumlah Dokter per Puskesmas	2-3 dokter umum/spesialis; 1 dokter gigi	1-3/Puskesmas: 1-2dokter umum/spesialis/gigi	1,6	100,00	85,00	100,00	100,00	66,67
		Rasio penduduk dengan Bidan	1 : 900	1 : 922	1 : 922	100,00	132,48	111,19	129,97	100,00
		Rasio penduduk dengan	1 : 1.000	1 : 1.155	1 : 1.155	100,00	19,43	146,30	153,69	100,00



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

		Perawat									
3	Ketersediaan peralatan, obat-obatan dengan jumlah yang memadai untuk Puskesmas dan satelitnya.	Indeks pembangunan Manusia	74,3	73,8	59,80	100,00	99,60	99,89	98,63	81,03	95,83
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100%	95%	95,00%	100,00	100,00	117,65	111,11	100,00	105,75
4	Pelayanan dan perlindungan kesehatan keluarga, ibu dan anak	cakupan PUS yang istrinya dibawah 20 tahun sebesar 3,5%	80 % dari 3,5 % PUS dibawah 20 tahun	70 % dari 3,5 % PUS dibawah 20 tahun	70 % dari 3,5 % PUS dibawah 20 tahun	100,00	100,00	77,00	100,00	100,00	95,40
		Cakupan sasaran PUS menjadi peserta KB aktif sebesar 65%	85%	82%	82%	100,00	100,00	100,00	114,59	100,00	102,92
		Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) sebesar 5%	80 % dari sasaran 5 %	70 % dari sasaran 5 %	69,12 % dari sasaran 5 %	58,35	100,00	72,50	99,05	98,59	85,70
		Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB sebesar 70%	80 % dari sasaran 70 %	70 % dari sasaran 70 %	70 % dari sasaran 70 %	100,00	100,00	101,23	116,67	71,43	97,87
		Rata-rata jumlah anak per keluarga	2 anak	2 anak	2 anak	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	80%	75%	84,12	100,00	100,00	104,51	124,34	112,16	108,20
		Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	95%	90%	93,02	100,00	100,00	112,96	108,92	103,69	105,11
		Cakupan desa/kelurahan universal child immunization (UCI)	100%	100%	95,00	100,00	100,00	93,89	100,63	95,00	97,90
		Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	100%	100%	100,00	100,00	100,00	105,26	100,00	100,00	101,05
		Cakupan kunjungan bayi	95%	93%	95,03	100,00	100,00	107,99	105,05	102,18	103,04
		Cakupan kunjungan ibu hamil K4	95%	95%	95,03	100,00	100,00	105,22	103,53	102,18	102,19
		Cakupan pelayanan nifas	95%	90%	100,00	100,00	100,00	115,08	112,60	111,11	107,76
		Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	85%	80%	96,14	100,00	100,00	94,59	115,20	120,18	105,99



	Cakupan desa siaga aktif	70%	40%	45,16	100,00	100,00	97,98	80,15	112,90	98,21
	cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat sebesar 30%	30%	30%	30,00%	100,00	100,00	50,00	50,00	100,00	80,00
	RTS-Miskin	3.191 RT miskin	3.881 RT miskin	12.801 RT Miskin	103,47	100,00	80,31	239,27	329,84	170,58
	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 1	10,40%	12,90%	16,20%	100,00	100,00	100,89	100,89	125,58	105,47
	Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup	118	118	55,56	100,00	86,47	125,98	180,00	212,38	144,71
	Angka kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup	23	23,4	22,35	100,00	86,47	110,36	98,60	104,70	100,02
	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	32	32	22,87	100,00	86,47	148,45	132,45	139,92	121,46
	Angka kematian neonatal per 1.000 kelahiran hidup	15	15	21,83	100,00	86,47	91,32	79,89	68,71	85,28
	Persentase prevalensi kekurangan gizi (standar WHO, 2005)	15	16	16	100,00	100,00	1894,74	170,00	100,00	472,95
	advokasi perlindungan perempuan dan anak	1	1	1	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Rata - rata									110,96	115,23

Berdasarkan standar pencapaian dengan skala ordinal maka 4 sasaran dengan 36 indikator yang mendukung Misi 5 dapat dinyatakan sangat berhasil karena rata-rata capaian kinerja terhadap target tahun 2015 sebesar 110,96 %. Hanya ada 2 indikator capaiannya kurang dari 70 % atau masuk dalam kategori cukup dari target yang ditetapkan, yaitu Jumlah Dokter per Puskesmas 66,67 % dan Angka kematian neonatal per 1.000 kelahiran hidup 68,71 %. Sedangkan untuk rata-rata capaian kinerja setiap tahun (2011 s/d 2015) pada Misi 5 mencapai 115,23 % atau masuk dalam kategori sangat berhasil.



MISI 6 : MEMFASILITASI PERCEPATAN PENYELESAIAN SENGKETA LAHAN MASYARAKAT

Untuk mencapai Misi 6 **“Memfasilitasi Percepatan Penyelesaian Sengketa Lahan Masyarakat ”** pada tahun 2015 telah dilaksanakan 2 (dua) sasaran utama yaitu :

- 1) Kepemilikan lahan-lahan yang mengalami sengketa terutama sengketa lahan antara masyarakat dengan perusahaan.
- 2) Melindungi fasilitas umum dan aset negara yang diakibatkan adanya sengketa lahan yang terjadi.


Seluruh program tersebut telah dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai indikator kegiatan sebagai berikut :

SASARAN STRATEGI KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2016	TARGET 2015	REALISASI 2015	CAPAIAN (%) TERHADAP TARGET 2011	CAPAIAN (%) TERHADAP TARGET 2012	CAPAIAN (%) TERHADAP TARGET 2013	CAPAIAN (%) TERHADAP TARGET 2014	CAPAIAN (%) TERHADAP TARGET 2015	RATA-RATA CAPAIAN (%) 2011-2015
1. Kepemilikan lahan-lahan yang mengalami sengketa terutama sengketa lahan antara masyarakat dengan perusahaan.	Pemahaman para pihak terhadap objek sengketa menjadi jelas	100%	100%	100%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Persentase konflik lahan masyarakat	3%	5%	5%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Advokasi pengetahuan dan pemahaman dalam penyelesaian sengketa lahan	3 kali sosialisasi	3 kali sosialisasi	3 kali sosialisasi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2. Melindungi fasilitas umum dan aset negara yang diakibatkan adanya sengketa lahan yang terjadi.	Tatacara penyelesaian sengketa lahan	1 aturan	1 aturan	Ada kejelasan (1 Aturan)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Rata - rata									100,00	100,00

Dari seluruh sasaran dalam pencapaian target indikator kinerja yang ditentukan dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 - 2016, seluruh sasaran yang ditargetkan pada tahun 2015 dapat dilaksanakan dan mencapai target yang diinginkan atau mencapai sebesar 100 %. Sedangkan



untuk rata-rata capaian kinerja setiap tahun (2011 s/d 2015) pada Misi 6 mencapai 100 % atau masuk dalam kategori sangat berhasil.

	<p>MISI 7 : MENINGKATKAN PENATAAN ZONASI DAN PERLINDUNGAN TERHADAP KAWASAN KONSERVASI, PENINGGALAN BUDAYA SITUS DAN PENGEMBANGAN BUDAYA TRADISIONAL.</p>
---	---

Untuk mencapai Misi 7 **“Meningkatkan Penataan Zonasi dan Perlindungan Terhadap Kawasan Konservasi, Peninggalan Budaya Situs dan Pengembangan Budaya Tradisional”** pada tahun 2015 telah dilaksanakan 3 (tiga) sasaran utama yaitu :

- 1) Terciptanya kesadaran para *stakeholder* tentang pentingnya pelestarian alam dan lingkungan hidup khususnya kawasan konservasi dan kawasan perlindungan.
- 2) Adanya peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan pemerintah daerah yang berkenaan dengan lingkungan hidup.
- 3) Adanya penghargaan kepada inisiator yang menjaga lingkungan hidup dan menerapkan sanksi secara konsisten terhadap perusak lingkungan hidup.

Seluruh program tersebut telah dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai indikator kegiatan sebagai berikut :

SASARAN STRATEGI KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2016	TARGET 2015	REALISASI 2015	CAPAIAN (%) TERHADAP TARGET 2011	CAPAIAN (%) TERHADAP TARGET 2012	CAPAIAN (%) TERHADAP TARGET 2013	CAPAIAN (%) TERHADAP TARGET 2014	CAPAIAN (%) TERHADAP TARGET 2015	RATA-RATA CAPAIAN (%) 2011-2015
1. Terciptanya kesadaran para <i>stakeholder</i> tentang pentingnya pelestarian alam dan	Sistem informasi kawasan konservasi peninggalan situs, dan pengembangan budaya tertata dengan baik.	1 sistem informasi	1 sistem informasi	1 sistem informasi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



	lingkungan hidup khususnya kawasan konservasi dan kawasan perlindungan.	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	4 lokasi	4 lokasi	4 lokasi	100,00	100,00	50,00	100,00	100,00	90,00
		Pengamanan Kawasan Konservasi	1 paket	1 paket	1 paket	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Jelasnya zonasi	1 Perda tentang RTRW	1 Perda tentang RTRW	1 Perda tentang RTRW	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Ketaatan terhadap RTRW	100%	90%	92%	100,00	100,00	107,14	107,14	102,22	103,30
		Luas wilayah produktif (Ribu Ha)	33.702,48	33.700,04	172.010	100,00	100,00	266,13	266,13	510,41	248,54
		Luas wilayah industry (Ribu Ha)	180	140	112	100,00	100,00	1018,18	1018,18	80,00	463,27
		Luas wilayah kebanjiran (Ribu Ha)	9.729,30	10.241,36	10,996	100,00	100,00	171,04	171,04	0,11	108,44
		Luas wilayah perkotaan (Ribu Ha)	1.400	1.375	3.039,00	100,00	100,00	41,32	40,55	221,02	100,58
2.	Adanya peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan pemerintah daerah yang berkenaan dengan lingkungan hidup.	Partisipasi masyarakat untuk kepedulian atas perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup	1 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	100,00	100,00	100,00	50,00	100,00	90,00
3.	Adanya penghargaan kepada inisiator yang menjaga lingkungan hidup dan menerapkan sanksi secara konsisten terhadap perusak lingkungan hidup.	Pelestarian hutan dan lahan	1 paket reboisasi	1 paket reboisasi	1 paket reboisasi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Masyarakat peduli lingkungan	100%	80%	65%	100,00	100,00	150,00	100,00	81,25	106,25
		Pelanggar hukum	0%	0%	0%	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	80,00
Rata - rata										130,39	137,72

Misi ketujuh dari RPJMD ini terdiri dari 3 sasaran dan 13 indikator utama dengan rata-rata capaian kinerja terhadap target tahun 2015 sebesar 130,39 % atau berkategori sangat berhasil berdasarkan standar pencapaian dengan skala ordinal yang telah ditetapkan karena memiliki nilai rata-rata diatas 85 %. Akan tetapi terdapat 1 indikator yang mendapat kateregori kurang, yaitu Luas wilayah banjir (Ribuan Ha) sebesar 0,11 %. Sedangkan untuk rata-rata capaian kinerja setiap tahun (2011 s/d 2015) pada Misi 7 mencapai 137,72 % atau masuk dalam kategori sangat berhasil.



MISI 8 : MEWUJUDKAN KEHIDUPAN BERAGAMA, SOSIAL DAN BUDAYA YANG DINAMIS SERTA MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM KEHIDUPAN DEMOKRASI

Untuk mencapai Misi 8 **“Mewujudkan Kehidupan Beragama, Sosial dan Budaya yang Dinamis serta Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Kehidupan Demokrasi”** pada tahun 2015 telah dilaksanakan 6 (enam) sasaran utama yaitu :

- 1) Perlindungan dan kepedulian kepada masyarakat yang mengalami musibah atau bencana alam.
- 2) Dukungan terhadap kehidupan beragama sampai ditingkat terbawah
- 3) Pelestarian kesenian daerah yang berasal dari setiap suku.
- 4) Fasilitasi organisasi kemasyarakatan, kepemudaan, kemahasiswaan dan kelompok masyarakat lainnya dalam melaksanakan kegiatan sosial.
- 5) Peningkatan kesadaran masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara tertib dan demokratis.
- 6) Kualitas pelayanan, rehabilitasi, bantuan sosial, dan jaminan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)

Seluruh sasaran tersebut telah dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai indikator kegiatan sebagai berikut :

SASARAN STRATEGI KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2016	TARGET 2015	REALISASI 2015	CAPAIAN (%) TERHADAP TARGET 2011	CAPAIAN (%) TERHADAP TARGET 2012	CAPAIAN (%) TERHADAP TARGET 2013	CAPAIAN (%) TERHADAP TARGET 2014	CAPAIAN (%) TERHADAP TARGET 2015	RATA-RATA CAPAIAN (%) 2011-2015
1. Perlindungan dan kepedulian kepada masyarakat yang mengalami musibah atau	Penanganan bencana yang cepat dan tepat	korban dapat diselamatkan mencapai 100%	korban dapat diselamatkan mencapai 100%	korban dapat diselamatkan mencapai 100%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

	bencana alam.	Masyarakat yang mengalami musibah mendapat santunan	100% dari jumlah masyarakat terkena musibah	100% dari jumlah masyarakat terkena musibah	100% dari jumlah masyarakat terkena musibah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Dukungan terhadap kehidupan beragama sampai ditingkat terbawah	Dukungan pemerintah daerah mampu meningkatkan kegiatan-kegiatan keagamaan	100% tercipta ketentraman dan kerukunan umat beragama / tidak ada konflik agama	100% tercipta ketentraman dan kerukunan umat beragama / tidak ada konflik agama	100% tercipta ketentraman dan kerukunan umat beragama / tidak ada konflik agama	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Pelestarian kesenian daerah yang berasal dari setiap suku	Cakupan kajian seni 50%	Cakupan kajian seni 50%	Cakupan kajian seni 40%	Cakupan kajian seni 40%	10,00	100,00	100,00	100,00	10,00	64,00
		Jumlah Grup Kesenian dan budaya daerah (grup)	70	65	54	100,00	100,00	64,52	83,87	83,08	86,29
		Gedung Kesenian dan budaya (unit)	7	7	7	100,00	100,00	100,00	83,33	100,00	96,67
		Event seni dan budaya (event)	9	8	7	100,00	100,00	80,00	57,14	87,50	84,93
4	Fasilitasi organisasi kemasyarakatan, kepemudaan, kemahasiswaan dan kelompok masyarakat lainnya dalam melaksanakan kegiatan sosial	Meningkatnya peran organisasi masyarakat secara konstruktif	29 Organisasi masyarakat	29 Organisasi masyarakat	29 Organisasi masyarakat	100,00	100,00	113,79	100,00	100,00	102,76
		Jumlah organisasi pemuda	16 unit	15 unit	13 unit	100,00	100,00	100,00	86,67	86,67	94,67
		Jumlah kegiatan kepemudaan	23 kegiatan	21 kegiatan	19 kegiatan	100,00	100,00	52,94	65,00	90,48	81,68
		Menguatnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak, peningkatan partisipasi masyarakat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Peningkatan kesadaran masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara tertib dan demokratis.	Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam penyampaian aspirasi secara demokratis	2 kali sosialisasi	2 kali sosialisasi	2 kali sosialisasi	100,00	100,00	1100,00	100,00	100,00	300,00
		Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	100,00	100,00	133,33	133,33	100,00	113,33
		Kegiatan pembinaan politik daerah	15 kegiatan	15 kegiatan	9 kegiatan	100,00	100,00	66,67	66,67	60,00	78,67
		Jumlah demo	1	1	1	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Jumlah LSM	10 LSM	10 LSM	5 LSM	100,00	100,00	411,11	411,11	50,00	214,44
6	Kualitas pelayanan, rehabilitasi, bantuan sosial, dan jaminan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Jenis dan jumlah Kegiatan	4 jenis bantuan	4 jenis bantuan	4 jenis bantuan	100,00	100,00	100,00	25,00	100,00	85,00
		Jumlah keluarga miskin yang diberi bantuan dan difasilitasi	200 KK	200 KK	100 KK	100,00	100,00	66,67	278,00	50,00	118,93
		Jumlah lansia yang dilayani	100 orang	80 orang	53	100,00	100,00	117,78	130,00	66,25	102,81



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

		Jumlah eks penyandang sosial yang dilatih	8 orang	7 orang	15 orang	100,00	100,00	300,00	166,67	214,29	176,19
		menurunnya angka anak terlantar pertahun	turun 10% dari tahun 2015	turun 10% dari tahun 2014	turun 25%	100,00	100,00	100,00	250,00	250,00	160,00
		para penyandang cacat di seluruh kecamatan	turun 10% dari total penyandang cacat 2015	turun 10% dari total penyandang cacat 2014	turun 10%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Jumlah eks penyandang sosial yang dilatih keterampilan berusaha	7 orang	5 orang	4 orang	200,00	100,00	133,33	200,00	80,00	142,67
		Jumlah penyandang cacat yang direhabilitasi panti	15 orang	11 orang	4 orang	100,00	100,00	200,00	100,00	36,36	107,27
		Persentase Penurunan eks penyandang penyakit sosial di tempat yang terindikasi penyebaran	turun 10% dari total penyandang 2015	turun 10% dari total penyandang 2014	turun 10%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Persentase Perlindungan dan pembinaan Anak Terlantar (Jumlah anak terlantar yang berhasil dilayani, dilindungi dan dibina)	25 orang	25 orang	20 orang	100,00	100,00	133,33	100,00	80,00	102,67
Rata - rata										94,02	115,88

Berdasarkan standar pencapaian dengan skala ordinal maka 6 sasaran dengan 26 indikator yang mendukung misi kedelapan dapat dinyatakan sangat berhasil karena rata-rata capaian kinerja terhadap target yang ditetapkan tahun 2015 sebesar 94,02 %. Hanya ada 3 indikator yang masuk dalam kategori kurang yaitu Jumlah LSM, Jumlah keluarga miskin yang diberi bantuan dan difasilitasi dan Jumlah penyandang cacat yang direhabilitasi panti karena capaiannya berada dibawah 55 % dari target yang ditetapkan. Sedangkan untuk rata-rata capaian kinerja setiap tahun (2011 s/d 2015) pada Misi 8 mencapai 115,88 % atau masuk dalam kategori sangat berhasil.



MISI 9 : MENINGKATKAN SARANA DAN PRASARANA OLAH RAGA DI SETIAP KECAMATAN DAN PEMBINAAN ATLIT UNTUK



	BERPRESTASI
--	--------------------

Untuk mencapai Misi 9 **“Meningkatkan Sarana dan Prasarana Olah Raga di Setiap Kecamatan dan Pembinaan Atlet Untuk Berprestasi”** pada tahun 2015 telah dilaksanakan 4 (empat) program utama yaitu :

- Ketersediaan fasilitas olah raga di setiap kecamatan.
- Penyiapan atlet berprestasi sejak dini, berkala dan berkelanjutan
- Penghargaan bagi atlet daerah yang berprestasi dan mengharumkan nama daerah.
- Pengembangan dan pendidikan pemuda/l Tanjabtim untuk menjadi Qori dan Qori'ah tingkat provinsi dan tingkat nasional.

Seluruh sasaran tersebut telah dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai indikator kegiatan sebagai berikut :

SASARAN STRATEGI KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2016	TARGET 2015	REALISASI 2015	CAPAIAN (%) TERHADAP TARGET 2011	CAPAIAN (%) TERHADAP TARGET 2012	CAPAIAN (%) TERHADAP TARGET 2013	CAPAIAN (%) TERHADAP TARGET 2014	CAPAIAN (%) TERHADAP TARGET 2015	RATA-RATA CAPAIAN (%) 2011-2015
1. Ketersediaan fasilitas olah raga di setiap kecamatan.	Persentase kualitas dan kuantitas fasilitas olah raga di setiap kecamatan secara merata 75%	65%	55%	44,00%	100,00	100,00	182,50	90,90	80,00	110,68
	Lapangan olahraga	10 unit	9 unit	7 unit	100,00	100,00	50,00	100,00	77,78	85,56
	Jumlah Sarana Olahraga	13	13	9 unit	100,00	100,00	41,67	100,00	69,23	82,18
2. Penyiapan atlet berprestasi sejak dini, berkala dan berkelanjutan	Atlit Berprestasi terbina sejak usia dini	25 atlit	20 atlit	20 atlit	100,00	100,00	40,00	100,00	100,00	88,00
	Jumlah kegiatan olahraga	20 kegiatan	18 kegiatan	12 kegiatan	100,00	100,00	64,29	81,25	66,67	82,44
	Jumlah organisasi olahraga	15 unit	14 unit	14	100,00	100,00	100,00	92,86	100,00	98,57
	Jumlah Club Olahraga	105	103	103	100,00	100,00	96,00	100,00	100,00	99,20
3. Penghargaan bagi atlet daerah yang berprestasi dan mengharumkan nama daerah.	Tersedianya anggaran untuk pembinaan atlet berprestasi	55 juta rupiah	45 juta rupiah	45 juta rupiah	100,00	100,00	107,92	128,57	100,00	107,30



4.	Pengembangan dan pendidikan pemuda/i Tanjabtim untuk menjadi Qori dan Qori'ah tingkat provinsi dan tingkat nasional	Persentase peningkatan prestasi qori dan qori'ah sebesar 50%	Meningkat 80% dari sasaran 50%	Meningkat 60% dari sasaran 50%	Meningkatkan 60 % dari sasaran 50%	100,00	200,00	100,00	100,00	100,00	125,00
Rata - rata										86,71	97,66

Misi kesembilan dari RPJMD 2011-2016 ini terdiri dari 4 sasaran dan 9 indikator utama dengan rata-rata capaian kinerja terhadap target tahun 2015 sebesar 86,71 %. Jika melihat standar pencapaian dengan skala ordinal yang telah ditetapkan maka pelaksanaan dari misi sembilan ini dapat dikategorikan sangat berhasil karena memiliki nilai rata-rata diatas 85 %. Meskipun terdapat 2 indikator yang mendapat kategori cukup karena pencapaiannya kurang dari 70 %, yaitu jumlah sarana olahraga yang capaian kinerja sebesar 69,23 % dan Jumlah kegiatan olahraga yang capaian kinerja sebesar 66,67 %. Sedangkan untuk rata-rata capaian kinerja setiap tahun (2011 s/d 2015) pada Misi 9 mencapai 97,66 % atau masuk dalam kategori sangat berhasil.

C. KINERJA KEUANGAN

1. Pendapatan Daerah

Target pendapatan daerah pada tahun 2015 sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur ditetapkan sebesar Rp. 945.283.389.254,48 dimana dapat direalisasikan sebesar Rp. 915.713.815.791,04 atau terealisasi sebesar 96,87 %, dapat jelas sebagai berikut :

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pendapatan Asli Daerah	31.385.399.350,00	33.999.382.108,71	108,33
2	Pendapatan Dana Perimbangan	765.176.942.104,48	733.466.795.933,00	95,86
3	Lain-lain Pendapatan	148.721.047.800,00	148.247.637.749,33	114,78



	yang sah			
	Total	945.283.389.254,48	915.713.815.791,04	106,32

Sumber Data : DPKAD Kab. Tanjung Jabung Timur

Untuk menilai lebih lanjut kinerja pendapatan daerah kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2015 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah

Untuk Pendapatan Asli Daerah terdiri atas penerimaan yang berasal dari pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah. Penerimaan dari jenis lain-lain pendapatan yang sah terdiri dari hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, bunga deposito, sumbangan pihak ketiga dan penerimaan lain-lain.

No	Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pajak Daerah	9.936.120.000,00	10.242.068.552,50	103,08
2	Retribusi Daerah	5.723.500.000,00	1.058.191.092,00	118,49
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan	3.800.000.000,00	1.697.072.677,45	144,66
4	Lain – Lain PAD yang sah	11.925.779.350,00	447.229.563,24	96,25
Jumlah		31.385.399.350,00	33.999.382.108,71	108,33

Sumber Data : DPKAD Kab. Tanjung Jabung Timur

Total realisasi Pendapatan Asli Daerah selama tahun 2015 melebihi penerimaan yang ditargetkan sebesar 103,08 %. Over target Pendapatan Asli Daerah pada tahun ini disumbang oleh Retribusi Daerah sebesar 144,66 %. Kenaikan realisasi retribusi daerah secara signifikan ini dipengaruhi oleh berlakunya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah dan retribusi daerah, khususnya dari Retribusi Izin Gangguan / Keramaian sebesar 165,25 %.

2. Pendapatan Dana Perimbangan

Untuk dana perimbangan terdiri atas penerimaan yang berasal dari bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak yang terdiri dari bagi hasil pajak dan



bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam; Dana Alokasi Umum; dan Dana Alokasi Khusus.

No	Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Bagi Hasil Pajak dan Bukan pajak	118.420.307.870,00	97.719.256.300,00	82,52
2	Bagi Bukan pajak/Sumber Daya Alam	104.170.133.234,48	93.526.618.633,00	89,78
	Dana Alokasi Umum	432.097.281.000,00	432.097.281.000,00	100,00
3	Dana Alokasi Khusus	110.489.220.000,00	16.298.880.000,00	99,67
J u m l a h		765.176.942.104,48	733.466.795.933,00	95,86

Sumber Data : DPKAD Kab. Tanjung Jabung Timur

Total realisasi dana perimbangan selama tahun 2015 tidak mencapai target pendapatan yang ditetapkan atau hanya sebesar 95,86 %. Pendapatan Dana Perimbangan dari bagi hasil pajak terealisasi 82,52 dan bagi hasil bukan pajak hanya terealisasi sebesar 89,78 %, sedangkan realisasi dari Dana Alokasi Umum 100 % dan Dana Alokasi Khusus terealisasi 99,67 %.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah, terdiri dari dana hibah; dana darurat; dana bagi hasil pajak provinsi dan pemda lainnya; dana penyesuaian dan Otonomi khusus (Dana Pengembangan Desentralisasi Fiskal); dan bantuan keuangan dari provinsi atau pemda lainnya.

No	Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Hibah	0,00	374.027.926,04	-
2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya	30.835.539.800,00	36.438.380.485,00	117,41
4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus (DPDF)	106.885.508.000,00	107.341.384.000,00	103,43
5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau pemerintah	11.000.000.000,00	4.400.000.000,00	40,00



	daerah lainnya			
Jumlah		11.925.779.350,00	447.229.563,24	96,25

Sumber Data : DPKAD Kab. Tanjung Jabung Timur

2. Belanja Daerah

Secara umum anggaran yang dialokasikan dalam APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan satuan pagu tertinggi guna pelaksanaan kegiatan, sehingga apabila dalam pengeluaran tertentu tidak mencapai catatan target belanja, dapat diartikan adanya efisiensi. Dengan pengeluaran tetap mengedepankan azas manfaat dan target kinerja masing-masing kegiatan yang telah direncanakan.

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Tidak Langsung	492.727.961.587,85	444.827.524.451,79	90,28
2	Belanja Langsung	518.589.286.562,50	476.418.225.637,60	91,87
	Total	1.011.317.248.150,35	921.245.750.089,39	91,09

Sumber Data : DPKAD Kab. Tanjung Jabung Timur

Pada tahun anggaran 2015 belanja tidak langsung hanya sebesar 48,72 % dari total belanja, hal ini seperti yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah 2011-2016 bahwa belanja tidak langsung di kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Total realisasi belanja sebesar Rp. **921.245.750.089,39** dari target yang ditetapkan sebesar Rp. **1.011.317.248.150,35** atau terealisasi sebesar **91,09** %, dimana belanja tidak langsung terealisasi sebesar Rp. 444.827.524.451,79 atau 90,28 % dan belanja langsung sebesar Rp. 476.418.225.637,60 atau 91,87 %.

3. Pembiayaan Daerah



Pembiayaan daerah yang termuat dalam APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdiri atas penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Pada sisi penerimaan pembiayaan daerah terdiri dari SILPA Tahun lalu, penerimaan kembali penyertaan modal, penerimaan kembali piutang dan penerimaan hutang. Sedangkan sisi pengeluaran pembiayaan terdiri dari pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal/investasi.

Selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan netto dan selisih antara penerimaan daerah dengan belanja daerah merupakan surplus/defisit belanja.

NO	PEMBIAYAAN	ANGGARAN/TARGET	REALISASI
1	Penerimaan Pembiayaan	66.033.858.895,87	61.454.158.619,91
	- SILPA	66.033.858.895,87	61.454.158.619,91
	- Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
	- Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	0,00
	- Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00
	- Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00
2	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00
	- Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
	- Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	0,00	0,00
	- Badan Usaha Kelompok/Anggota Masyarakat	0,00	0,00
	- Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00
	- Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
3	Pembiayaan Netto	66.033.858.895,87	61.454.158.619,91

* Data Sementara(unaudit)

Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2015, data

Dari sisi penerimaan pembiayaan tahun 2015, anggaran SILPA ditargetkan sebesar Rp.66.033.858.895,87 terealisasi sebesar Rp.61.454.158.619,91 atau 93,06 %, sedangkan sisi pengeluaran pembiayaan tidak dianggarkan sehingga pembiayaan netto tahun 2015 sama dengan penerimaan pembiayaan, yaitu sebesar Rp.66.033.858.895,87 terealisasi sebesar Rp.61.454.158.619,91 atau 93,06 %.



BAB IV PENUTUP

Bab ini menyimpulkan seluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2015 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang

A. KESIMPULAN

Laporan kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015 ini diharapkan dapat memberikan gambaran, tentang berbagai capaian kinerja, baik makro maupun mikro. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya. Sangat disadari, bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran, tentang hasil pembangunan yang telah dilakukan oleh lingkup Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Di masa mendatang, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur akan melakukan berbagai langkah untuk lebih menyempurnakan pelaporan ini, agar terwujud transparansi dan akuntabilitas yang kita ingin wujudkan bersama.

Berdasarkan evaluasi terhadap indikator sasaran yang telah disepakati dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2011–2016, sesuai dengan tahapan target pencapaian per tahun, maka pada tahun 2015 seluruh indikator sasaran sudah dapat diidentifikasi perkembangan capaiannya.

Dari seluruh indikator sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah seluruhnya sudah bisa diidentifikasi tingkat capaiannya, meskipun disadari masih terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2015. Hal ini akan menjadi strategi untuk diselesaikan pemecahannya pada tahun berikutnya.



B. SARAN

Guna mempertahankan dan memperbaiki keberhasilan pencapaian kinerja, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sangat mengharapkan adanya/ peningkatan kerjasama dan saling pengertian antara berbagai pihak yang terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas dalam bentuk:

1. Partisipasi *stakeholders*, antara lain : Perangkat Daerah (Dinas, Bagian, Lembaga Teknis, dan perangkat daerah lainnya), instansi pemerintah pusat di daerah, lembaga kemasyarakatan dan LSM, pihak swasta serta para tokoh masyarakat, untuk memberikan informasi yang lengkap dan akurat, sehingga dalam pengambilan kebijakan administrasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat akan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan daerah.
2. Koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan antar unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, serta penyelarasan dengan program Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam rangka perencanaan, pengendalian dan pengawasan, sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang berkenaan dengan penyelenggaraan administrasi umum pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
3. Perubahan paradigma aparat Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk menekankan pelaksanaan kegiatan yang berorientasi hasil dibanding berorientasi proses, sehingga terjadi sinkronisasi antara keinginan masyarakat kabupaten dengan upaya dari aparat pemerintah.

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. AMBO TANG, SE.